



LPPD

LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH
KABUPATEN
PACITAN

 Pemkab Pacitan | Website: <https://pacitankab.go.id> | PACITAN NYAWUJI



DAFTAR ISI

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.1.1 Penjelasan Umum 1

 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah 13

 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal 74

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 79

 2.1 Capaian Kinerja Makro 79

 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 80

 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 82

 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil..... 194

 2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Penunjang 225

 2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah

 Kabupaten Pacitan 239

BAB III CAPAIN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 325

 3.1 Urusan Pemerintahan Yang Mendapatkan Bantuan..... 325

 3.1.1 Identifikasi Bantuan Yang Diterima dari Pemerintah dan
 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 326

 3.1.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan
 dan Upaya Penyelesaian 346

 3.1.3 Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang
 Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di
 Bawahnya 347

**BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL 348**

 4.1 Urusan Pendidikan 348

 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar..... 348

 4.1.2 Target Pencapaian 348

 4.1.3 Realisasi..... 349

 4.1.4 Anggaran..... 350

 4.1.5 Dukungan Personil 352

 4.1.6 Kendala Yang Dihadapi..... 352

4.2	Urusan Kesehatan	353
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	353
4.2.2	Target Capaian.....	353
4.2.3	Hasil Capaian	356
4.2.4	Anggaran.....	358
4.2.5	Dukungan Personil	359
4.2.6	Kendala Yang Dihadapi.....	360
4.3	Urusan Umum.....	360
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	360
4.3.2	Target Capaian.....	360
4.3.3	Realisasi.....	361
4.3.4	Anggaran.....	362
4.3.5	Dukungan Personil	363
4.3.6	Kendala Yang Dihadapi.....	363
4.4	Urusan Perumahan Rakyat.....	363
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	363
4.4.2	Target Capaian.....	364
4.4.3	Hasil Capaian	365
4.4.4	Anggaran.....	365
4.4.5	Dukungan Personil	367
4.4.6	Kendala Yang Dihadapi.....	367
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	367
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	367
4.5.2	Target Capaian.....	368
4.5.3	Hasil Capaian	369
4.5.4	Anggaran.....	370
4.5.5	Dukungan Personil	372
4.5.6	Kendala Yang Dihadapi.....	373
4.6	Urusan Sosial	373
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar.....	373
4.6.2	Target Capaian.....	373
4.6.3	Realisasi.....	375
4.6.4	Anggaran.....	376
4.6.5	Dukungan Personil	378
4.6.6	Kendala Yang Dihadapi.....	378
BAB V PENUTUP		380

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan Tahun 2023 3

Tabel 1.2 Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023 4

Tabel 1.3 Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023 5

Tabel 1.4 Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan 5

Tabel 1.5 Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai per 31 Desember 2023 10

Tabel 1.6 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 12

Tabel 1.7 Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPD Tahun 2023 28

Tabel 1.8 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pendidikan Tahun 2023 75

Tabel 1.9 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Kesehatan Tahun 2023 76

Tabel 1.10 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023 76

Tabel 1.11 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023 76

Tabel 1.12 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2023 77

Tabel 1.13 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2023 78

Tabel 2.1 Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2022 – 2023 .. 79

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kunci Keluaran 84

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Kunci Hasil 194

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Kunci Penunjang 225

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Tahunan 232

Tabel 2.6 Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 240

Tabel 2.7 Target Perjanjian Kinerja 240

Tabel 2.8 Anggaran Tahun 2023 242

Tabel 2.9 Target Perjanjian Kinerja 249

Tabel 2.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 253

Tabel 2.11 Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026	257
Tabel 2.12 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2023	261
Tabel 2.13 Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	263
Tabel 2.14 Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	269
Table 2.15 Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	273
Table 2.16 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	275
Tabel 2.17 Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	280
Tabel 2.18 Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan....	281
Tabel 2.19 Sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	285
Tabel 2.20 Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	292
Tabel 2.21 Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	294
Table 2.22 Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	298
Table 2.23 Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	376
Table 2.24 Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi	304
Table 2.25 Sasaran Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif.....	307
Table 2.26 Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	382
Table 2.27 Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	314
Table 2.28 Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa.....	318
Table 3.1 Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Pasar Tahun Anggaran 2023	326
Table 3.2 Realisasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari Tahun Anggaran 2023	327
Table 3.3 Realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat Tahun Anggaran 2023.....	328
Table 3.4 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealiala Tahun Anggaran 2023	329
Table 3.5 Realisasi Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus Tahun Anggaran 2023	329

Table 3.6 Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Tahun Anggaran 2023	330
Table 3.7 Realisasi Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus Tahun Anggaran 2023	330
Table 3.8 Realisasi Kegiatan Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung Tahun Anggaran 2023.....	331
Table 3.9 Realisasi Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023.....	332
Table 3.10 Realisasi Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023.....	332
Table 3.11 Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Sarana PertanianSub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2023	333
Table 3.12 Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Sarana PertanianSub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2023	334
Table 3.13 Realisasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023	335
Table 3.14 Realisasi Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian Geomembran Tahun Anggaran 2023	336
Table 3.15 Realisasi Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2023	337
Table 3.16 Realisasi Kegiatan Pengembangan UPPO Tahun Anggaran 2023	338
Table 3.17 Realisasi Kegiatan Bantuan Ternak Tahun Anggaran 2023.....	338
Table 3.18 Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun Anggaran 2023	340
Table 3.19 Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun Anggaran 2023	341
Table 3.20 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	342
Table 3.21 Realisasi Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Penyakit PMK Tahun Anggaran 2023	342
Table 3.22 Realisasi Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak Tahun Anggaran 2023	344
Table 3.23 Realisasi Kegiatan Workshop / Pelatihan Tahun Anggaran 2023	345

Tabel 4.1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan 349

Tabel 4.2 Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan 349

Table 4.3 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Pendidikan 351

Tabel 4.4 Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan 354

Tabel 4.5 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan 357

Tabel 4.6 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Kesehatan 359

Tabel 4.7 Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum 361

Tabel 4.8 Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum 361

Tabel 4.9 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Pekerjaan Umum 362

Tabel 4.10 Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat 364

Tabel 4.11 Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat 365

Tabel 4.12 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Perumahan Rakyat 366

Tabel 4.13 Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas..... 368

Tabel 4.14 Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas..... 369

Tabel 4.15 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Trantibumlinmas 371

Tabel 4.16 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial 374

Tabel 4.17 Hasil Capaian SPM Urusan Sosial 375

Tabel 4.18 Anggaran Program dan Kegiatan pendukung SPM Urusan Sosial 377

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 69, Kepala Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Pusat. Seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

1.1.1. Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:

A. Undang – Undang Pembentukan Daerah

Dasar hukum pembentukan daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995

B. Data Geografis Wilayah

Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Sebelah Utara Kabupaten Pacitan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Trenggalek (Jawa Timur), sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah). Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 7,55° - 8,17° Lintang Selatan dan 110,55° - 111,25° Bujur Timur.

Batas wilayah Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Ponorogo (Jawa Timur) dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah).
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km², dimana secara administratif terbagi atas 12 kecamatan yang terdiri dari 5 kelurahan dan 167 desa. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Tulakan, yaitu 161,62 km². Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Sudimoro, yaitu seluas 71,86 km².

Kondisi topografis Kabupaten Pacitan terdiri atas daerah pantai, dataran rendah dan perbukitan. Kondisi tersebut membawa konsekuensi munculnya keberagaman perilaku masyarakat terutama perbedaan mata pencaharian. Kondisi topografi itu dapat dirinci sebagai berikut :

- a) Datar (kelas kelerengan 0-5%) dengan luas 55,59 Km² atau 4% dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- b) Berombak (kelas kelerengan 6-10%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- c) Bergelombang (kelas kelerengan 11-30%) dengan luas 333,57 Km² atau 24 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- d) Berbukit (kelas kelerengan 31-50%) dengan luas 722,73 Km² atau 52 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan;
- e) Bergunung (kelas kelerengan > 52%) dengan luas 138,99 Km² atau 10 % dari luas wilayah Kabupaten Pacitan.

Curah hujan tahunan di Kabupaten Pacitan paling tinggi jatuh pada bulan Desember dengan rata-rata curah hujan sebesar 24,26mm³, sedangkan curah hujan terkecil pada bulan September sebesar 2,19mm³.

Tata guna lahan merupakan gambaran tentang penggunaan ruang wilayah dan aktivitas masyarakat. Sesuai dengan peruntukannya tata guna lahan di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- Tanah ladang : 21,36% atau 29.690,58 Ha
- Pemukiman Penduduk : 4,43% atau 6.157,33 Ha
- Hutan : 57,13% atau 79.397,00 Ha
- Sawah : 9,00% atau 12.509,26 Ha
- Pesisir dan tanah kosong : 8,08% atau 11.232,99 Ha

C. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Pacitan terakhir disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Per Wilayah Kecamatan Se-Kabupaten Pacitan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	DONOROJO	18.850	19.250	38.100
2	PRINGKUKU	16.333	16.592	32.925
3	PUNUNG	18.610	18.993	37.603
4	PACITAN	38.910	39.589	78.499
5	KEBONAGUNG	23.919	22.986	46.905
6	ARJOSARI	21.259	20.859	42.118
7	NAWANGAN	26.397	26.167	52.564
8	BANDAR	22.938	22.631	45.569
9	TEGALOMBO	26.424	26.274	52.698
10	TULAKAN	43.924	43.246	87.170
11	NGADIROJO	24.062	24.258	48.320
12	SUDIMORO	17.540	17.379	34.919
JUMLAH		299.166	298.224	597.390

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan jumlah penduduk akhir tahun 2023 mencapai 597.390 jiwa terdiri atas 299.166 jiwa penduduk laki-laki dan 298.224 jiwa penduduk perempuan.

Komposisi penduduk berdasarkan wilayah menunjukkan bahwa proporsi penduduk di wilayah Kecamatan Tulakan terbanyak dengan jumlah sebesar 87.170 jiwa atau mencapai 14,5 % dari total penduduk sedangkan Kecamatan Pacitan berada pada posisi kedua walaupun merupakan kecamatan kota di Kabupaten Pacitan. Penduduk Kabupaten Pacitan yang sebesar 597.390 jiwa tersebut terbagi menjadi penduduk usia kerja (15 Tahun ke Atas) dan bukan usia kerja.

Adapun komposisi penduduk usia kerja yang bekerja menurut lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
1	Pertanian/ Perkebunan / Peternakan	183.542	30,8%
2	Perikanan / Kelautan	1.352	0,2%
3	Pertambangan/ Industri	126	0,0%
4	Perdagangan	1.055	0,2%
5	Angkutan/ Transportasi	817	0,1%
6	Bank/ Persewaan/ Perusahaan	69.283	11,6%
7	Jasa – jasa	5.415	0,9%
8	Pemerintahan	8.155	1,4%
9	Kesehatan	435	0,1%
10	Pendidikan	2.623	0,4%
11	Keagamaan	30	0,0%
12	Lain – lain		
	- Pensiunan	4.608	0,8%
	-Belum/ tdk bekerja	76.466	12,8%
	-Mengurus rumah tangga	35.037	5,9%
	-Pelajar mahasiswa	92.231	15,5%
	-Lain-lain	114.040	19,2%
JUMLAH		595.215	100,0%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pacitan

Penduduk Kabupaten Pacitan yang bekerja di sektor pertanian/ perkebunan/ peternakan adalah yang terbesar daripada lapangan usaha lain yang ada di Kabupaten Pacitan mencapai 30,8 %. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya potensi pariwisata di Kabupaten Pacitan mendorong pertumbuhan pada sektor perdagangan dan jasa angkutan, dimana hal ini juga membentuk sektor usaha perbankan yang mendukung pembiayaan sektor usaha juga ikut berkembang.

Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah penyediaan lapangan pekerjaan yang sanggup menampung produktivitas sektor pendidikan sehingga terjadi dinamika yang seimbang antara pengembangan kualitas sumberdaya manusia dan laju sektor ekonomi. Bidang pendidikan khususnya guru

mempunyai peranan yang sangat strategis bagi masa depan bangsa dalam penyediaan sumber daya manusia berkualitas.

Tingkat produktifitas dan kompetensi anak didik seseorang sangat ditentukan oleh kualitas pendidik yang cerdas dan terampil, yang diikuti rasa percaya diri serta sikap dan perilaku yang inovatif.

Adapun komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3
Data Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2023

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	TIDAK/BLM SEKOLAH	83.331	13,9%
2.	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	46.163	7,7%
3.	TAMAT SD/SEDERAJAT	211.945	35,5%
4.	SLTP/SEDERAJAT	123.342	20,6%
5.	SLTA/SEDERAJAT	103.597	17,3%
6.	DIPLOMA I/II	2.339	0,4%
7.	AKADEMI/DIPL.III/S. MUDA	3.078	0,5%
8.	DIPLOMA IV/STRATA I	22.600	3,8%
9.	STRATA-II	964	0,2%
10.	STRATA-III	31	0,01%
Jumlah		597.390	100 %

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

D. Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

Wilayah Kabupaten Pacitan terbagi menjadi 12 Kecamatan yang terbagi menjadi 167 Desa dan 5 Kelurahan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
1	Kecamatan Donorojo	1	Sawahan
		2	Kalak
		3	Sendang
		4	Klepu
		5	Gedompol
		6	Cemeng
		7	Gendaran
		8	Sukodono

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		9	Sekar
		10	Donorojo
		11	Belah
		12	Widoro
2	Kecamatan Punung	13	Bomo
		14	Sooko
		15	Punung
		16	Mendolo Kidul
		17	Piton
		18	Kendal
		19	Wareng
		20	Mantren
		21	Ploso
		22	Mendolo Lor
		23	Kebonsari
		24	Gondosari
		25	Tinatar
3	Kecamatan Pringkuku	26	Dersono
		27	Sugihwaras
		28	Watukarung
		29	Jlubang
		30	Candi
		31	Poko
		32	Dadapan
		33	Pringkuku
		34	Sobo
		35	Ngadirejan
		36	Glinggangan
		37	Pelem
		38	Tamanasri
4	Kecamatan Pacitan	39	Pacitan
		40	Pucangsewu
		41	Sidoharjo
		42	Ploso
		43	Baleharjo
		44	Kembang
		45	Sukoharjo
		46	Kayen
		47	Sirnoboyo
		48	Arjowinangun
		49	Bangunsari
		50	Sedeng
		51	Sumberharjo
		52	Tanjungsari

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		53	Menadi
		54	Mentoro
		55	Purworejo
		56	Nanggungan
		57	Widoro
		58	Semanten
		59	Sambong
		60	Banjarsari
		61	Bolosingo
		62	Ponggok
		63	Tambakrejo
5	Kecamatan Arjosari	64	Sedayu
		65	Tremas
		66	Arjosari
		67	Gunungsari
		68	Pagutan
		69	Gembong
		70	Borang
		71	Gegeran
		72	Kedungbendo
		73	Mangunharjo
		74	Temon
		75	Karanggede
		76	Karangrejo
		77	Jetis Kidul
		78	Gayuhan
		79	Jatimalang
		80	Mlati
6	Kecamatan Kebonagung	81	Plumbungan
		82	Karangnongko
		83	Kalipelus
		84	Karanganyar
		85	Katipugal
		86	Klesem
		87	Sidomulyo
		88	Worawari
		89	Mantren
		90	Gawang
		91	Kebonagung
		92	Purwoasri
		93	Banjarjo
		94	Sanggrahan
		95	Punjung
		96	Gembuk

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		97	Ketro
		98	Ketepung
		99	Wonogondo
7	Kecamatan Nawangan	100	Gondang
		101	Mujing
		102	Nawangan
		103	Sempu
		104	Jetis Lor
		105	Tokawi
		106	Penggung
		107	Pakis Baru
		108	Ngromo
8	Kecamatan Bandar	109	Petrungsinarang
		110	Ngunut
		111	Bandar
		112	Kledung
		113	Tumpuk
		114	Watupatok
		115	Bangunsari
		116	Jeruk
9	Kecamatan Tegalombo	117	Kebondalem
		118	Gedangan
		119	Ngreco
		120	Kasihani
		121	Pucangombo
		122	Gemaharjo
		123	Ploso
		124	Tegalombo
		125	Kemuning
		126	Tahunan
		127	Tahunan Baru
10	Kecamatan Tulakan	128	Jetak
		129	Nglaran
		130	Wonoanti
		131	Padi
		132	Kluwih
		133	Bungur
		134	Tulakan
		135	Jatigunung
		136	Gasang
		137	Kalikuning
		138	Ngile
		139	Bubakan
		140	Losari

No	Kecamatan	No	Desa/ Kelurahan
		141	Ngumbul
		142	Wonosidi
		143	Ketrowonojoyo
		144	Ketroharjo
11	Kecamatan Ngadirojo	145	Sidomulyo
		146	Hadiwarno
		147	Hadiluwih
		148	Tanjungpuro
		149	Pagerejo
		150	Wiyoro
		151	Ngadirojo
		152	Cokrokembang
		153	Bodag
		154	Tanjung lor
		155	Nogosari
		156	Cangkring
		157	Bogoharjo
		158	Wonodadi Wetan
		159	Wonodadi Kulon
		160	Wonokarto
		161	Wonosobo
		162	Wonoasri
12	Kecamatan Sudimoro	163	Pager Kidul
		164	Pager Lor
		165	Sukorejo
		166	Sudimoro
		167	Ketanggung
		168	Klepu
		169	Sumber Rejo
		170	Gunung Rejo
		171	Karang Mulyo
		172	Sembowo

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah

Kinerja Pemerintah sangat dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia Pegawainya sehingga manajemen kepegawaian sangat penting dan serius ditangani supaya menciptakan pegawai yang berkualitas dan profesional. Sedangkan sesuai dengan data kepegawaian yang ada di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pacitan dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.5
Daftar Perangkat Daerah dan Pegawai
per 31 Desember 2023

No	Instansi	JML
1	Sekretariat Daerah	98
2	Sekretariat DPRD	34
3	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	29
4	Inspektorat Daerah	43
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	48
7	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	26
8	BPBD	12
9	Dinas Pendidikan	4390
	Dinas Pendidikan	104
	UPT TKSD + Guru DPK	337
	Guru SMP + Staf TU	1020
	Guru SD + Penjaga	2929
10	Dinas Kesehatan	922
	Dinas Kesehatan	52
	UPT Puskesmas	857
	UPT Dinas Gudang Farmasi Kesehatan	6
	UPT Dinas Laboratorium Kesehatan	7
11	Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga	25
12	Dinas Perikanan	21
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perindustrian	21
14	Dinas Lingkungan Hidup	54
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	20
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	54
17	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	138
18	Dinas Perhubungan	32
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20

No	Instansi	JML
21	Dinas Sosial	24
22	RSUD	325
23	Satpol PP	40
24	Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja	53
25	Dinas PPKB dan PPPA	13
26	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
27	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	22
28	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	22
29	Kecamatan	191
30	Kecamatan Arjosari	18
31	Kecamatan Bandar	15
32	Kecamatan Donorojo	15
33	Kecamatan Kebonagung	16
34	Kecamatan Nawangan	15
35	Kecamatan Ngadirojo	18
36	Kecamatan Pacitan	18
37	Kecamatan Pringkuku	15
38	Kecamatan Punung	17
39	Kecamatan Sudimoro	12
40	Kecamatan Tulakan	19
41	Kecamatan Tegalombo	13
42	Kelurahan	26
43	Kelurahan Baleharjo	6
44	Kelurahan Pacitan	4
45	Kelurahan Ploso	6
46	Kelurahan Pucangsewu	5
47	Kelurahahan Sidaharjo	5
JUMLAH		6777

Sesuai dengan data dinding pegawai Kabupaten Pacitan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 jumlah keseluruhan pegawai sejumlah 6.777 orang, tersebar disemua Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung dan pelaksanaan urusan pemerintah yang dikerjakan oleh Pemerintah Daerah.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 134 tahun 2022 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

Maka secara umum mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sampai akhir Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2023 secara lengkap sebagai berikut :

Tabel. 1.6
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggggaran 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
A	PENDAPATAN DAERAH	1.700.994.110.150,00	1.709.217.290.187,05	100,48
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.621.041.383,00	213.300.057.345,05	104,75
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.495.573.068.767,00	1.494.335.232.842,00	99,92
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.800.000.000,00	1.582.000.000,00	87,89
B	BELANJA DAERAH	1.876.221.394.862,00	1.770.419.987.585,24	94,36
1	BELANJA OPERASI	1.297.935.972.080,00	1.223.946.365.268,00	94,30
2	BELANJA MODAL	270.453.134.956,00	244.106.641.999,56	90,26
3	BELANJA TIDAK	10.859.298.499,00	6.648.865.690,68	61,23

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
	TERDUGA			
4	BELANJA TRANSFER	296.972.989.327,00	295.718.114.627,00	99,58
	<u>Jumlah Belanja</u>	1.876.221.394.862,00	1.770.419.987.585,24	94,36
	<u>SURPLUS/(DEFISIT)</u>	(175.227.284.712,00)	(61.202.697.398,19)	34,93
C	PEMBIAYAAN DAERAH	175.227.284.712,00	177.711.543.499,95	101,42
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	175.227.284.712,00	177.711.543.499,95	101,42
	<u>PEMBIAYAAN NETTO</u>	175.227.284.712,00	177.711.543.499,95	101,42
	<u>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</u>	0,00	116.508.846.101,76	

Keterangan: - Data sebelum audit BPK

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah
A. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation” antara kinerja pembangunan Kabupaten Pacitan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dilakukan. Guna membantu memastikan visi dan misi kepala daerah telah dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi Kabupaten Pacitan.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan tujuan pembangunan lima tahunan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum daerah dan sumber informasi lainnya yang relevan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Selain itu isu strategis juga disesuaikan dengan upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Adapun Isu strategis di Kabupaten Pacitan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: Isu strategis pembangunan Kabupaten Pacitan selaras dan mendukung dengan Prioritas Pembangunan

Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Isu strategis Kabupaten Pacitan yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 tersebut, untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan Pembangunan Insfrastuktur Strategis Pengungkit Ekonomi Kabupaten Pacitan

Penyediaan infrastruktur penunjang seperti jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, bandara dan pelabuhan menjadi aspek yang penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, selain itu infrastruktur teknologi melalui pemerataan internet juga menjadi daya dorong yang sangat penting, dengan semakin mudahnya akses transportasi dan komunikasi dapat memudahkan aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Tercatat bahwa persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah sebesar 66,78% dari target akhir 2021 mencapai 65,93% sedangkan untuk jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2020 adalah 93,54 dengan target akhir adalah 93,63%. Infrastruktur tidak hanya dituntut untuk terpenuhi saja tetapi bagaimana konektivitasnya bisa terjamin dalam rangka menggerakkan ekonomi berbasis potensi unggulan khususnya disektor pariwisata dan pertanian. Dalam pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kemanfaatan, kemudahan, dan konektivitas pelayanan publik bagi masyarakat. Dengan demikian akan tercipta kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Selain itu Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah maka Pemerintah Kabupaten Pacitan perlu menangkap peluang dan banyaknya proyek strategis nasional yang direncanakan di Kabupaten Pacitan.

2. Pentingnya Pemenuhan Infrastruktur Dasar Dan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana

Kabupaten Pacitan sebagai kawasan pesisir dan rawan longsor, maka dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah dan sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan mutlak harus dijadikan dasar dalam tata kelola mitigasi bencana. Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Pendidikan Mitigasi Bencana (Bencana Alam, Non-Alam dan wabah) harus dilakukan secara berkala serta menghidupkan kembali SISKLAMING dan Perondaan di lingkungan RT. Selain itu upaya penanggulangan bencana atau kesiapsiagaan berbasis komunitas juga menjadi alternatif strategi dalam rangka mewujudkan ketahanan daerah yang diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana penunjang.

3. Urgensi Penguatan Ekonomi Sektor Unggulan Sebagai Magnet Investasi Untuk Menyerap Tenaga Kerja Dan Peningkatan PAD

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata memiliki proporsi sebesar 10,87% yang artinya dengan angka tersebut maka perlu adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu bentuk kemandirian daerah agar tidak berketergantungan pada pemerintah pusat. Solusi yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan PAD adalah dengan mengupayakan peningkatan sektor unggulan .

Dalam hal ini Kabupaten Pacitan memiliki potensi di bidang Pariwisata. Pemerintah dapat mengoptimalkan potensi pariwisata dengan pendekatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu potensi pertanian juga menjadi aspek yang cukup penting yang bisa dikembangkan melalui pertanian berbasis kawasan agar masyarakat petani dapat terlibat secara langsung dalam menentukan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan masyarakat petani yang mempunyai potensi untuk dikerjasamakan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kebutuhan produksi pertanian masyarakat. Kemudian juga perlu didukung oleh kemudahan dan peluang investasi bagi investor dalam rangka pemenuhan fasilitas pendukung serta pembangunan pada kawasan wisata dan pertanian. Dengan demikian maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi dan pajak daerah.

4. Pentingnya Penguatan Kapasitas Petani, Nelayan Dan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata Dalam Menyongsong Industri 4.0

Perkembangan teknologi menuntut segala aspek kehidupan untuk berkembang lebih cepat dengan menyesuaikan perkembangan jaman, sektor pertanian, perikanan dan pariwisata di Kabupaten Pacitan juga diharapkan dapat bersaing dalam kemajuan penggunaan teknologi, penguatan kapasitas petani dan nelayan perlu di tingkatkan guna meningkatkan efektifitas produksi pertanian. Pertumbuhan produktivitas padi dan bahan utama sektor lainnya tercatat memiliki tren yang meningkat namun belum signifikan yakni meningkat sebesar 0,35

KW/HA, sektor perikanan kelompok nelayan memiliki fluktuasi pada nilai produksinya, tercatat pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun meningkat pada tahun 2020. Wisatawan baik lokal maupun manca negara rata-rata memiliki pengetahuan yang cukup

dinamis terkait kemajuan teknologi sehingga pelaku usaha pada sektor pariwisata juga dituntut agar dapat menyesuaikan kapasitasnya guna menyongsong industri 4.0 yakni kombinasi antara mekanisme mesin, kecerdasan buatan dan konektivitas internet. Oleh karena itu dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi maka perlu adanya peningkatan kualitas SDM yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Kebijakan ini juga dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, dimana untuk Kabupaten Pacitan termasuk dalam skema percepatan pembangunan kawasan Selingkar Wilis dan Lintas selatan dengan fokus pada pengembangan produk unggulan pertanian berupa kopi, kakao, dan biofarmaka.

5. Tuntutan Terciptanya Kondusif Lingkungan Yang Aman Dan Tertib

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat merupakan salah satu urusan yang memiliki peran strategis dalam rangka mewujudkan rasa aman guna menunjang efektifitas pelaksanaan pemerintah dan pembangunan Kabupaten Pacitan. Untuk mewujudkan situasi kondisi masyarakat dengan tertib dan tentram dibutuhkan aturan hukum, guna menumbuhkembangkan sikap disiplin dalam berperilaku bagi setiap orang atau kelompok masyarakat, berbudi pekerti luhur, taat hukum, kesusilaan dan keagamaan sehingga terwujud harmonisasi sosial. Dalam rangka menjamin dan memberikan rasa aman bagi masyarakat maka perlu didukung sumber daya aparatur yang berkualitas dan kapabel demi tercapainya stabilitas dalam menjalankan pemerintahan daerah.

6. Tuntutan Pemenuhan Kualitas Pelayanan Pendidikan

Permasalahan utama dan tantangan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pacitan adalah pemerataan standart pendidikan, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang tercukupi dengan luas area yang cukup besar dan kontur geografis yang bermacam-macam. Dalam rangka menjamin pemerataan dan aksesibilitas layanan pendidikan perlu upaya pemerintah antara lain, melalui jalur afirmasi bagi siswa tidak mampu, memberikan beasiswa bagi siswa

berpotensi dan siswa dari keluarga kurang sejahtera serta memperluas cakupan pendidikan kesetaraan bagi masyarakat yang belum sekolah. Selain itu juga diperlukan adanya peningkatan kualitas bagi tenaga pendidik dan kemudahan aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat serta peningkatan sarana dan prasana pendidikan melalui standarisasi akreditasi serta mengembangkan sistem layanan dan pembelajaran berbasis digital.

7. Belum Optimalnya Penguatan Pendidikan Karakter Dengan Integritas Pendidikan Formal Dan Kebangsaan

Pendidikan karakter menjadi salah satu isu besar aspek pendidikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, hal ini menyusul adanya dampak globalisasi yang mulai mengikis budaya dan karakter bangsa, terfokusnya pendidikan pada bidang ilmu pengetahuan berdampak pada terkesampingnya nilai-nilai karakter sehingga generasi muda cenderung kurang memperhatikan norma sosial, budaya dan agama. Oleh karenanya pendidikan karakter harus tetap di tekankan agar dapat menciptakan generasi yang berwawasan tinggi melalui pendidikan formal serta berbudi luhur melalui pendidikan karakter.

8. Tuntutan Peningkatan Standart Kualitas Layanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan dapat dilihat dari rasio puskesmas dan pustu persatuan penduduk serta rasio rumah sakit per satuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir yang belum menunjukkan peningkatan, sedangkan untuk Rumah sakit di Kabupaten Pacitan masih berada pada tipe C. Peningkatan akses layanan dan mutu kesehatan kepada seluruh masyarakat Pacitan sangat penting untuk menjamin kualitas Kesehatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Oleh karena itu keikutsertaan dalam Jaminan Kesehatan harus ditingkatkan. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan layanan berbasis digital dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, peningkatan kualitas sarana kesehatan baik dari level rumah sakit, puskesmas, pustu dan posyandu. Disisi yang lain kesehatan ibu dan anak perlu mendapatkan perhatian diantaranya melalui pemenuhan gizi dan pemantauan tumbuh kembang anak dan terus mengkampanyekan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Jaminan Sosial Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Kemiskinan masih menjadi isu yang cukup menarik di Kabupaten Pacitan dimana pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 angka kemiskinan Kabupaten Pacitan 14,54% berada diatas angka kemiskinan Jawa Timur sebesar 11,09% angka tersebut ditunjang oleh tingginya jumlah PPKS. Solusi pada permasalahan kemiskinan adalah memberi bantuan sosial dalam bentuk kebutuhan pangan, sandang dan papan. Selain itu harus di dukung oleh validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pemerintah daerah secara bertahap.

10. Keberpihakan Pada Keberdayaan Dan Perlindungan Pada Perempuan, Anak Serta Penyandang Disabilitas

Perlindungan pada perempuan dan anak atas kasus kekerasan dan pernikahan dini dijadikan perhatian oleh pemerintah Kabupaten Pacitan. Rasio KDRT di Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020. Sehingga diperlukan upaya peningkatan advokasi dan pengarusutamaan gender dan anak. Keberpihakan pada disabilitas dan perempuan dalam rangka keberdayaan secara sosial dan ekonomi dilakukan dengan pendekatan pembangunan berbasis pemberdayaan yang berkelanjutan.

11. Urgensi Akselerasi Inovasi Layanan Publik Dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Hadirnya Pemerintah

Isu Pelayanan akan tetap ada dan akan terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi yang berkembang. Upaya untuk menjawab hal tersebut adalah peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi-inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah mendekatkan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk mendukung inovasi pelayanan yang dapat menyentuh masyarakat maka pemerintah perlu melakukan breakdown pelayanan di level setidaknya di level desa agar bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemanfaatan media Big Data atau One Data masih menjadi isu yang cukup berkembang di Pemerintahan daerah. Selain itu sistem tatakelola pemerintahan di Kabupaten Pacitan juga masih perlu mendapatkan perhatian. Indeks reformasi birokrasi menjadi cerminan kualitas pelayanan publik dan profesionalitas kinerja sumberdaya aparatur dalam rangka

mewujudkan Visi dan Misi kepala daerah. Peningkatan kualitas SDM aparatur menjadi mutlak harus dilakukan agar bisa responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman serta mengarahkan system pemerintahan yang berbasis teknologi (E-Government). Salah satu upaya yang dapat didorong adalah melalui penguatan dan integrasi antar pemerintah utamanya pemerintah desa sebagai lembaga pemerintahan yang memiliki hubungan secara langsung terhadap berbagai permasalahan di masyarakat. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020, mengakibatkan perubahan pada hampir seluruh aspek utamanya aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Perubahan yang terjadi akibat Covid-19 mengakibatkan perlunya penetapan prioritas pembangunan Kabupaten Pacitan tahun 2023.

B. Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 1968 tentang Lambang Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 1995 Kabupaten Pacitan mempunyai semboyan **"TATA PRAMANA HARGENG PRAJA"** yang mengandung makna filosofis tekad pemerintah dan masyarakat Pacitan untuk menciptakan pemerintahan yang arif, bijaksana serta mampu mengayomi dan mewujudkan masyarakat yang Adil, Makmur Tata Tentrem Kerto Raharjo dengan kondisi wilayah berbukit-bukit selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 disebutkan arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Pacitan guna menunjang perwujudan visi dan misi pembangunan Kabupaten Pacitan 20 tahun ke depan. Untuk memudahkan dalam menentukan arah pembangunan dan mampu menjangkau segenap aspek kehidupan, maka arah pembangunan di Kabupaten Pacitan 20 tahun diarahkan melalui strategi Gerakan Membangun Ekonomi Masyarakat (Gerbang Emas) Pacitan.

Adapun Visi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Pacitan adalah "Kabupaten Pacitan yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai Nilai Agama dan Budaya" Keberhasilan pencapaian visi tersebut ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Misi Jangka Panjang

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya;

2. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang didukung oleh Industri Berbasis Pertanian (Agroindustri), Kelautan dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mewujudkan Aktivitas Ekonomi yang Stabil;
4. Mewujudkan Suasana Aman dalam Kehidupan Politik, Hukum, Ekonomi, dan Sosial Budaya;
5. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
6. Mewujudkan Pemerintahan yang Berkualitas, Berlandaskan Prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Guna memberikan arahan pelaksanaan yang lebih jelas perlu ditentukan tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Pacitan 2005-2025 dalam bentuk fokus pembangunan lima tahunan (RPJMD) dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2025. Tahapan atau fokus pembangunan pada setiap periode harus menjadi panduan pokok Kepala Daerah pada periode bersangkutan dalam menyusun RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Adanya fokus pada setiap tahapan tidak berarti diabaikannya pembangunan di bidang lainnya. Hal itu semata-mata menunjukkan penekanan atau prioritas utama pembangunan pada setiap tahapan.

Periode saat ini memasuki pembangunan tahap IV (2021-2026) yaitu Pemantapan Peran Daerah dalam Pembangunan Regional dan Nasional. Sasaran pokok pada tahapan ini adalah mewujudkan peran daerah yang menonjol dalam pembangunan di Jawa Timur dan lingkup Nasional. Khusus dalam konteks regional Jawa Timur, hal yang akan diwujudkan adalah mendayagunakan seluruh Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan yang telah terbangun, khususnya di bidang pertanian, kelautan dan pariwisata, sehingga menjadi kabupaten berbasis industri pertanian, kelautan dan pariwisata yang paling diperhitungkan. Segenap pencapaian yang diraih pada tahapan sebelumnya menjadi pijakan yang di gunakan semaksimal mungkin untuk menjadi Kabupaten yang Mandiri, Berdaya Saing, Aman, Sejahtera yang Menjunjung Nilai-nilai Agama dan Budaya

Sejalan dengan arah pembangunan Lima Tahunan Tahap 4 maka ditetapkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Visi pembangunan daerah adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin

dicapai dalam masa jabatan lima tahun. Berdasarkan pada kondisi daerah, potensi permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah serta mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, maka ditetapkan visi Kabupaten Pacitan periode 2021 – 2026. Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021 – 2026 adalah “MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA”.

Apabila dijabarkan visi “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” bermakna bahwa visi pembangunan dalam periode 2021-2026 bertujuan mewujudkan masyarakat Pacitan yang sejahtera tidak hanya dari sisi ekonomi, namun juga sisi lainnya yaitu kualitas masyarakat yang meningkat dan nantinya akan berujung pada terwujudnya kebahagiaan masyarakat Pacitan lahir dan batin.

Misi pembangunan Kabupaten Pacitan 2021-2026 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional, dan Melayani.

Empat butir misi di atas didasarkan kepada kebutuhan pembangunan yang telah ditemakan dalam bentuk Visi pembangunan daerah. Dalam upaya penyamaan persepsi terhadap misi tersebut serta mengurangi potensi ambiguitas dalam memahami butir misi, maka berikut adalah gambaran konstruksi dalam pencapaian Visi Pembangunan melalui 4 (empat) misi pembangunan pada RPJMD Kabupaten Pacitan periode tahun 2021-2026:

Gambar 1.1
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026



Berdasarkan gambar di atas, dalam mencapai visi pembangunan “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” maka harus terbangun 2 Pilar Utama yaitu pertumbuhan ekonomi sektor unggulan (misi 3) dan Pembangunan dan peningkatan daya saing SDM (misi 2). Tercapainya 2 Pilar Utama tersebut harus di dukung dengan 2 Pondasi Pembangunan. Pondasi utama adalah terkait dengan misi ke 1 yaitu Pemerataan Pembangunan Infrastuktur. Setelah itu sebagai pondasi utama adalah pemerintahan yang inovatif, profesional dan melayani.

Misi kesatu dimaksudkan agar dapat mendorong terlaksananya pembangunan infrastruktur yang proporsional dan tepat sasaran. Meningkatkan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan. Sehingga dampaknya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta membantu mempermudah masyarakat dalam mencukupi kebutuhan dasar. Selain itu, dengan Misi ini diharapkan pembangunan yang dilaksanakan tetap memperhatikan kualitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Misi kedua dimaksudkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki pendidikan yang bermutu, dengan derajat kesehatan yang baik yang pada akhirnya dapat menjadi modal pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia dengan tetap berdasar pada nilai-nilai agama dan mengakar kepada jati diri budaya bangsa.

Misi ketiga dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan

produktivitas bidang pertanian, peternakan, perikanan, optimalisasi potensi pariwisata, serta pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai sektor unggulan yang didukung dengan kebijakan ekonomi pada sektor-sektor lain.

Misi keempat dimaksudkan agar birokrasi mampu berperan dalam menjalankan program dan kegiatan yang mendukung misi secara profesional, mampu memecahkan permasalahan secara inovatif, serta mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Misi ini juga dimaksudkan agar proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan terwujud dengan adanya sinergi antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa.

Apabila keempat misi tersebut dapat diwujudkan, maka visi pembangunan Kabupaten Pacitan "Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia" dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan akan tercapai dengan indikator kinerja yang dibagi menjadi 5 (lima) aspek yaitu Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Urusan Pilihan, Aspek Daya Saing Daerah, Aspek Urusan Penunjang.

Keberhasilan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik diukur dari indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah. Kemampuan pengukuran kinerja tersebut diantaranya sangat bergantung kepada data dan informasi yang mengolah hasil-hasil atau kinerja pembangunan sehingga dapat diperbandingkan antara target yang diinginkan dengan hasil atau realisasi yang dicapai. Sedangkan tolok ukur yang digunakan adalah :

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
3. Angka Kemiskinan
4. Pertumbuhan Ekonomi
5. Indeks Reformasi Birokrasi

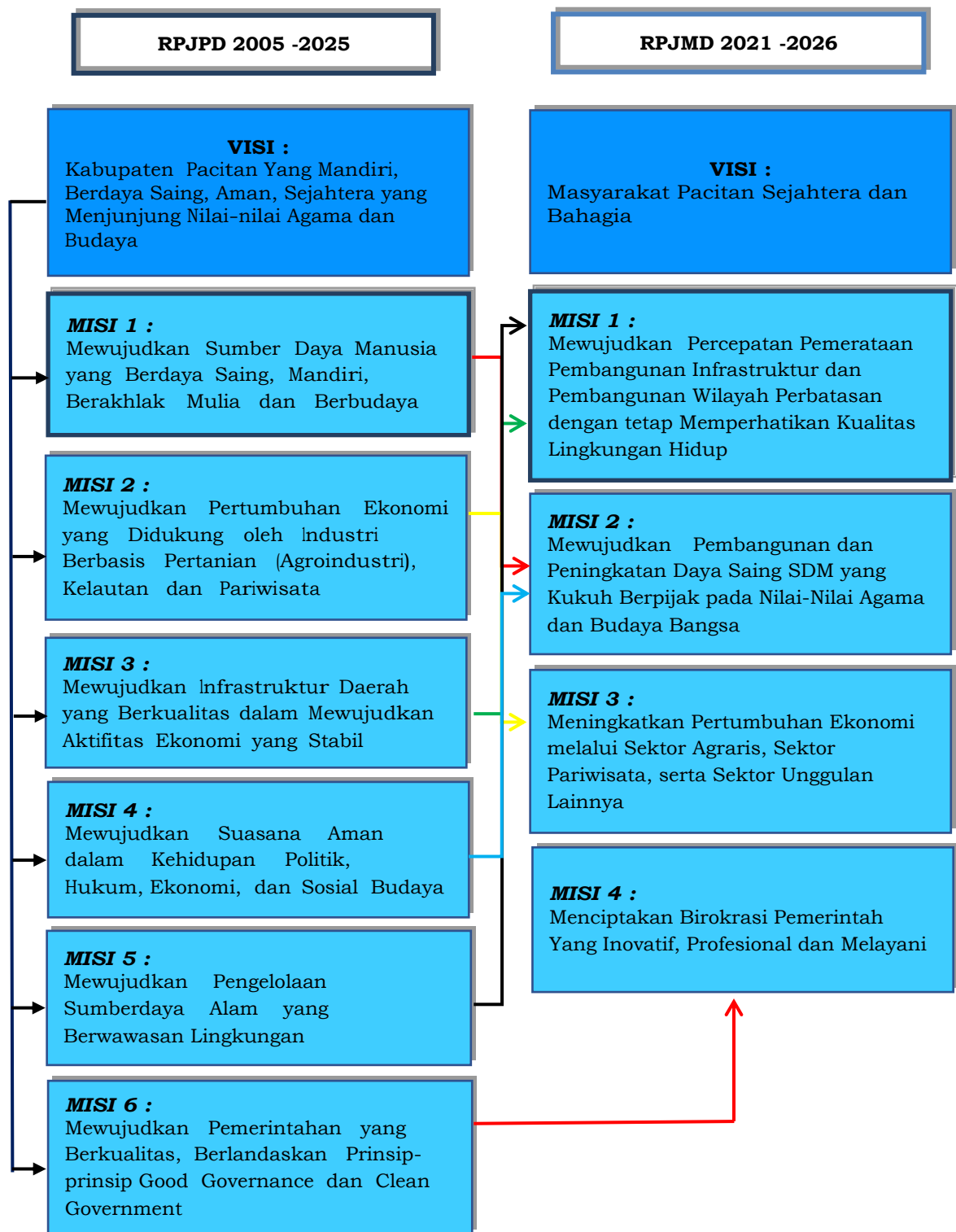
Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Pacitan terdiri dari:

1. PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
2. PDRB Perdagangan Besar dan Eceran
3. PDRB Industri Pengolahan
4. Pengeluaran Perkapita
5. Pendapatan Perkapita
6. Indeks Gini
7. Persentase Pertumbuhan PAD
8. Indeks Pendidikan
9. Indeks Kesehatan
10. Indeks Infrastruktur

11. Indeks Kebahagiaan
12. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
13. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
14. Persentase Desa Mandiri
15. Indeks Daya Saing Pariwisata
16. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
17. Nilai Sakip
18. Opini BPK
19. Maturitas SPIP
20. Indeks Profesionalitas Aparatur
21. Indeks SPBE
22. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Gambaran keselarasan RPJMD 2021-2026 dengan RPJPD 2005-2025 sebagaimana gambar 1.2 berikut.

Gambar 1.2
Keterkaitan Visi Misi RPJPD dan Visi Misi RPJMD



Keterkaitan Visi Misi RPJPD dan Visi Misi RPJMD dijelaskan berdasarkan Gambar 1.2 sebagaimana contoh salah satunya Misi I “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Mandiri, Berakhlak Mulia dan Berbudaya” pada RPJPD 2005-2025 berkaitan dengan Misi II ‘Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa’ pada RPJMD 2021-2026 dan selanjutnya Misi II s/d Misi VI pada RPJPD 2005-2025 saling berkaitan dengan Misi I

s/d Misi IV RPJMD 2021-2026 sebagaimana Gambar 1.2.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi I yakni “Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup”, maka tujuan pembangunan adalah “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan, Dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif Dan Adil” dengan sasaran:

- a. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas.
- b. Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi II yakni “Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa”, maka tujuan dan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Tujuan meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang berbudaya dan Bahagia, dengan sasaran :
 1. Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan.
 2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.
 3. Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat.
 4. Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan.
 5. Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat.
- b. Tujuan meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pengentasan Kemiskinan, dengan sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi III yakni “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya”, maka tujuan yang ditetapkan adalah “Meningkatkan Daya Saing Perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan” dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan.
3. Meningkatnya daya Saing Pariwisata
4. Meningkatnya Nilai Investasi.

Sebagai upaya untuk mencapai Misi IV yakni Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani”, maka tujuan yang ditetapkan adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Inovatif, Profesional Dan Responsif” dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif
2. Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah
3. Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan
4. Meningkatnya Kemandirian Desa

C. Program Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Pacitan 2021-2026

Dalam visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, terdapat Program Prioritas Pembangunan Daerah yang dirumuskan dan ditetapkan menjadi program unggulan pembangunan daerah dengan mencermati, menganalisis dan memperhatikan kaidah-kaidah teknokratik dan aturan penyusunan RPJMD.

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Pacitan “Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia”. Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Pacitan 2021-2026 terdapat beberapa kebijakan dan program unggulan. Kebijakan dan program unggulan tersebut merupakan program yang berdaya ungkit dan diharapkan mampu memberi dampak yang besar dan luas bagi pembangunan Kabupaten Pacitan. Program unggulan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh program-program pembangunan yang lain. Kebijakan dan program unggulan yang dimaksud, yaitu :

1. Misi Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan, Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Penyelenggaraan Jalan.
2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.
3. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
6. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7. Program Pengelolaan Persampahan
8. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
9. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)
10. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

2. Misi Mewujudkan Pembangunan Dan Peningkatan Daya Saing Sdm Yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama Dan Budaya Bangsa.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Program Pengembangan Kebudayaan
4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
7. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
8. Program Pemberdayaan Sosial
9. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3. Misi Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Dari Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Pengembangan UMKM
2. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)
3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
4. Program Promosi Penanaman Modal
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
6. Program Pelayanan Penanaman Modal
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
8. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
9. Program Pemasaran Pariwisata
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
12. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
14. Program Penyuluhan Pertanian
15. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
16. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
17. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

4. Misi Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani.

Adapun Program Prioritas adalah :

1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Pengawasan
6. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
7. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
9. Program Kepegawaian Daerah
10. Program Penataan Desa
11. Program Peningkatan Kerjasama Desa
12. Program Administrasi Pemerintahan Desa
13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
14. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
15. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

D. Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2023

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 - 2026, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah hingga kegiatan prioritas pembangunan daerah. Adapun kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.7

Kegiatan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan RKPD Tahun 2023

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
1.	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	Pengembang an Kawasan Ekonomi Strategis, Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Inklusif	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
			Penguatan Keberdayaan Kelompok Tani, Nelayan, Dan Pelaku Usaha Wisata	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragam an Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
				Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIA N
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Usaha Mikro	
				Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
				Program Pengembang an Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
						Peningkatan Peran Serta	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
				Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERA
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan antar Kerja	DINAS PERDAGANGAN DAN TENAGA KERA
			Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Jalan Poros Desa	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
2.	Mengembangk an wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah, Kualitas Jalan Poros Desa, dan Pembanguna n Berkelanjutan	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	
						Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	
					Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	
						Operasi dan Pemeliharaan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Jaringan Irigasi Permukaan	
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	
				Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
						Survey Kondisi Jalan/Jembatan	
						Pembangunan Jalan	
						Rehabilitasi Jalan	
						Pemeliharaan Berkala Jalan	
						Pemeliharaan Rutin Jalan	
						Pembangunan Jembatan	
						Rehabilitasi Jembatan	
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	RUANG
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
				Program Pengelolaan	Pengelolaan SDA dan Bangunan	Penyusunan Rencana Teknis	DINAS PEKERJAAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
				Sumber Daya Air (SDA)	Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerja an serta Pengentasan Kemiskinan	Penguatan Kualitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkarakter Dan Kesehatan Yang Modern	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	
						Pembangunan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	
						Penyelenggaraan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	
						Rehabilitasi	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Nonformal/Kesetaraan	
				Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas	DINAS KESEHATAN
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Puskesmas	
						Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Pengadaan Obat, Vaksin	
						Pengadaan Bahan Habis Pakai	
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
						Distribusi Alat Kesehatan, Obat,	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	
						Pengelolaan Pelayanan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Kesehatan Balita	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						dan Olahraga	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	
						Pengelolaan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Jaminan Kesehatan Masyarakat	
						Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
						Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	
						Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	
					Penyelenggaraan	Pengelolaan Data	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	dan Informasi Kesehatan	
						Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	DINAS KESEHATAN
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
					Tangga	Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	
4.	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta	Penguatan Kualitas Pemerataan Layanan Pendidikan Berkarakter Dan Kesehatan Yang Modern	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
		Pengentasan Kemiskinan					
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	DINAS PENDIDIKAN
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DINAS PENDIDIKAN
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	DINAS PENDIDIKAN
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	DINAS PENDIDIKAN
						Pembangunan Sarana, Prasarana	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						dan Utilitas Sekolah	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Perlengkapan Belajar Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	DINAS PENDIDIKAN
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	DINAS PENDIDIKAN
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Rehabilitasi	DINAS

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	PENDIDIKAN
						Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	DINAS PENDIDIKAN
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetara an	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetara an	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	DINAS PENDIDIKAN
						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Nonformal/Kesetaraan	
				Program Pengembangan Kurikulum	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	DINAS PENDIDIKAN
				Program Pengembangan Budaya	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	DISPARBUDPO RA
5	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung	Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan	Pengembangan Pasar UMKM Produk-	Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	Sumber Daya Energi	produk Unggulan	Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		PERINDUSTRIAN
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
				Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Desain dan Teknologi	
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Kualitas Jalan Poros Desa;	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
							PENATAAN RUANG
						Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Operasi dan Pemeliharaan Sungai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
				Drainase	Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		
						Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
						Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh)	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Ha	
7	Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	Inisiasi Awal Upaya Realisasi Mall Pelayanan Publik	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
				Program peningkatan	Penanganan Gangguan	Pencegahan Gangguan	SATUAN POLISI PAMONG

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
				ketenteraman dan ketertiban umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	PRAJA
						Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan	

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Massa	
			Jaminan Kemudahan Izin Usaha dan Investasi Produktif	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIA N
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
				Program Pelayanan	Pelayanan Perizinan dan Non	Penyediaan Pelayanan Terpadu	DINAS PENANAMAN

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
				Penanaman Modal	Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
						Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

N O	PRIORITAS PEMBANGUN AN NASIONAL	PRIORITAS PROVINSI JAWA TIMUR	PRIORITAS KAB. PACITAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SKPD
						Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka pemerintah Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Gambaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 dilihat dengan perencanaan pembangunan yang memprioritaskan penanganan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tersebut dibawah ini :

A. Dasar Pertimbangan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar Pertimbangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

B. Dasar Hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Dasar penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Pacitan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 2) Permedagri Nomor 59 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- 3) Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah.
- 4) Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 5) Permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Kesehatan.
- 6) Permendikbud Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
- 7) Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45 / / KPTS / 408.12/2023 tentang Pembentukan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Pacitan.

C. Kebijakan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026., kebijakan dan program diarahkan untuk pencapaian Visi Kabupaten Pacitan. Terdapat beberapa program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pencapaian Standar Pelayanan Minimal untuk beberapa jenis layanan dasar, sedangkan program yang tidak terkait langsung merupakan urusan pilihan dan potensial dikembangkan di Kabupaten Pacitan.

Adapun program – program dan kegiatan yang diarahkan baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk pencapaian target SPM tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.8
Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
Bidang Pendidikan Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengeloaan Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2	Program Pengembangan Kurikulum	1. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
4	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	

Tabel 1.9
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Kesehatan Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan

Tabel 1.10
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pacitan
2	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

Tabel 1.11
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Pengembangan perumahan	1. Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pacitan

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
		Relokasi Program Kabupaten/Kota	

Tabel 1.12
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM
 Bidang Ketrentaman dan Ketertiban Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Satuan Polisi Pamong Praja dan BPBD Kabupaten Pacitan
2	Program Penanggulangan Bencana (Kebencanaan)	1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	1. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
		2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

Tabel 1.13
 Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pacitan Pendukung SPM Bidang Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM DALAM RPJMD	KEGIATAN	PELAKSANA PROGRAM
1	Program Rehabilitasi Sosial	1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Dinas Sosial Kabupaten Pacitan
2	Program Penanganan Bencana	1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

Program dan kegiatan lain, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pacitan bersifat mendukung pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada masing-masing bidang.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro adalah gambaran secara umum keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi masyarakat. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program baik pemerintah pusat, propinsi maupun kabupaten pihak swasta dan pihak terkait dalam pembangunan nasional. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Pacitan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur sebagai parameter keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Penduduk, Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, dan Pendapatan per Kapita. Indikator tersebut adalah dampak (*Impact*) dari pelaksanaan program/kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional sehingga diperlukan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pihak Swasta dan Pihak terkait dalam pembangunan nasional.

Dalam satu tahun penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja makro pemerintah daerah dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 2.1

Indikator kinerja makro Kabupaten Pacitan tahun 2022 – 2023

NO	URAIAN	TAHUN		
		2022	2023	Kenaikan/ Penurunan
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,19	70,94	0,75
2	Angka Kemiskinan (%)	13,80	13,65	-0,15 %
3	Angka Pengangguran (%)	3,65	1,81	-1,84 %
4	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,54	4,46	-1,08 %
5	Pendapatan per kapita (juta rupiah)	30,336	33,149	2,813
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,338	0,352	0,0132

Ket : * angka perbaikan
** angka sementara

Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2023 sebesar 70,94 mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin dibanding dengan capaian tahun 2022 sebesar 70,19.

Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2022 sejumlah 13,80 % dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2023 mencapai 13,65 % atau mengalami penurunan sebesar 0,15 %. Penurunan tersebut akibat adanya upaya pemulihan ekonomi masyarakat secara masif dampak pandemi covid-19 yang membuat perekonomian nasional merangkak meningkat stabil.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Pacitan tahun 2022 mencapai 3,65 % dan sedangkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2023 sebesar 1,81 % atau mengalami penurunan 1,84 %.

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,54 %. dan Sedangkan Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sebesar 4,46 atau mengalami penurunan sebesar 1,08 %. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan PDRB Tahun 2022 ke 2023 melambat dibandingkan dengan kenaikan PDRB Tahun 2021 ke 2022, karena pada tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Pacitan adalah Rp. 30.336.000 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp. 33.149.000 atau mengalami peningkatan sebesar Rp.2.813.000.

Nilai ketimpangan pendapatan (gini ratio) pada tahun 2022 sebesar 0,338 % , mengalami kenaikan sebesar 0,014 pada tahun 2023 menjadi 0,352 %. Hal ini dikarenakan pasca Covid-19 perilaku ekonomi masyarakat belum sepenuhnya stabil. Pendapatan dan pengeluaran cenderung fluktuatif dan sangat beragam. Kondisi ini berdampak pada melebarnya rentang pengeluaran masyarakat.

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Dalam rangka peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat merupakan tujuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui adanya tugas pembantuan dan pemberian otonomi secara luas. Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,

keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional dan kemudian pemerintah nasional membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta diberikan otonomi yang seluas -luasnya. Pemberian otonomi secara luas serta adanya tugas pembantuan, memberikan konsekuensi bagi daerah untuk mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pemberian otonomi yang seluas - luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman. Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2016. Selanjutnya pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPD) kepada masyarakat.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi

antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada NSPK yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.

Adapun dalam rangka pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah tersebut, secara teknis penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat, masih berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat. Sesuai Peraturan Pemerintah tersebut, format laporan Kepala Daerah disusun berdasarkan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya, sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didasarkan pada urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang diklasifikasikan menjadi Urusan Wajib Pelayanan Dasar sebanyak 6, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebanyak 18, Urusan Pilihan sebanyak 6 dan Urusan Penunjang Pemerintahan sebanyak 5.

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2023 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Keluaran setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci keluaran setiap urusan yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Keluaran

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	2	1. Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	710 Unit	
			3	2. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	1250 Orang	
			4	3. Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	1868 Orang	
			5	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	1399 Orang	
			6	5. Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	1204 Orang	
			7	6. Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak	Sebanyak	300 orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini			
			8	7. Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non-formal dari lembaga pemerintah	Sebanyak	265 Orang	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar					
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	11	1. Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	Sebanyak	485 Unit	
			12	2. Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	150 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			13	3. Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	Sebanyak	300 Orang	
			14	4. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	20.515 Orang	
			15	5. Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	8.152 Orang	
			16	6. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	3.469 Orang	
			17	7. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	1.458 Orang	
			18	8. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	3.504 Orang	
			19	9. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	1.153 Orang	
			20	10. Jumlah kebutuhan	Sebanyak	836 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar			
			21	11. Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	144 Orang	
			22	12. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	Sebanyak	861 Orang	
			23	13. Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	Sebanyak	422 Orang	
			24	14. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak	3.421 Orang	
			25	15. Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Sebanyak	1100 Orang	
			26	16. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat	Sebanyak	411 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah			
			27	17. Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	Sebanyak	64 Orang	
			28	18. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak	518 Orang	
			29	19. Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	Sebanyak	389 Orang	
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	31	1. Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	18 Unit	
			32	2. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari	Sebanyak	20 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pemerintah Daerah			
			33	3. Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	Sebanyak	959 Orang	
			34	4. Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	454 Orang	
			35	5. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	Sebanyak	130 Orang	
			36	6. Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	Sebanyak	130 Orang	
			37	7. Jumlah kepala sekolah pada jenjang pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	Sebanyak	411 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				sekolah			
			38	8. Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	Sebanyak	19 Orang	
2	KESEHATAN	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	40	1. Jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	Sebanyak	3 Unit	
		Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	42	1. Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	Sebanyak	3 Unit	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	44	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Tetanus Difetri (Td) 2 . Tablet Tambah Darah 3 . Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah *	5	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Pemeriksaan Glukoprotein Urin 4 . Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu 5 . Buku KIA , dll		
			45	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	Sebanyak	257 Orang	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	47	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	3	
					Dukungan Logistik seperti : 1 . Formulir Fotograf 2 . Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu) 3 . Buku KIA , dll		
			48	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	Sebanyak	341 Orang	
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	50	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak	6	
					Dukungan Logistik seperti : 1 . Vaksin Hepatitis BO 2 . Vitamin K1 Injeksi 3 . Salep/Tetes Mata Antibiotik 4 . Formulir Bayi Baru Lahir , 5. Formulir MTBM		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					6 . Buku KIA , dll		
			51	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	Sebanyak	341 Orang	
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	53	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku 2 . Formulir DDTK 3 . Vitamin A Biru , Vitamin A Merah 4 . Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB -Hib * Campak Rubell , 5. Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB -Hib * Campak Rubella 6 . Jarum Suntik dan BHP, Peralatan Anafilaktik, Buku KIA , dll	6	
			54	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Sebanyak	341 Orang	
		Persentase anak usia	56	1. Jumlah dukungan logistik	Jumlah dukungan logistik	5	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		kesehatan yang tersedia	kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Raport Kesehatanku 2 . Buku Pemantauan Kesehatan 3 . Kuesioner Skrining Kesehatan 4 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah 6 . Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah , dll		
			57	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	Sebanyak	168 Orang	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	59	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter *	2	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM) , DII		
			60	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	704 Orang	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	62	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol 2 . Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G) 3 . Buku Kesehatan Lansia , DII	3	
			63	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	120 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	65	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE 2 . Tensimeter 3 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM , DII	3	
			66	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	704 Orang	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	68	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . * Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet 2 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM 3 . Pedoman dan Media KIE , DII	3	
			69	2. Jumlah SDM kesehatan	Sebanyak	704 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				untuk pelayanan kesehatan sesuai standar			
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	71	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia 2 . Kit Berisi 2 Alat Fiksasi 3 . Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan 4 . Media KIE , DII	4	
			72	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	144 Orang	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	74	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	7	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2 . Reagen Zn TB 3 . Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95 4 . Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering 5 . Catridge Tes Cepat Molekuler 6 . Formulir Pencatatan dan Pelaporan 7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur , DII		
			75	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	704 Orang	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	77	1. Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia sebanyak Dukungan Logistik seperti : 1 . Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner 2 . Tes Cepat HIV (RDT) Pertama 3 . Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab *	4	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK 4 . Lainnya...		
			78	2. Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	Sebanyak	704 Orang	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota					
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	81	1. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	Seluas	1.439,22 Ha	
			82	2. Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang	27.540 Meter	
			83	3. Luas kawasan	Seluas	34,8 Ha	Tidak ada data yang

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)			terkait itu
			84	4. Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	Sepanjang	2.706 Meter	
			85	5. Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			86	6. Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			87	7. Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang diminta adalah : i. Bangunan perkuatan tebing (m) ii. Tanggul sungai (m)	1 Sarpras	Tidak ada data yang terkait itu

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi			iii. Kanal banjir (m) iv. Pintu air/bendung pengendali banjir (Unit) v. Pompa banjir (Unit dan Kapasitas) vi. Polder/Kolam Retensi (Unit) vii. Breakwater (m) viii. Seawall dan Bangunan pengaman pantai lainnya (m)		
			89	1. Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi primer (m)	(283,297 / 542,332) = 52.2368 %	
			90	2. Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi sekunder (m)	(34,692 / 124,803) = 27.7974 %	
			91	3. Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m) ----- X 100% Panjang jaringan irigasi tersier (m)	(48,550.35 / 92,703.05) = 52.3719 %	
		Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	93	1. Pemenuhan dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Adanya dokumen RISPAM Kabupaten/Kota	Ada	
			94	2. Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	Ada	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota	95	3. Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	Sebanyak	1 BUMD/UPTD	
			96	4. Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	Sebanyak	1 Izin	
			97	5. Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.	Sebanyak	0 Kerjasama	Tidak ada data yang terkait itu
		Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99	1. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALDS	Sebanyak	0 Rumah	Tidak ada data yang terkait itu
			100	2. Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	Sebanyak	0 Rumah	Tidak ada data yang terkait itu
			101	3. Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar	Sebanyak	142879 Rumah	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				menggunakan SPALD S dan SPALD T			
			102	4. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	Sebanyak	0 Rumah	Tidak ada data yang terkait itu
			103	5. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan pengolahan lumpur tinja	Sebanyak	0 Rumah	Tidak ada data yang terkait itu
			104	6. Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	Sebanyak	0 Rumah	Tidak ada data yang terkait itu
			105	7. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\sum$ Rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik ----- X 100% $\sum$ Rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
			106	8. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\sum$ rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT ----- X 100% $\sum$ rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					> 25 jiwa/ha		
			107	9. Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD T}} \times 100\%$	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
			108	10. Kinerja penyediaan unit pelayanan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
			109	11. Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
			110	12. Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{Jumlah kapasitas lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota}} \times 100\%$	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
			111	13. Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}} \times 100\%$	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					$\sum$ Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada Kabupaten/Kota		
			112	14. Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\sum$ Jumlah rumah yang tanki septiknya sudah disedot $\text{-----} \times 100\%$ $\sum$ Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD - S	NIHIL	Tidak ada data yang terkait itu
		Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	114	1.Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\sum$ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku $\text{-----} \times 100\%$ $\sum$ Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)	$(68 / 110) = 61.8182 \%$	
			115	2.Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun eksisting	Sebanyak	83 Izin	
			116	3.Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Penetapan peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			117	4.Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim	Penetapan Keputusan (Ada/Tidak)	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Ahli Bangunan/Gedung (Ada/Tidak)			
			118	5.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Sebanyak	0 Bangunan	Tidak ada data yang terkait itu
			119	6.Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	Sebanyak	0 Bangunan	Tidak ada data yang terkait itu
			120	7.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak	70 Bangunan	
			121	8.Jumlah bangunan gedung Negara milik Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipelihara/dirawat	Sebanyak	4 Bangunan	
		Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	123	1. Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kabupaten/Kota	Sepanjang	1.374 KM	
			124	2. Panjang jalan yang dibangun	Sepanjang	19,50 KM	
			125	3. Panjang jembatan yang dibangun	Sepanjang	78 Meter	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			126	4. Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	Sepanjang	19,50 KM	
			127	5. Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	Sepanjang	0 Meter	Tidak ada data yang terkait itu
			128	6. Panjang jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi	Sepanjang	23,28 KM	
			129	7. Panjang jembatan yang direhabilitasi	Sepanjang	12 Meter	
			130	8. Panjang jalan yang dipelihara	Sepanjang	29,5 KM	
			131	9. Panjang jembatan yang dipelihara	Sepanjang	2,5 Meter	Tidak ada data yang terkait itu
		Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	133	1. Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	48 Orang	
			134	2. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	48 Orang	
			135	3. Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	48 Orang	
			136	4. Terselenggaranya Sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang aktif dengan data termutakhir	Ada/Tidak	Ada	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			137	5. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			138	6. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	Ada/Tidak	Ada	
			139	7. Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	Ada/Tidak	Ada	
			140	8. Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	Ada/Tidak	Ada	
			141	9. Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa	Ada/Tidak	Ada	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				konstruksi Kabupaten/Kota			
			142	10. Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	Ada/Tidak	Ada	
			143	11. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Ada/Tidak	Ada	
			144	12. Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			145	13. Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak	Ada	
			146	14. Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Ada/Tidak	Tidak	Tidak ada data yang terkait itu
			147	15. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidak sesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	
			148	16. Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada/Tidak	Tidak	
			149	17. Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi	Ada/Tidak	Tidak	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
			150	18. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	0 Badan Usaha	Tidak ada data yang terkait itu
			151	19. Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	0 Badan Usaha	Tidak ada data yang terkait itu
			152	20. Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	0 Badan Usaha	Tidak ada data yang terkait itu
			153	21. Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	48 Badan Usaha	
			154	22. Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	Sebanyak	0 Izin	Tidak ada data yang terkait itu
			155	23. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/ atau kualifikasi usaha dnegan	Sebanyak	0 Pengawasan	Tidak ada data yang terkait itu

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya			
			156	24. Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak	0 Kecelakaan Konstruksi	Tidak ada data yang terkait itu
			157	25. Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Sebanyak	0 Pengawasan	Tidak ada data yang terkait itu
		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi					
4	PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	160	1. Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	Sebanyak	10 Rumah	Data Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya di Kabupaten Pacitan Tahun 2023

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			161	2. Jumlah rumah yang terkena bencana alam	Sebanyak	10 Rumah	Data jumlah rumah yang terkena bencana alam dan sudah terverifikasi tahun 2023
			162	3. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	Sebanyak	40 Orang	Data Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam dan sudah terverifikasi tahun 2023
			163	4. Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak	10 Rumah	Data jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi tahun 2023
			164	5. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	Sebanyak	0 Rumah	1. Data jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi tahun 2023; 2. Rumah korban bencana tidak dilakukan pembangunan kembali tetapi dilakukan rehabilitasi.
			165	6. Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan	Sebanyak	0 Rumah	1. Data jumlah unit rumah korban bencana yang direlokasi/dibangun



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				rencana aksi			baru sesuai dengan rencana aksi tahun 2023; 2. Rumah korban bencana tidak dilakukan relokasi/pembangunan baru tetapi dilakukan rehabilitasi.
			166	7. Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	Sebanyak	12 Unit	1. Data jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana Tahun 2023; 2. Masing masing Kecamatan sudah lokasi yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana
			167	8. Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	Sebanyak	40 Orang	Data jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi tahun 2023
			168	9. Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	Seluas	0 Ha	Tahun 2023 masih dilakukan inventarisir lokasi untuk pencadangan lahan yang aman dari kejadian bencana

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	170	1. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	1. Data jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM; 2. Bentuk layanan yang diterima adalah penyediaan rumah layak huni, bukan fasilitasi ganti kerugian aset.
			171	2. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Data jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM tahun 2023
			172	3. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Data jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM Tahun 2023 bernilai nol karena



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							bentuk layanan yang diterima adalah penyediaan rumah layak huni
			173	4. Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	1 Rumah Tangga	Data jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM tahun 2023.
			174	5. Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	Sebanyak	0 Rumah Tangga	Data jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM tahun 2023
			175	6. Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	Seluas	0 Ha	Luasan (Ha) Pengadaan Tanah untuk pencadangan lahan kejadian bencana belum dilakukan karena masih proses pendataan lokasi yang aman untuk pencadangan lahan.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani		kawasan permukiman kumuh < 10 Ha			kawasan permukiman kumuh < 10 Ha yang belum ditangani di tahun 2023
			178	2. Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	Sebanyak	2035 Unit	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH yang dilaksanakan tahun 2023
			179	3. Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	Seluas	46.2 Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh yang dilaksanakan pada tahun 2023
		Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	181	1. Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	Sebanyak	165941 Rumah	Data jumlah rumah di Kabupaten Pacitan Tahun 2023
			182	2. Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	Sebanyak	2035 Rumah	Data jumlah Peningkatan Kualitas RTLH yang dilaksanakan tahun 2023
			183	3. Jumlah rumah tidak layak huni	Sebanyak	15866 Rumah	Data Jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) Tahun 2023
			184	4. Jumlah rumah yang tidak dihuni	Sebanyak	133 Rumah	Data jumlah Rumah Yang Tidak Dihuni tahun 2023

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			185	5. Rasio rumah dan KK	Jumlah KK ----- - x 100% Jumlah total unit rumah	(205,000 / 165,941) = 123.5379 %	Rasio Rumah dan KK Tahun 2023
			186	6. Jumlah rumah pembangunan baru	Sebanyak	18 Rumah	Data jumlah rumah pembangunan baru berdasarkan jumlah Pengajuan Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tahun 2023
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	188	1. Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	Sebanyak	5 Perumahan	Data Perumahan yang telah di fasilitasi PSU tahun 2023
			189	2. Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	Sebanyak	117052 Rumah	
			190	3. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	Sebanyak	744 Rumah	Data rumah diperumahan yang terfasilitasi jalan lingkungan tahun 2023
			191	4. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	Sebanyak	143289 Rumah	Jumlah unit rumah diperumahan yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site) pada tahun 2023
			192	5. Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	Sebanyak	5 Perumahan	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH tahun



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2023
			193	6. Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	Sebanyak	744 Rumah	Jumlah unit rumah diperumahan yang terfasilitasi akses PJU tahun 2023
			194	7. Jumlah pengembang yang tersertifikasi	Sebanyak	5 Pengembang	Data pengembang perumahan yang tersertifikasi tahun 2023
			195	8. Jumlah pengembang yang teregistrasi	Sebanyak	5 Pengembang	Jumlah pengembang yang teregistrasi tahun 2023
			196	9. Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	Sebanyak	0 Pengembang	Surat Pernyataan Tidak Ada Pengembang Yang Mendapat Penyuluhan atau Pelatihan tahun 2023
		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	198	1. Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kabupaten/Kota yang ditangani	Sebanyak	220 Pelanggaran dan Pengaduan	
			199	2. Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	Sebanyak	220 Orang	
			200	3. Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	Sebanyak	40 Perda & Perkada	
			201	4. Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Sebanyak	3 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			202	5. Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada Ada Sebanyak 13 SOP	
			203	6. Tersedianya sarana prasarana minimal	Tersedianya sarana prasarana minimal (Dibuat dalam bentuk daftar)	Ada	
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan					
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	206	1. Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan	(1 / 1) = 100 %	
			207	2. Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana ----- x 100% Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	(598,934 / 598,934) = 100 %	
			209	1. Persentase penyelesaian	Kemajuan pekerjaan dokumen yang	(1 / 1) = 100 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		
			210	2. Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun ----- X 100% Jumlah satu dokumen Renkon yang lengkap dan sudah disahkan	(1 / 1) = 100 %	https://bit.ly/RENKON
			211	3. Persentase jumlah aparatur dan warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah aparatur dan warga negara di kawasan rawan bencana	(30 / 30) = 100 %	
			212	4. Persentase warga Negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(183 / 598,934) = 0.0306 %	
			213	5. Persentase warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	(598,934 / 598,934) = 100 %	
			214	6. Persentase warga Negara yang mendapat peralatan	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan peralatan	(71,487 / 598,934) = 11.9357 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				perlindungan	perlindungan ----- X 100% jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	216	1.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status KLB	(1 / 1) = 100 %	
			217	2.Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan status darurat bencana ----- X 100% Jumlah seluruh penetapan status Darurat bencana	(10 / 10) = 100 %	
			218	3.Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana ----- X 100% jumlah petugas dalam penanganan darurat bencana	(42 / 42) = 100 %	
			219	4.Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi ----- X 100% Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	(42 / 42) = 100 %	
		Persentase pelayanan	221	1. Jumlah dan jenis layanan	Sebanyak	2 Layanan	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota			
			222	2. Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada	
			223	3. Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Ada	
			224	4. Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/desa	Sebanyak (Dibuat dalam bentuk daftar)	2 Pos	
			225	5. Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	Sebanyak (Dibuat dalam bentuk daftar)	93 Sarpras	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			226	6. Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemada, sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	Sebanyak	31 Orang	
			227	7. Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	Sebanyak	20 Orang	
			228	8. Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sebanyak	2 Kegiatan	
		Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran					
6	SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	231	1. Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sejumlah	3 Layanan	
			232	2. Jumlah data penyandang penyandang disabilitas	Sebanyak	2331 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM			
			233	3. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	Sebanyak	1 Tim	
			234	4. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Sebanyak	2331 Orang	
			235	5. Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Sebanyak	3 Unit	
			236	6. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Sebanyak	1092 Orang	
			237	7. Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	Sebanyak	19 Unit	
			238	8. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	Sebanyak	0 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan gepeng yang menerima paket sandang			
			239	9. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	Sebanyak	610 Orang	
			240	10. Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Sebanyak	1 Peralatan	
			241	11. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Sebanyak	78 Paket	
			242	12. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Sebanyak	78 Orang	
			243	13. Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	Sebanyak	1 Orang	
			244	14. Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan	Sebanyak	231 Orang	
			245	15. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak	Sebanyak	480 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan social sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial			
			246	16. Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	Sebanyak	5 Kegiatan	
			247	17. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Sebanyak	0 Orang	
			248	18. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Sebanyak	272 Orang	
			249	19. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar	Sebanyak	28 Orang	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan gepeng yang mendapatkan layanan penelurusan keluarga			
			250	20. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Sebanyak	28 Orang	
			251	21. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, abak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	Sebanyak	22 Orang	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	253	1. Jumlah korban bencana yang mendapat makanan	Sebanyak	163 Orang	
			254	2. Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	Sebanyak	0 Orang	
			255	3. Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Sebanyak	12 Penampungan	
			256	4. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	Sebanyak	163 Paket	
			257	5. Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	Sebanyak	163 Paket	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			258	6. Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/ atau relawan sosial yang tersedia	Sebanyak	232 Orang	
7	TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	260	1. Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kabupaten/Kota (Mengidentifikasi/membandingkan kesesuaian dokumen RTK yang telah tersusun dengan peraturan perundangan yang berlaku) Menghitung selisih 6 (enam) indikator ketenagakerjaan dengan cara angka realisasi dikurangi dengan angka target dibagi dengan angka realisasi dikali 100%	Tidak	dokumen RTKD terbaru masih dalam penyusunan
			261	2. Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	realisasi indikator - Target indikator ----- X 100% Realisasi		dokumen RTKD terbaru masih dalam penyusunan
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	262	3. Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di Kabupaten/Kota	Sebanyak	1 Perusahaan	perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja sebanyak 1 perusahaan
			264	1. Persentase penerapan program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK Kualifikasi KKNi atau okupasi pada tahun n	$(9 / 9) = 100 \%$	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- X 100% Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n		
			265	2. Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	Jumlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah instruktur seluruhnya pada tahun n	(10 / 49) = 20.4082 %	
			266	3. Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun n ----- X 100% Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	(49 / 1,393) = 3.5176 %	
			267	4. Persentase LPK yang terakreditasi	LPK yang terakreditasi pada tahun n ----- X 100% Jumlah seluruh LPK pada tahun n	(2 / 17) = 11.7647 %	
			268	5. Persentase LPK yang memiliki	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n ----- X 100% Jumlah LPK yang terdata pada tahun n	(15 / 17) = 88.2353 %	
			269	6. Jumlah penganggur yang dilatih	Sebanyak	1393 Orang	
			270	7. Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n ----- X 100%	(1,393 / 1,393) = 100 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah orang yang dilatih pada tahun n		
			271	8. Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun n ----- X 100% jumlah lulusan pada tahun n	(367,353 / 381,276) = 96.3483 %	
			272	9. Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat kompetensi pada tahun n ----- X 100% Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun n	(83 / 1,393) = 5.9584 %	
			273	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	Jumlah CPMI dilatih ----- X 100% Jumlah CPMI terdaftar	(200 / 200) = 100 %	
			274	11. Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	Jumlah Pelatihan CPMI yang dilaksanakan ... ----- X 100% Jumlah Pelatihan CPMI yang direncanakan pada tahun n Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		pelatihan difasilitasi P3MI
		Tingkat Produktivitas	276	1. Persentase perusahaan	Jumlah perusahaan yang	(1 / 73) = 1.3699 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tenaga Kerja		yang menerapkan program peningkatan produktivitas	menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n		
			277	2. Data tingkat produktivitas total	Data tingkat produktivitas total (Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja)).	-10,05	
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	279	1. Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	(30 / 73) = 41.0959 %	
			280	2. Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada tahun n ----- X 100% Jumlah perusahaan yang telah memiliki SP/SB	(2 / 2) = 100 %	
			281	3. Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan	Sebanyak	2 SP/SB	
			282	4. Persentase perusahaan	Jumlah Perusahaan yang sudah	(35 / 40) = 87.5 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				yang sudah menyusun struktur skala upah	menyusun struktur dan skala upah... ----- X 100% Jumlah Perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		
			283	5. Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan ----- X 100% Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	(833 / 338) = 246.4497 %	BPJS ketenaga kerjaan sumber data dari BPJS ketenagakerjaan. WLKP sumber data dari pengawas ketenagakerjaan disnakertrans provinsi jawa timur
			284	6. Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih ----- X 100% Jumlah perusahaan pada tahun n	(2 / 73) = 2.7397 %	
			285	7. Jumlah mogok kerja	Sebanyak	Nihil	Nihil Mogok Kerja
			286	8. Jumlah penutupan perusahaan	Sebanyak	Nihil	Nihil Perusahaan
			287	9. Jumlah perselisihan kepentingan	Sejumlah	2 Perselisihan	
			288	10. Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	Sejumlah	Nihil	Nihil Perselisihan
			289	11. Jumlah perselisihan PHK	Sejumlah	Nihil	Nihil Perselisihan



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			290	12. Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	Sebanyak	Nihil	Nihil Orang
			291	13. Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	Sejumlah	Nihil Perselisihan	
			292	14. Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartity Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Ada/Tidak	Tidak	Nihil
			293	15. Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah penjanjian bersama ----- X 100% Jumlah kasus perselisihan	(1 / 2) = 50 %	
		Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	295	1. Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	3749 Lowongan Kerja	
			296	2. Jumlah pencari kerja yang terdaftar di Kabupaten/Kota	Sebanyak	654 Orang	
			297	3. Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	31 BKK	
			298	4. Jumlah Tenaga Kerja khusus terdaftar dalam satu Kabupaten/Kota	Sebanyak	21 Orang	
			299	5. Jumlah Pejabat	Sebanyak	1 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Fungsional Pengantar Kerja			
			300	6. Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah Kabupaten/Kota	Sebanyak	Nihil Lembaga	Nihil Lembaga
			301	7. Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota	Sebanyak	182 Perjanjian	
			302	8. Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	Sebanyak	497 Orang	
			303	9. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi ----- X 100% Jumlah CPMI/CTKI	(0 / 200) = 0 %	Proses sosialisasi dilaksanakan ketika waktu wawancara dan verifikasi dokumen pengajuan CPMI
			304	10. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata sebanyak	200 Orang	
			305	11. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja	Jumlah fasilitasi PMI yang dipulangkan ----- X 100%	(35 / 35) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			Indonesia (CTKI) yang mendapatkan fasilitas kepulangan	Jumlah PMI yang pulang		
			306	12. Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Jumlah PMI dan TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja ----- X 100% Jumlah PMI/TKI	Nihil	nihil karena pelatihan CPMI dilaksanakan oleh BLKLN P3MI atau BP2MI
			307	13. Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI Purna dan keluarganya yang diberdayakan ----- X 100% Jumlah PMI/TKI Purna dan keluarganya	Nihil	Nihil
			308	14. Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Jumlah LTSA yang terbentuk ----- X 100% Jumlah daerah kantong PMI/TKI	(1 / 7) = 14.2857 %	
		Persentase ARG pada belanja langsung APBD	310	1. Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kabupaten/Kota yang telah dilatih PUG	Sebanyak	37 Lembaga	
			311	2. Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kabupaten/Kota	Sebanyak	41 Program/Kegiatan	
		Persentase anak	313	1. Jumlah media massa	Sebanyak	0 Media Massa	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota		(cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemKabupaten/Kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak			
			314	2. Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal	Sebanyak	1 Lembaga	
			315	3. Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani ----- X 100% Jumlah korban kekerasan anak di tingkat Kabupaten/Kota	(14 / 126,459) = 0.0111 %	
			316	4. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan	Sebanyak	3 Lembaga	
			317	5. Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (APBD Kabupaten/Kota)	Sebanyak	3 Lembaga	
		Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk	319	1. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat	Sebanyak	5 Organisasi	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		perempuan)		Kabupaten/Kota yang mendapatkan pelatihan			
			320	2. Jumlah kader perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang sudah dilatih	Sebanyak	5 Orang	
			321	3. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	Sebanyak	2 Lembaga	
			322	4. Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Sebanyak	2 Lembaga	
			323	5. Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	Sebanyak	1 Kebijakan/Program	
			324	6. Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan hak perempuan yang telah terstandarisasi	Sebanyak	1 Lembaga	
			325	7. Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	$(15 / 15) = 100 \%$	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- X 100% Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		
9	PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	327	1. tersedianya infrastruktur perundangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada	
			328	2. tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada	
			329	3. Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Tidak	
			330	4. Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada	
			331	5. Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada	
			332	6. Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada	
			333	7. Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
10	PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	334	8. Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada	
			336	1. SK Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses (ditolak seluruhnya) ----- X 100% Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun	$(0.1 / 0.1) = 100 \%$	1. Surat pernyataan tidak tersedianya data Penerbitan Izin Lokasi Tahun 2023; 2. Data yang dimaksud adalah kewenangan Dinas PUPR kabupaten Pacitan
			337	2. SK Bupati/Wali Kota tentang Penetapan Tanah obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee ----- X 100% Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	Tidak Adan SK penerbitan penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee $(0 / 0) = 0 \%$	Surat Pernyataan Tidak Ada penerbitan SK penetapan tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee
			338	3. SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan mksimum/absentee ----- X 100% Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum/absentee dan	Tidak ada penerbitan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee $(0 / 0) = 0 \%$	Tidak menerbitkan SK Bupati/Walikota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					daftar subyek		
			339	4. Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak ----- x 100% Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	Tidak ada permohonan izin membuka tanah di tahun 2023 (0 / 0) = 0 %	Surta Pernyataan Tahun 2023 tidak ada permohonan izin membuka tanah dari masyarakat
			340	5. Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik ----- X 100% Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	Ada pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum sebanyak 7 lokasi (0 / 0) = 0 %	Data Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten Pacitan tahun 2023
		Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum					
		Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal					
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah					

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
		Tersedianya tanah untuk masyarakat					
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi					
11	LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	347	1. Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	Hasil Perhitungan Kabupaten/Kota terhadap: a) Indeks Kualitas air (IKA) b) Indeks Kualitas Udara (IKU) c) Indeks tutupan Hutan/Lahan (ITH/L)	$63,97 = (0,376 \times 50) + (0,405 \times 91,89) + (0,219 \times 36,34)$ Indeks Kualitas Pencemaran Air 50 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 91,89 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 36,34	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	349	1. Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan	sampah Ada 2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah Ada 3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing2 lingkungan Tidak	
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	351	1. Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah usulan permohonan yang terregistrasi	(4 / 4) = 100 %	
			352	2. Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah PPLHD yang ada ----- X 100% Jumlah usaha dan atau kegiatan yang Izin lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	(2 / 4) = 50 %	
			353	3. Penetapan hak MHA	Jumlah MHA yang diakui		Tidak terdapat

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Perekaman KTP Elektronik		terkait dengan PPLH yang berada di Daerah Kabupaten/Kota/ kota	----- X 100% Jumlah usulan MHA		Masyarakat Hukum Adat (MHA)
			354	4. Terasilinasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA yang mendapatkan pelatihan ----- X 100% Jumlah MHA yang ada		Tidak terdapat Masyarakat Hukum Adat (MHA)
			355	5. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana ----- X 100% target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat		Tidak ada diklat untuk lembaga kemasyarakatan
			356	6. Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabupaten/Kota yang ditangani	pengaduan masyarakat yang ditangani	(14 / 14) = 100 %	
			358	1. Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	(70 / 70) = 100 %	
			359	2. Penerbitan akta	Jumlah akta perceraian yang	(19 / 19) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				perceraian	diterbitkan ----- X 100% Peristiwa perceraian yang dilaporkan		
			360	3. Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan ----- X 100% Peristiwa kematian yang dilaporkan	(37,865 / 37,865) = 100 %	
			361	4. Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala Kabupaten/Kota dalam satu tahun ----- X 100% 2 (kali/ Dilaporkan Per Semester)	(2 / 2) = 100 %	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	362				
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	363				
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	364				
13	PEMBERDAYAAN	Persentase	365				

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	MASYARAKAT DAN DESA	Pengentasan Desa Tertinggal					
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	367	1. Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	Sebanyak	147 Desa	Jumlah desa yang sudah difasilitasi pembentukannya sebelum tahun 2023 menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dan dilakukan pembinaan pada tahun 2023 sejumlah 147 Desa (11 BUMDesma).
			368	2. Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	Sebanyak	147 Desa	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa s/d tahun 2023 sejumlah 147 Desa sama dengan tahun sebelumnya yang tergabung dalam BUMDESma sebanyak 11 Lembaga di 11 Kecamatan
			369	3. Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan	Sebanyak	0 Lembaga	Untuk tahun 2023 kegiatan ini tidak dilaksanakan selain tidak ada dukungan anggaran di tahun 2023



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)		diberdayakan			kegiatan ini merupakan kegiatan kurang prioritas
			370	4. Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Sebanyak	0 Desa	Tahun 2023 kegiatan ini difokuskan pada kegiatan ekonomi produktif yang mendukung peningkatan PADes bukan pada Lembaga Kemasyarakatan/ adat
			372	1. Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	Ada / Tidak Dokumen GDPK	Tidak	
			373	2. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	23	
			374	3. Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	30.06	
			375	4. Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK	(159,292 / 190,566) = 83.5889 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		Program KKBPK (Advokasi dan KIE)	(advokasi dan KIE) ----- X 100% Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK (advokasi dan KIE)		
			376	5. Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	Sebanyak	197 Stakeholder	
			378	1. Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP ----- X 100% Jumlah faskes	(33 / 33) = 100 %	
			379	2. Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah peserta KB aktif ----- X 100% Jumlah pasangan usia subur	(19,228 / 90,828) = 21.1697 %	
			380	3. Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Sebanyak	4729 Kelompok Kerja KKBPK	
			381	4. Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern	(4,507 / 4,536) = 99.3607 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- X 100% Jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan KB Pasca Persalinan adalah pelayanan KB yang diberikan setelah persalinan sampai dengan kurun waktu 42 hari		
		Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	383	1. Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dan Kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Desa dan Kelurahan yang memiliki persentase Kesertaan KB paling rendah dalam Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten/Kota	(4 / 172) = 2.3256 %	
			384	2. Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI ----- X 100% Jumlah keluarga PBI Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh Pemerintah.	(11,319 / 13,952) = 81.1282 %	
15	PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas					

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kabupaten/Kota	386	1. Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia ----- X 100% Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan	$(108 / 175) = 61.7143 \%$	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C
			387	2. Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun ----- X 100% Jumlah kendaraan wajib uji	$(3,324 / 3,766) = 88.2634 \%$	Terlaksananya pelayanan uji berkala
			388	3. Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan ----- X 100% Jumlah lintas penyeberangan dalam Kabupaten/Kota	$(0 / 32) = 0 \%$	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten/Kota, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi
			389	4. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota ----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	$(2,428 / 25,938) = 9.3608 \%$	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota
		V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	391	1. Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	$(2,428 / 25,938) = 9.3608 \%$	Persentase pelaksanaan manajemen dan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				lalulintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	----- X 100% Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten/Kota		rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota atau kota
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	393	1. Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(7 / 39) = 17.9487 %	IKK Output
			394	2. Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(14 / 39) = 35.8974 %	IKK Output
			395	3. Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah	Ada / Tidak	Tidak	IKK Output
		Persentase Layanan	397	1. Persentase kegiatan	Jumlah kegiatan (event), perangkat	(2 / 2) = 100 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi		(event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 ----- X 100% Jumlah kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah			
			398	2. Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(39 / 39) = 100 %	IKK Output
			399	3. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ----- X 100% Jumlah Perangkat Daerah	(39 / 39) = 100 %	IKK Output
			400	4. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi	(2 / 16) = 12.5 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik ----- X 100% Jumlah Layanan		
			401	5. Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik ----- X 100% Jumlah layanan	(15 / 16) = 93.75 %	IKK Output
			402	6. Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ----- x 100% Jumlah sistem elektronik	(3 / 15) = 20 %	IKK Output
			403	7. Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah ----- X 100% layanan publik dan layanan administrasi	(0 / 16) = 0 %	IKK Output
			404	8. Persentase perangkat daerah yang menggunakan	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data	(11 / 39) = 28.2051 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				layanan pusat data pemerintah	pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah		
			405	9. Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	(11 / 39) = 28.2051 %	IKK Output
			406	10. Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	(39 / 39) = 100 %	IKK output
			407	11. Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai ----- X 100% Jumlah data yang dimiliki perangkat daerah	(118 / 118) = 100 %	IKK Output
			408	12. Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city ----- X 100% Jumlah perangkat daerah	(20 / 39) = 51.2821 %	IKK Output
			409	13. Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo ----- X 100%	(2 / 8) = 25 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK		
			410	14. Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government	(Ada atau Tidak ada): 1. Dokumen Master Plan Poin dalam master plan paling sedikit memuat: § Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran § Penganggaran § Strategi § Peta Jalan § Arah Kebijakan § Cetak biru teknis/Peta rencana strategi 2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK di daerah paling sedikit memuat tentang GCIO (Government Chief of Information Officer): - Penugasan pejabat - Kewenangan - Tugas dan tanggung jawab	Ada	IKK Output
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas	412	1. Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah ----- X 100% Jumlah komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah	$(45 / 49) = 91.8367\%$	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			Kabupaten/Kota		
			413	2. Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) ----- X 100%	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten/Kota	(617 / 617) = 100 %	IKK Output
			414	3. Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan ----- X 100%	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	(482 / 400) = 120.5 %	IKK Output
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	416	1. Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota ----- X 100%	Jumlah penerbitan ijin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai ijin usaha simpan pinjam	(39 / 476) = 8.1933 %	
			417	2. Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan	(0 / 0) = 0 %	Belum terdapat pengajuan penerbitan izin pembukaan kantor

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	pinjam pada tahun yang dilaporkan ----- X 100% Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan.
			418	3. Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(180 / 520) = 34.6154 %	
			419	4. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya ----- X 100% Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	(40 / 520) = 9.6154 %	
			420	5. Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(52 / 520) = 10 %	
			421	6. Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian ----- X 100%	(120 / 94,771) = 0.1266 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang ada		
			422	7. Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$(10 / 520) = 1.9231\%$	
			423	8. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan (tidak perlu diisi)	ada $(1 / 520) = 0.1923\%$	
			424	9. Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$(237 / 520) = 45.5769\%$	
			425	10. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	$(1 / 520) = 0.1923\%$	
			426	11. Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	$(10 / 520) = 1.9231\%$	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	----- X 100% Jumlah koperasi yang ada		
			427	12. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	
			428	13. Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan ----- X 100% Jumlah koperasi yang ada	(10 / 520) = 1.9231 %	
		Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	430	1. Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru ----- X 100% Jumlah wirausaha yang ada	(1,982 / 25,033) = 7.9175 %	
			431	2. Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam system only data system (ODS)	jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem data online (ODS) ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(0 / 25,033) = 0 %	Tidak ada Usaha Mikro yang di input ke ODS
			432	3. Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	jumlah usaha mikro yang bermitra ----- X 100%	(60 / 25,033) = 0.2397 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah usaha mikro yang ada		
			433	4. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	(625 / 24,408) = 2.5606 %	
			434	5. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	(230 / 24,803) = 0.9273 %	
			435	6. Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(440 / 25,033) = 1.7577 %	
			436	7. Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha ----- X 100% Jumlah usaha mikro yang ada	(601 / 25,033) = 2.4008 %	
18	PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	438	1. PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Ada/Tidak serta Jumlah fasilitas/intensif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang bisa diberikan	Ada Perda No.7 Tahun 2012 Tentang Pemberian	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kepada investor sebanyak	Kemudahan Penanaman Modal	
			439	2. Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Tersedianya dokumen SOP pelaksanaan Pemberian fasilitas/Insentif penanaman modal	Ada SOP Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal	
			440	3. Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	Sebanyak	0 Laporan	
			441	4. Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Sebanyak	1 Kegiatan	
			442	5. Kegiatan pameran penanaman modal	Sebanyak	0 Kegiatan	
			443	6. Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Sebanyak	0 Kegiatan	
			444	7. Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak	261 Konsultasi	
			445	8. Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Sebanyak	7019 Izin	
			446	9. Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat	Laporan Realisasi Penanaman Modal	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kabupaten/Kota sebanyak	Rp. 945.843.748.120	
			447	10. Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sebanyak	20 Aparatur	Pembinaan aparatur penanaman modal sebanyak 20 Aparatur dan 12 Pendamping OSS
			448	11. Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal sebanyak	960 Perusahaan	
			449	12. Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi Kabupaten/Kota	Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi/ Jumlah permintaan data dan informasi yang diterima sebanyak	Ada Jumlah permintaan data dan informasi yang terpenuhi sebanyak 53	Dari hasil pendataan terdapat 200 orang pemuda yang berwirausaha yang tersebar di 12 Kecamatan.
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	451	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Sebanyak	120 Orang	Dari hasil Koordinasi dengan Dinas Koperasi dan UM terdapat 120 orang Pemuda yang mendapatkan Pelaytihan kewirausahaan "Pelatihan Bakery".
			452	2. Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	Sebanyak	0 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	454	1. Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	Sebanyak	5595 Orang	
			455	2. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	Sebanyak	310 Orang	
		Peningkatan prestasi olahraga	457	1. Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan sebanyak Yang dimaksud sebagai satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pelatih olahraga yang memiliki kompetensi adalah pelatih yang memiliki sertifikasi sebagai pelatih olahraga	68 Orang	
			458	2. Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	Sebanyak	26 Event/Kegiatan	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		daerah			
			461	2. Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak	2 Survey	IKK Output
			462	3. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan	Sebanyak	5 Kompilasi	IKK Output
			463	4. Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS	Sebanyak	2 Survey	IKK Output
			464	5. Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS	Sebanyak	5 Kompilasi	IKK Output
			465	6. Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral ----- X 100% Jumlah kegiatan statistik sektoral	(27 / 27) = 100 %	IKK Output
			466	7. Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata Indikator statistik sektoral ----- X 100% Jumlah indikator statistik sektoral	(27 / 27) = 100 %	IKK Output
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah					
21	PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	469	1. Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan	Jumlah kegiatan strategis teramankan ----- X 100%	(5 / 5) = 100 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis yang ada Kegiatan strategis adalah kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan, misalnya Rapat Paripurna, Musrenbang, Rapat Pimpinan Daerah, Rapat Pleno, Pelantikan, Upacara Penting dan lain-lain Kegiatan pengamanan sinyal adalah kegiatan pembatasan sinyal/akses komunikasi pada suatu area tertentu selama berlangsungnya kegiatan strategis, Jumlah kegiatan strategis yang akan diamankan ditentukan dengan memperhatikan frekuensi kegiatan strategis pada tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan kegiatan		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pengamanan sinyal yang dituangkan dalam dokumen perencanaan		
			470	2. Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian ----- X 100% Jumlah SE yang ada Sistem Elektronik (SE) adalah rangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Yang termasuk dalam sistem elektronik adalah sistem informasi, website, mail server, e-office, e-perizinan, e-procurement, e-persuratan, simda dll Aplikasi keamanan elektronik/kriptografi adalah aplikasi yang menyediakan salah satu dari	(3 / 15) = 20 %	IKK Output

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					layanan keutuhan, otentifikasi, kerahasiaan nir penyangkalan maupun gabungan dari layanan keamanan Sistem Manajemen Keamanan Informasi adalah bagian dari sistem secara keseluruhan berdasarkan pendekatan resiko bisnis untuk mendapatkan, menerapkan, mengoperasikan, memantau, mengkaji, meningkatkan dan memelihara keamanan informasi. SMKI mencakup struktur kebijakan, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses dan sumber daya organisasi. Diterapkannya SMKI pada suatu organisasi dapat dicerminkan dengan adanya infrastruktur keamanan informasi yang telah memadai		
			471	3. Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau Aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah ----- X 100% Jumlah SE yang ada		



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Nilai resiko diukur dengan menilai resiko pada sistem elektronik dan kegiatan kontra penginderaan yang dilakukan kepada aset informasi fisik untuk mendeteksi ada tidaknya kerawanan		
			472	4. Persentase titik yang diamankan disbanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan ----- X 100% Jumlah titik pada PHKS Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) adalah ketentuan yang memuat metode, kriteria, peran antara titik-titik dalam suatu sistem komunikasi pada suatu ruang lingkup tertentu dengan tujuan mengamankan informasi melalui metode persandian. Pola hubungan komunikasi sandi perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Daerah agar ketentuan di dalamnya dipatuhi. PHKS Pemda memuat Jaring Komunikasi Sandi (JKS) apa saja yang digelar dalam ruang lingkup Pemda. Sehingga dalam satu Pemda dimungkinkan tergelar beberapa JKS.		

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					JKS adalah keterhubungan antar pengguna persandian melalui jaringan telekomunikasi Titik adalah komponen JKS yang dapat menerima, membuat, menyimpan atau mengirim data/informasi		
22	KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	474	1. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)	Jumlah objek PK yang (diinventaris + diamankan + dipelihara + diselamatkan + dipublikasikan) sebanyak	167 Obyek	
			475	2. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)	Jumlah objek PK (disebarluaskan + dikaji + dikayakan keberagamannya) sebanyak	167 Obyek	
			476	3. Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan sebanyak	167 Obyek	
			477	4. Jumlah SDM, lembaga	Jumlah sdm ditingkatkan	0 Orang	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola sebanyak		
			478	5. Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringktan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan sebanyak	53 Cagar Budaya	
			479	6. Perlindungan cagar budaya Kabupaten/Kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar) sebanyak	13 Cagar Budaya	
			480	7. Layanan perizinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota sebanyak	- Cagar Budaya	
			481	8. Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi) sebanyak	2 Cagar Budaya	
			482	9. Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan sebanyak	2 Cagar Budaya	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			483	10. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan) sebanyak	1210 Koleksi	
			484	11a. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum sebanyak	37022 Orang	
			485	11b. Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum dan Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum sebanyak	6 Orang	
			486	12. Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	(tidak perlu di isi)		
			487	13. Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya sebanyak	- Tim	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/Kota			
			488	14. Pembentukan tim ahli cagar budaya Kabupaten/Kota	Jumlah pembentukan tim ahli CB sebanyak	- Tim	
			489	15. Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi sebanyak	- Orang	
			490	16. Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM CB + jumlah sdm Museum sebanyak	17 Orang	
			491	17. Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum) sebanyak	0 Orang	
			492	18. Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum) sebanyak	2 Unit	
			493	19. Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat sebanyak	10 Kegiatan	
23	PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	495	1. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar) ----- Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	(2,707,628 / 598,934) = 452.0745 %	
			496	2. Persentase ketermanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun on site ----- X 100%	(402,362 / 598,934) = 67.1797 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah penduduk di wilayahnya		
			497	3. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya ----- Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)	$(894 / 598,934) = 0.1493 \%$	
			498	4. Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpusatakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan ----- X 100% Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dibuktikan dengan sertifikat yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional. Kriteria Standar Nasional Perpustakaan merujuk pada peraturan perundangan yang berlaku.	$(31 / 839) = 3.6949 \%$	
			499	5. Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Sebanyak	12	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	501	1. Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media	Sebanyak	0 Naskah Kuno	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				(digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya			
			502	2. Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa	Sebanyak	0 Naskah Kuno	
			503	3. Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item) sebanyak Yang dimaksud dengan Koleksi Budaya Etnis Nusantara adalah semua bahan perpustakaan yang membahas tentang etnis baik yang mutakhir maupun retrospektif yang memuat informasi tentang 7 (tujuh) unsur kebudayaan sesuai dengan peraturan perundangan	2 Budaya Etnis	
24	KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	505	1. Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip aktif Jumlah seluruh arsip aktif diperoleh dengan cara menghitung jumlah naskah dinas (item arsip) yang tercatat pada buku agenda	(10 / 10) = 100 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					pencatatan surat masuk dan keluar instansi serta buku pencatatan pembuatan/pengiriman naskah dinas internal instansi Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
			506	2. Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip ----- X 100% Jumlah seluruh arsip inaktif Jumlah seluruh arsip inaktif diperoleh dengan cara mengukur volume arsip dalam satuan meter	$\left(\frac{5,320}{5,367} \right) = 99.1243 \%$	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					linier. Untuk arsip yang medianya selain kertas dilakukan konversi ke ukuran meter linier Penentuan status aktif atau inaktif mengacu pada Jadwal Retensi Arsip. Apabila belum memiliki JRA atau arsipnya belum tertata, maka penentuan status dilakukan berdasarkan lokasi penyimpanan. Apabila masih tersimpan di ruangan unit kerja/pengolah maka dianggap berstatus aktif. Apabila disimpan di unit kearsipan maka dianggap status inaktif Ketentuan daftar arsip aktif dan inaktif mengacu pada Pasal 42 dan 44 PP 28/2012		
			507	3. Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis Jumlah arsip statis diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang terdapat dalam daftar arsip yang diakuisisi oleh lembaga	(276 / 276) = 100 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					kearsipan sesuai Pasal 93 PP 28/2012 Ketentuan sarana bantu temu balik arsip statis mengacu pada Pasal 97 PP 28/2012		
			508	4. Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN ----- X 100% Jumlah seluruh arsip statis dan arsip dinamis pemerintahan Kabupaten/Kota Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN diperoleh dengan cara menghitung jumlah arsip yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang telah dapat diakses datanya di aplikasi SIKN/JIKN	(0 / 276) = 0 %	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa	510	1. Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK	NSPK pemusnahan arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 25/2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Jumlah Arsip)	5 Arsip	
			511	2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat	NSPK perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana	3 Arsip	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat		bencana yang sesuai NSPK	merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 23/2015 tentang Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana		
			512	3. Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi	NSPK penyelamatan arsip penggabungan/pembubaran perangkat daerah merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 46/2015 tentang Penyelamatan Arsip Penggabungan atau Pembubaran Lembaga Negara dan Perangkat Daerah (Jumlah Arsip)	0 Arsip	
			513	4. Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	NSPK autentikasi arsip merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 20/2011 tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik (Jumlah Arsip)	2 Arsip	
			514	5. Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK	NSPK pencarian arsip statis merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 18/2012 tentang Pedoman Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) (Jumlah Arsip)	1 Arsip	
			515	6. Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga	NSPK perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada Peraturan Kepala ANRI 28/2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip	1 Arsip	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK	Statis (Jumlah Arsip)		
			517	1. Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Sebanyak	3628 Rumah Tangga	Jumlah Total RTP Sebanyak 3.628 Rumah Tangga, Terdiri Dari: 1. Perikanan Laut Sebanyak 2.639 Rumah Tangga 2. Perikanan Umum Sebanyak 989 Rumah Tangga
			518	2. Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah TPI yang operasional ----- X 100% Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kabupaten/Kota	(5 / 6) = 83.3333 %	TPI di Kabupaten Pacitan Berjumlah 6 TPI, tetapi hanya 5 yang operasional karena 1 TPI yaitu TPI Teleng tidak operasional
			519	3. Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Sebanyak	10 Izin	Jumlah Pembudidaya yang Memiliki Izin sebanyak 10
			520	4. Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan	Sebanyak	40 Pembudidaya	Jumlah pembudidaya yang mendapatkan BIMTEK pada tahun 2023 sejumlah 40 orang

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				pendampingan/kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/ dan penguatan kelembagaan			
			521	5. Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahun sebanyak	2140840 Ekor	Jumlah produksi benih ikan tahun 2023 sebanyak 2.140.840 ekor yang merupakan produksi dari UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar/Payau dan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dengan nilai produksi Rp. 659.450.000
26	PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	523	1. Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi sebanyak Yang dimaksud dengan destinasi wisata adalah kawasan geografis yang berada satu atau lebih wilayah administrative yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas dan serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi	120 Kawasan	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					terwujudnya kepariwisataan Yang dimaksud sebagai entitas pengelolaan destinasi adalah pengelola destinasi pariwisata, baik negeri maupun swasta		
			524	2. Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebanyak • Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian • Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata	709.710 Sarpras	
			525	3. Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kabupaten/Kota sebanyak o Yang dimaksud dengan usaha pariwisata meliputi bidang usaha :	TDUP	bukan kewenangan dinas pariwisata, untuk pertanggung jawaban data ada pada dinas DPMPTSP



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					• Daya Tarik usaha • Kawasan pariwisata • Jasa transportasi wisata • Jasa perjalanan wisata • Jasa makanan dan minuman • Penyediaan akomodasi • Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi • Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran • Jasa informasi pariwisata • Jasa konsultan pariwisata • Jasa pramuwisata • Wisata tirta • Spa		
			526	4. Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Sebanyak	452 Orang	Yang kita hitung hanya Wisatawan Manca Negara saja. Tidak Menghitung Per Kebangsaan.
			527	5. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri	Sebanyak (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	5 Kegiatan	
			528	6. Jumlah event luar negeri yang diikuti Kabupaten/Kota	Sebanyak (bisa sebagai peserta / penyelenggara)	0 Kegiatan	Kabupaten Pacitan tidak mengikuti Event Pariwisata di Luar



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
							Negeri. Semua itu Karena masalah biaya. Untuk yang Jangkauan Luar negeri, kita memaksimalkan Promosi melalui media elektronik saja.
			529	7. Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri sebanyak Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.	18 Industri	
			530	8. Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi ----- X 100% Jumlah tenaga kerja pariwisata Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga	(22 / 55) = 40 %	



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
27	PERTANIAN	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota			sertifikasi profesi		
			531	9. Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan ----- X 100% Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	(330 / 350) = 94.2857 %	
			532	10. Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Sebanyak	9 Lokasi	
		Tingkat Hunian Akomodasi					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku					
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD					
		Produktivitas pertanian per hektar per tahun	538	1. Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan sebanyak	96 Unit	
			539	2. Prasarana pertanian yang	Jumlah prasarana pertanian yang	53 Unit	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				digunakan	digunakan sebanyak		
			540	3. Penerbitan izin usaha pertanian	Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian sebanyak	93 Dokumen	
			541	4. Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan ----- X 100% Jumlah prasarana yang dibangun	(53 / 53) = 100 %	
			542	5. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kabupaten/Kota	Jumlah usulan yang difasilitasi ----- X 100% Jumlah usulan usaha pertanian	(93 / 93) = 100 %	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	544	1. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi ----- X 100% Luas area terkena bencana Bencana yang dimaksud adalah bencana pertanian dan bencana penyakit hewan menular	(12 / 12) = 100 %	
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	546	1. Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kabupaten/Kota sebanyak	Tidak Nihil	
30	PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin	548	1. Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin:	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤5 hari kerja	(11 / 536) = 2.0522 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		a. Pusat Perbelanjaan b. Toko Swalayan	----- X 100% Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		
			549	--	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	(1 / 1) = 100 %	
			550	2. Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan TDG	(8 / 8) = 100 %	
			551	3. Persentase gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG ----- X 100% Jumlah gudang yang ada di Kabupaten/Kota	(3 / 127) = 2.3622 %	
			552	4. Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja	Nihil	Nihil Permohonan



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dalam negeri		
			553	--	b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri : Jumlah STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dalam negeri	Nihil	Nihil Permohonan
			554	--	c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri : Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan	Nihil	Nihil Permohonan

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					diterima secara lengkap dan atau benar ----- X 100% Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba waralaba luar negeri		
			555	5. Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota	jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/Kota ----- X 100% Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya Bagi Pengecer		tidak terdapat fasilitas penyimpanan bahan berbahaya
			556	6. Persentase penerbitan SPKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤ 1 hari kerja (1 x 24 jam) ----- X 100% Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar		nihil, karena SKA kewenangan pusat
			557	7. Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai	100%	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)		
			558	8. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan pokok	12%	
		Persentase kinerja realisasi pupuk	560	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	$X = \frac{a}{(b \times c)} \times 100$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	84,10%	
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	562	1. Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten/Kota	(573 / 1,928) = 29.7199 %	
			563	2. Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku		Nihil, karena kewenangan provinsi

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					----- X 100% Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		
31	PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	565	1. Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		Belum memiliki kawasan industri
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	567	1. Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkan menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan : a) Tersusunnya naskah akademik (30%) b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) e) Penetapan Perda RPIK (10%)	30% a. Tersusunnya naskah akademik (30%) Ya b. Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%) Ya c. Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Keterangan : penilaian bersifat akumulatif terhadap tahapan penyelesaian RPIK	Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%) Tidak d. Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%) Tidak e. Penetapan Perda RPIK (10%) Tidak	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	569	1. Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		Tidak ada yang mengajukan
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil	571	1. Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan ----- X 100% Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		Izin perluasan industri tidak ada



No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota					
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	573	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)	65% 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (25%) Tidak 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%)	informasi produksi, informasi bahan baku, dan informasi tenaga kerja data pendukung di peroleh per desember setiap tahunnya 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 3. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 4.

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					- Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	Tidak 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Tidak 6. Informasi tenaga kerja (10%) Tidak 7. Informasi Investasi (10%) Tidak	Informasi tenaga kerja (10%) 5. Informasi Investasi (10%) TOTAL 65%
			574	1. Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota di SII Nas ----- X 100%	(32 / 12,102) = 0.2644 %	

No.	Urusan	IKK Outcome dan Hasil	No.	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	Total Populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota		
32	TRANSMIGRASI	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	575	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	NIHIL Kawasan	NIHIL Kawasan
			576	2. Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya sebanyak (Satuan Pemukiman berupa satu kesatuan pemukiman atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300-500 keluarga)	NIHIL Permukiman	NIHIL Permukiman
			577	3. Jumlah satuan pemukiman yang dibina	Jumlah satuan pemukiman yang dibina sebanyak	NIHIL Permukiman	NIHIL Permukiman



2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2022 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Hasil setiap urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci hasil setiap urusan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 5-6 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD ----- x 100% Jumlah anak usia 5-6 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(11,193 / 12,946) = 86.4591 % %	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar ----- x 100% Jumlah anak usia 7-12 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(34.187 / 43.581) = 78.4447 % %	
		3	Tingkat partisipasi	-- Indikator	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat	(18.092 / 24.216) =	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	atau sedang belajar di sekolah menengah pertama ----- x 100% Jumlah anak usia 13-15 tahun pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	74.7109 % %	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ----- x 100% Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	(566 / 2,470) = 22.9150 % %	
2	KESEHATAN	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan ----- x 100% Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota	(307 / 597,390) = 0.0514 %	
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang terakreditasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi ----- x 100% Jumlah RS di Kabupaten/Kota	(3 / 3) = 100 % %	
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ----- x 100% Jumlah ibu hamil di Kabupaten/Kota	(5,406 / 5,830) = 92.7273 %	
		8	Persentase ibu bersalin	-- Indikator Kinerja Kunci	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	(5,280 / 5,586) = 94.5220 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			mendapatkan pelayanan persalinan	Outcome/Hasil --	----- x 100% Jumlah ibu bersalin di Kabupaten/Kota		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/Kota	(5,217 / 5,334) = 97.8065 %	
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah balita di Kabupaten/Kota	(28,968 / 30,570) = 94.7596 %	
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/Kota	(64,223 / 64,223) = 100 %	
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/Kota	(259,221 / 331,274) = 78.2497 %	
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga Negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah warga Negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten/Kota	(107,131 / 123,449) = 86.7816 %	
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100%	(92,769 / 92,769) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			pelayanan kesehatan sesuai standar	--	Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/Kota		
		15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita DM di Kabupaten/Kota	(7,068 / 7,236) = 97.6783 %	
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita ODGJ di Kabupaten/Kota	(1,061 / 1,061) = 100 %	
		17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100% Jumlah penderita TBC di Kabupaten/Kota	(5,467 / 5,467) = 100 %	
		18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar ----- x 100% Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/Kota	(6,667 / 6,710) = 99.3592 %	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS	(1,136.98 / 1,439.22) = 78.9997 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota		Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)		
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	(50 / 450) = 11.1111 %	
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting ----- x 100% Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota	(5,092 / 8,274) = 61.5422 %	
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota tersebut	(117,052 / 147,277) = 79.4774 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Kabupaten/Kota				
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----- x 100% Jumlah rumah di Kabupaten/Kota	(143,289 / 147,277) = 97.2922 %	
		24	Rasio kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya ----- x 100 % Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	(83 / 136) = 61.0294 %	
		25	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap ----- x 100% Jumlah Panjang jalan Kabupaten/Kota	(819.59 / 1,374) = 59.6499 %	
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ----- x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota	(48 / 48) = 100 %	
		27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi ----- x 100% Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	(48 / 48) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4	PERUMAHAN RAKYAT	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun N ----- x 100% Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun N	(10 / 10) = 100 %	Data Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten Pacitan Tahun 2023
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rumah Tangga penerima fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan tanah dan/atau bangunan+ rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni ----- x 100% Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	(1 / 1) = 100 %	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota tahun 2023
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100% Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	(46.2 / 67) = 68.9552 %	Luasan kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani di tahun 2023
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100% Jumlah total unit rumah Kabupaten/Kota	(15,866 / 165,941) = 9.5612 %	Data Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tahun 2023
		32	Jumlah perumahan	-- Indikator	Jumlah Perumahan yang sedang dibangun	(5 / 5) = 100 %	1. Data Jumlah

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	terfasilitasi PSU ----- x 100% Jumlah Perumahan Kabupaten/Kota		Perumahan Yang Terfasilitasi PSU tahun 2023; 2. Data Jumlah Perumahan di Kabupaten Pacitan.
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pengaduan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	(120 / 120) = 100 %	
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan ----- x 100% Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	(40 / 40) = 100 %	
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	(598,934 / 598,934) = 100 %	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ----- x 100% Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ----- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana		
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ----- x 100% Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota	(38 / 38) = 100 %	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran (menit)	15 Menit	
6	SOSIAL	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti ----- x 100% Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan	(2,331 / 2,331) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)		pengemis		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran ----- x 100% Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten/Kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	(163 / 163) = 100 %	
7	TENAGA KERJA	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD ----- x 100% Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota		dokumen RTKD terbaru masih dalam penyusunan
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----- x 100% Jumlah tenaga keseluruhan	(83 / 367,353) = 0.0226 %	
		44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) ----- Jumlah tenaga kerja	(11,722,436/ 367,353) = 31.9105	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kerja yang layak ----- x 100%	(30 / 73) = 41.0959 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	--	Jumlah perusahaan		
		46	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan ----- x 100% Jumlah pencaker yang terdaftar	(509 / 654) = 77.8287 %	
8	PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD ----- x 100% Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD	(14,714,361,389 / 636,241,255,985) = 2.3127 %	
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi ----- x 100% Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)	(14 / 126,459) = 0.0111 %	
		49	Rasio kekerasan	-- Indikator	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	(15 Orang / 295,902 Orang)	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	----- x 100.000 Jumlah penduduk perempuan	x 100,000 Rasio = 5.0692	
9	PANGAN	50	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota ----- x 100% Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan	(5.92 / 100) = 5.92 % %	
10	PERTANAHAN	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)	(0.1 / 0.1) = 100 %	1. Surat pernyataan tidak tersedianya data Penerbitan Izin Lokasi Tahun 2023; 2. Data yang dimaksud adalah kewenangan Dinas PUPR kabupaten Pacitan
		52	Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum ----- x 100% Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Ada pelaksanaan kegiatan (32,530 / 38,677) = 84.1068 % %	Jumlah kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum tahun 2023
		53	Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam	-- Indikator Kinerja Kunci	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian	(0.1 / 0.1) = 100 %	Jumlah kegiatan pengadaan tanah

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Rangka Penanaman Modal	Outcome/Hasil --	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) ----- x 100% Luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan		untuk pembangunan kepentingan umum tahun 2023
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha; ----- x 100% Jumlah penerima tanah obyek landreform	Tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Surat Pernyataan Tahun 2023 tidak tersedia Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee.
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah ----- x 100% Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan	Tahun 2023 tidak ada permohonan izin membuka tanah dari masyarakat	Surat Pernyataan Tahun 2023 tidak ada permohonan izin membuka tanah dari masyarakat
		56	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani ----- x 100% Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	Tidak terjadi sengketa tanah garapan	Surat Pernyataan Data penanganan sengketa tanah garapan tahun 2023 Nihil
11	LINGKUNGAN HIDUP	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	IKLH Kabupaten/Kota = (IKA 30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%).	63,97 = (0,376 x 50) + (0,405 x 91,89) + (0,219 x 36,34) Indeks Kualitas Pencemaran	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
						Air 50 Indeks Kualitas Pencemaran Udara 91,89 Indeks Tutupan Hutan/Lahan 36,34	
		58	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Volume sampah yang dapat ditangani ----- x 100% Jumlah seluruh Total Volume Timbunan sampah tahun berjalan Kabupaten/Kota	(1,764,265 / 1,781,828) = 99.0143 %	
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota ----- x 100% Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan		Tidak terdapat kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan atau izin PPLH
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	60	Perekaman KTP Elektronik	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman ----- x 100% Jumlah penduduk wajib KTP-el	(483,112 / 483,950) = 99.8268 %	
		61	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100%	(56,286 / 115,762) = 48.6222 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			memiliki KIA	--	Jumlah anak usia 0-17 tahun		
		62	Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun Yang Mempunyai Akte Kelahiran	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 tahun	(121,606 / 123,362) = 98.5765 %	
		63	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama ----- x 100% Jumlah PD	(10 / 28) = 35.7143 %	
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	64	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Desa Tertinggal yang memenuhi kriteria Desa Berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100%	(1 / 1) = 100 %	Sejak tahun 2020 status Desa Tertinggal sesuai dengan Keputusan Dirjend. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					Jumlah Desa Tertinggal (per-awal tahun N)		No. 303 Tahun 2020 untuk Kabupaten Pacitan sudah tidak ada; Hal ini dapat diartikan bahwa Dinas PMD sudah mengentaskan desa tertinggal 100%
		65	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun ----- x 100% Jumlah desa berkembang (per awal tahun N)		Untuk tahun 2023 hanya ada perubahan status Desa Berkembang Menjadi Desa Maju dan Desa Maju menjadi Desa Mandiri, sedangkan status Desa Berkembang menjadi Desa Mandiri adalah 0 Desa
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil	TFR (Angka Kelahiran Total) $5\sum ASFR$	1,54	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
	BERENCANA			--			
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah peserta KB Aktif Modern ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(68,517 / 90,828) = 75.4360 %	
		68	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur	(9,692 / 90,828) = 10.6707 %	
15	PERHUBUNGAN	69	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyebrangan) o IK1 (angkutan jalan) = (jumlah trayek yang dilayani pd Kabupaten/Kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada Kabupaten/Kota tersebut o IK2 (Angkutan Sungai, danau, dan penyeberangan) = jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada Kabupaten/Kota tersebut x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada Kabupaten/Kota tersebut) Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) • Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP	0,88	Rasio Konektivitas Kabupaten

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					• Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) • Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasan perintis ditambah lintasan komersil • Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan penyeberangan: 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP= 70, bobot angkutan jalan =30) 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan=50) 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP=30)		

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					(bobot angkutan jalan=70) 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP=0, bobot angkutan jalan= 100) Bobot trayek atau lintas: a) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot= 1 b) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot=0.8 c) Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot=0.5		
		70	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,27	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo ----- x 100% Jumlah PD	(15 / 39) = 38.4615 %	IKK Outcome
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah Layanan Publik	(7 / 8) = 87.5 %	IKK Outcome
		73	Persentase	-- Indikator	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran	(667,170 / 597,390) =	IKK Outcome

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Penduduk	111.6808 %	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset ----- x 100% Jumlah seluruh koperasi	(187 / 520) = 35.9615 %	
		75	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha ----- x 100% Jumlah usaha mikro keseluruhan	(1,198 / 25,033) = 4.7857 %	
18	PENANAMAN MODAL	76	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota /Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	(Jumlah Investasi tahun N - jumlah Investasi tahun N-1) di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah Investasi tahun N-1 di Kabupaten/Kota	(945,843,748,120 - 918,175,203,899) / 918,175,203,899 = 3.0134 %	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	(200 / 120,564) = 0.1659 %	Dari hasil pendataan terdapat 200 orang pemuda yang berwirausaha yang tersebar di 12

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							Kecamatan.
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/Kota ----- x 100% Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kabupaten/Kota	$(5,595 / 120,549) = 4.6413 \%$	Jumlah Pemuda yang menjadi Anggota Aktif Pada Organisasi Kepemudaan sejumlah 5.595 orang. Dengan organisasi Keemudaan: 1. Himpunan Mahasiswa Islam 2. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia 3. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah 4. Gerakan Pemuda Nusantara 5. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 6. Petupa 7. Purna Paskibraka 8. Duta Wisata Kethuk Kenang Pacitan

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							9. Pemuda Ansor 10. Pemuda Muhammadiyah 11. Komite Nasional Pemuda Indonesia 12. Karang Taruna 13. Ippnu 14. Ipnu 15. Kammi 16. GSNI 17. Sapmapa 18. PDPM 19. PDNA 20. IPM
		79	Peningkatan prestasi olahraga	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	15 Medali/Penghargaan	
20	STATISTIK	80	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD	(39 / 39) = 100 %	IKK Outcome
		81	Persentase OPD	-- Indikator	Jumlah PD yang menggunakan data statistik	(39 / 39) = 100 %	IKK Outcome

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah PD		
21	PERSANDIAN	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100% Jumlah area penilaian		IKK Outcome
22	KEBUDAYAAN	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan ----- x 100% Jumlah cagar budaya yang terdata	(13 / 53) = 24.5283 %	Cagar Budaya yang dilestarikan sejumlah 17 CB dari yang terdata 24 CB.
23	PERPUSTAKAAN	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	56,7	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP	68,39	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan		
24	KEARSIPAN	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (a+i+s+j)/4$ T = tingkat ketersediaan arsip a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip I = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN	$(100 + 99.12 + 100 +) / 4 = 74.78$	
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	$T = (m+b+g+a+c+i)/6$ T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m= tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g= tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibuatkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip	$83.33 = (100+100+0+100+100+100)/6$	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c= tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l= tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		
25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota ----- x 100 % Target Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) yang ditetapkan	(14.393 / 11.670 = -123,33 %	
26	PARIWISATA	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun N-1 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun N-1	(1,306,817 - 1,556,184) / 1,556,184 = -16.0243 %	Dari data tersebut terjadi penurunan pada jumlah kunjungan wisata . Hal ini dikarenakan dengan munculnya destinasi baru dibalik didalam maupun di luar kabupaten Pacitan sehingga menyebabkan persaingan pada industri pariwisata. selain itu juga letak

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
							geografis kabupaten Pacitan juga berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan.
		90	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah wisatawan tahun N - Jumlah wisatawan tahun N-1 ----- x 100% Jumlah wisatawan tahun N-1	(1,306,817 - 1,566,186) / 1,566,186 = -16.5605 %	
		91	Tingkat Hunian Akomodasi	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah kamar terjual N ----- x 100% Jumlah kamar tersedia dikali 365 hari	(9,451 / 819) = 1,153.9683 %	DISPARBUDPORA tidak menghitung.
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku ----- x 100% Total PBRB harga berlaku		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Pendapatan dari sektor pariwisata ----- x 100% Jumlah total PAD		Dinas Pariwisata Hanya Menghitung PAD dari sektor Pariwisata
27	PERTANIAN	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (Ton) ----- x 100% Luas panen (ha)	(446,210 / 62,321) = 715.9866 %	
		95	Persentase Penurunan kejadian	-- Indikator Kinerja Kunci	Jumlah kejadian penyakit/kasus Tahun N – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular	(3,285 - 3,335) / 3,335 = - 1.4993 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Outcome/Hasil --	Tahun N-1 ----- x 100% Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular Tahun N-1		
29	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin ----- x 100% Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	Tidak ada perusahaan pemanfaat panas bumi	
30	PERDAGANGAN	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah kabupaten/kota	(11 / 536) = 2.0522 %	
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Realisasi pupuk ----- x 100% Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK)	(19,088,340 / 22,696,000) = 84.1044 %	
		99	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan ----- x 100% Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota	(573 / 1,928) = 29.7199 %	
31	PERINDUSTRIAN	100	Pertambahan jumlah	-- Indikator	(jumlah industri kecil dan menengah tahun N -	(12,102 - 11,923) / 11,923	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Industri kecil dan menengah tahun N-1) ----- x 100% Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	= 1.5013 %	
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota)	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIK ----- x 100% Jumlah Indikator Pembangunan Industri dalam RPIP Definisi Operasional : Mengukur persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Keterangan : •Ke-5 sasaran pembangunan industri daerah merupakan sasaran yang ada dalam dokumen Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP) dalam jangka panjang dan wajib ditentukan sasaran tahunannya dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan. Target tahunan tersebut selanjutnya akan dijadikan tolak ukur pencapaian di akhir tahun Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data ekspor industri pengolahan nonmigas di daerah asal barang Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas		Belum memiliki Perda RPIK karena terkendala Perda RTRW yang belum ditetapkan

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					berdasarkan data industri skala besar, menengah dan kecil yang telah memiliki perizinan berusaha Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas berdasarkan data total penyerapan tenaga kerja oleh industri pengolahan nonmigas dalam satu tahun ▪ Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi untuk jangka waktu 20 tahun. ▪ Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK) merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan dalam perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota untuk jangka waktu 20 tahun ▪ Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang di tandatangi oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi.		
		102	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	(32 / 32) = 100 %	

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait				
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan	Tidak ada IUI yang diterbitkan	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota	-- Indikator Kinerja Kunci Outcome/Hasil --	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan ----- x 100% Jumlah izin yang dikeluarkan		tidak memiliki kawasan industri
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-- 7 Informasi industri secara lengkap dan terkini --	1) Keterkinian informasi industri : - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi industri dengan batas	65% 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu	informasi produksi, informasi bahan baku, dan informasi tenaga

No.	Urusan	No	IKK Outcome dan Hasil	IKK Output dan Keluaran	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					waktu 7-12 bulan (25%) 2) Kelengkapan informasi industri meliputi : - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) - Informasi bahan bakar/energi (10%) - Informasi tenaga kerja (10%) - Informasi Investasi (10%) Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)	0-6 bulan (25%) Tidak 2. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) Ada 3. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 4. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) Ada 5. Informasi bahan bakar/energi (10%) Tidak 6. Informasi tenaga kerja (10%) Ada 7. Informasi Investasi (10%) Ada	kerja data pendukung di peroleh per desember setiap tahunnya 1. Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) 2. Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) Ada 3. Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 4. Informasi tenaga kerja (10%) 5. Informasi Investasi (10%) TOTAL 65%
32	TRANSMIGRASI	106	IKK Output Urusan Transmigrasi Kabupaten/Kota	1. Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	Kawasan Transmigrasi adalah kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi	NIHIL Kawasan	nihil kawasan

2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Penunjang

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2023 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Kunci Penunjang urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Capaian kinerja kunci penunjang urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.4
Indikator Kinerja Kunci Penunjang

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	PERENCANAAN KEUANGAN	1	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan ----- -- x 100% Jumlah APBD	(523,880,333,005.50 / 1,770,371,983,832.24) = 29.5915 %	mengalami penurunan secara presentase namun naik secara nilai
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD ----- X 100% Jumlah Pendapatan pada APBD	(213,300,354,867.05 / 1,709,316,287,709.05) = 12.4787 %	mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar 9.9781 %
		3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level	Ada	Maturitas SPIP untuk tahun 2023 telah

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			Pemerintah (SPIP)	1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Nilai/skor maturitas 3,190, Level 3	dievaluasi secara terintegrasi oleh BPKP Pusat dengan capaian kinerja diperoleh nilai/skor maturitas 3,190 pada Level 3
		4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3/level 4/level 5) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Ada Skor 3,00, Level 3	Tingkat Kualitas APIP berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP Pusat tahun 2023, kapabilitas APIP diperoleh skor 3,00 pada Level 3
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures ----- -- x 100% Jumlah belanja APBD	(1,526,265,341,832.68 - 365,198,009,577.68) / 1,770,371,983,832.24 = 65.5832 % %	-
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir	Opini Laporan Keuangan dalam 10 Tahun Terakhir : 1. Opini BPK Tahun 2021 : WTP 2. Opini BPK Tahun 2020 : WTP 3. Opini BPK Tahun 2019 : WTP 4. Opini BPK Tahun 2018 : WTP 5. Opini BPK Tahun 2017 : WTP 6. Opini BPK Tahun 2016 : WTP 7. Opini BPK Tahun 2015 : WTP 8. Opini BPK Tahun 2014 : WTP	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
					9. Opini BPK Tahun 2013 : WTP 10. Opini BPK Tahun 2012 : WDP	
2	PENGADAAN	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun N ----- -- x 100% Jumlah kontrak keseluruhan tahun N	(0 / 0) = 0 %	Tidak ada Paket Pekerjaan yang dilaksanakan tahun jamak
		8	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif ----- -- x 100% Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	(5,410 / 12,301) = 43.9802 %	
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasional dan modal yang melalui pengadaan ----- X 100% total belanja operasional dan modal	(549.270 / 765.614) = 71.7424 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
		10	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) ----- X 100% Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	(386.319 - 286.281) / 286.281 = 34.9440 %	
3	KEPEGAWAIAN	11	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas diluar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan ----- -- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(632 / 1,244) = 50.8039 %	
		12	Rasio pegawai	Jumlah pegawai PNS	(282 / 1,457) = 22.6688 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
4	MANAJEMEN KEUANGAN		Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) ----- -- x 100% Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		
		13	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi ----- -- x 100% Seluruh jumlah pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	(248 / 1,244) = 19.9357 %	
		14	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	Realisasi Belanja Nilai absolut dari {----- ----- - 1} X 100% Total Belanja APBD (sebelum perubahan)	(1,770,371,983,832.24/ 1,673,623,723,175.00) - 1 = 5.7808 %	
		15	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan)	Total PAD dalam realisasi Nilai absolut dari {----- ----- - 1} X 100%	(165,244,644,988.69/ 154,616,728,818) - 1 = 6.87 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
			pendapatan dari perencanaan awal)	Total PAD dalam APBD (sebelum perubahan)		
		16	Assets Management	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4 Apakah ada daftar asset tetap ? Ada Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap ? Ada Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ? Ada Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ? Ya	
		17	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA ----- -- x 100% Total belanja anggaran tahun sebelumnya	(116,655,847,376.27 / 1,662,255,332,563.37) = 7.0179 %	
5	TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK	18	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya) ----- -- x 100% Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat	(1,142,272,020,711.64/ 1,226,247,763,018) = 93.1518 %	

No.	Urusan	No.	IKK Outcome / Hasil	Jenis Data / Rumus	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
				diakses di website Pemda (Unit Pelayanannya)		
		19	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- -- x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci (11 Dokumen) Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA PPKD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA PPKD, LRA seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD Yang Sudah Di Audit, Opini atas LKPD	(11 / 11) = 100 %	

2.2.4. **Indikator Kinerja Tahunan**

Dalam rangka menyajikan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih sistematis, dan akurat, disajikan cakupan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Pacitan selama tahun 2023 berdasarkan dengan Indikator Kinerja Tahunan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Capaian kinerja tahunan urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah secara lengkap sebagaimana tabel dibawah ini :

Table 2.5
Indikator Kinerja Tahunan

No	INDIKATOR KOMPONEN OTDA	INDIKATOR / URAIAN	DEFINISI OPERASIONAL / BUKTI PENDUKUNG	JENIS DATA / RUMUS	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	FASILITASI KEPALA DAERAH, DPRD, DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD	Untuk Penyampaian LKPJ melampirkan Surat Pengantar Penyampaian LKPJ kepada DPRD dan tanda terima Penyampaian LKPJ	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	Ya	Penyampaian Buku LKPJ Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2023 Pada Tanggal 18 Maret 2024
		Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD	Untuk Pembahasan LKPJ melampirkan Undangan Pembahasan LKPJ,Risalah -	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu 1. Undangan Pembahasan LKPJ : Ada/Tidak Ada 2.	Tepat Waktu / Tidak Tepat Waktu Ya Undangan Pembahasan LKPJ Ada	REKOMENDASI DPRD ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2023 Pada

			Rapat, Berita Acara, Keputusan DPRD tentang Rekomendasi dan Dokumentasi	Risalah Rapat : Ada/Tidak Ada 3. Berita Acara : Ada/Tidak Ada 4. Keputusan DPRD tentang Rekomendasi : Ada/Tidak Ada 5. Dokumentasi: Ada/Tidak Ada	Risalah Rapat Ada Berita Acara Ada Keputusan DPRD tentang Rekomendasi Ada Dokumentasi Ada	Tanggal 2 April 2024
		Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri	Untuk Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kab/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melampirkan Surat pengantar dan Tanda Terima	Ada/Tidak Ada	Ada	Pengiriman Keputusan DPRD Kabupaten Pacitan Pada Tanggal 4 April 2023
2	PRODUK HUKUM DAERAH	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun 2023	-	Tepat atau Tidak Tepat	Tidak	
		Persentase Penetapan RanPerda Tahun Anggaran 2023	-			
		Monitoring Center for Prevention Tahun 2023	-	Nilai MCP Tahun 2023	Nilai 91,10 ,dan peringkat 17 pada Provinsi Jawa Timur , Monitoring Centre For Prevention (MCP) KPK adalah salah satu	cc

					cara melakukan pemberantasan korupsi dengan cara pencegahan, meliputi delapan area intervensi pencegahan korupsi. Delapan area tersebut terdiri dari perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan daerah. Pada delapan area intervensi itu, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 subindikator yang akan menjadi fokus MCP tahun 2023. Update hasil dari capaian MCP untuk Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tgl 12 Januari 2024 adalah 91,10, ranking 17 tingkat Provinsi Jawa Timur.	
3	KKPD	Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (PTUN Undang-undang	Pemerintah Daerah melaksanakan Keputusan dan/atau Tindakan yang sah dan Keputusan yang telah dinyatakan	Ya/Tidak		

		Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan)	tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau Atasan Pejabat, dan mematuhi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum Bukti Pendukung : Putusan pengadilan dan surat keputusan kepala daerah			
		Kepatuhan Pemda dalam menindaklanjuti peraturan perundang-undangan dibidang kelembagaan perangkat daerah. (PP 18/2016; PP 72/2019; PP 106/2021; beserta peraturan dibawahnya)	Pemerintah Daerah telah menerbitkan: a. Perda (pembentukan dan susunan perangkat daerah) (pasal 3 ayat 1 PP 18/2016). b. Perkada (kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah) terkait kelembagaan perangkat daerah (pas Bukti Pendukung : Copy halaman	Ya/Tidak		

			depan, belakang serta pasal yang menunjukkan bunyi peraturan Perda dan perkada yang diterbitkan			
		Kepatuhan Pemda dalam melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri terkait kebijakan penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan)	Pemerintah daerah telah melaksanakan rekomendasi menteri dalam negeri persetujuan penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan. Data dukung: 1. Persetujuan Menteri Dalam Negeri terkait penyederhanaan struktur organisasi 2. Persetujuan Menteri	Jumlah tindaklanjut kepatuhan pemda ----- ----- x 100% Jumlah rekomendasi Mendagri		
		Persentase Jabatan Struktural yang Terisi	-	Jabatan Struktural yang Terisi (Definitif) ----- ----- x 100% Jabatan Struktural yang ada	(324 / 324) = 100 % %	
		Jumlah Diklat Jabatan Fungsional Tahun 2023	-	Jumlah Kegiatan Diklat Jabatan Fungsional ----- X		

				100% Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional		
4	EVALUASI KINERJA DAN PENINGKATAN KAPASITAS DAERAH	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No. 85 Tahun 2021	Program - Program yang Mendukung 7 Program Prioritas Nasional	Jumlah Program yang Mendukung 7 Prioritas Nasional Tahun 2022 Berdasarkan Perpres No 85 Tahun 2021	41	
		Persentase Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2023	-	Realisasi Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2023 ----- ----- x 100% Anggaran Belanja Urusan Pelayanan Dasar Tahun 2023	(1,142,272,020,711.64 / 1,226,247,763,018) = 93.1518 % %	
		Persentase Penurunan SILPA	-	Nilai SILPA Tahun 2023 (n) - Nilai SILPA Tahun 2022 (n-1) ----- - X 100% Nilai SILPA Tahun 2022 (n-1)	(116,655,847,376.27 - 96,552,034,829.67) / 96,552,034,829.67 = 20.8217 % %	
		Pertambahan Nilai Aset Tetap	-	Nilai Aset Tetap Tahun 2023 (n) - Nilai Aset Tetap Tahun 2022 (n-1) ----- - X 100% Nilai Aset Tetap	(4,045,143,000,404.47 - 4,041,956,639,156.31) / 4,041,956,639,156.31 = 0.0788 % %	

			Tahun 2022 (n-1)		
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	-	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022 ----- ----- x 100% Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022	(580 / 604) = 96.0265 % %	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran 2022 sampai dengan smt 1 tahun 2023 sudah mencapai 96%. Untuk capaian semester 2 masih dalam proses verifikasi tim pemeriksa BPK RI
	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	-	Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023		
	Keberadaan Mall Pelayanan Publik	-	Ada atau Tidak	Ada Peraturan Bupati No. 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik	
	Inovasi Daerah (Sesuai dengan PP 38/2017)	-	Jumlah Inovasi Daerah (Jenis dan Manfaat)	75	
	Kerja Sama Daerah	-	Laporan Kerja Sama Daerah		
	Jumlah Kerjasama Daerah	-	Kerja Sama yang masih Berlaku dan Manfaatnya	Kerjasama	

2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Pacitan

Laporan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan merupakan wujud komitmen Bupati selaku pengemban Amanah masyarakat dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pemerintah Daerah atas kinerja yang telah dicapai. Pedoman penyusunan laporan adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 sesuai Perda Kabupaten Pacitan No 10 Tahun 2021 memuat visi” Masyarakat Pacitan Sejahtera dan Bahagia” dengan 4 (empat) misi yaitu:

1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dan Pembangunan Wilayah Perbatasan Dengan Tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani

Pengukuran pencapaian kinerja tujuan dan sasaran strategis dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan. Rumus perhitungan capaian kinerja berdasarkan jenis indikator dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu indikator positif dan indikator negatif, dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

- A. Indikator Positif apabila semakin tinggi realisasinya maka semakin tinggi capainkinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = $\text{Realisasi} \times 100 \% \text{ Target}$
- B. Indikator Negatif apabila semakin tinggi realisasi maka semakin rendah capaian kinerjanya, dengan rumus: Persentase Capaian kinerja = $\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target}) \times 100 \%$

Target Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal dan kriteria keberhasilan yang digunakan dalam laporan kinerja Pemerintah Kabupaten Pacitan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.6
Skala Pengukuran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

No	JUMLAH NILAI	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

A. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja bertujuan:

- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi Amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan / kemajuan kinerja pemberi amanah;
- e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai

Berikut merupakan perjanjian kinerja Bupati Pacitan yang menggambarkan kinerja yang akan dicapai Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel. 2.7
Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	69
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,01

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Lingkungan		
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa			
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,619
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,808
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.986.675
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,22
5.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,75
6.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,3
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya			
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	4,4
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	36.454.879
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.787.881.815
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.271.593.814
		PDRB Industri Pengolahan	828.378.792
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,2
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,9
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani			
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,9
		Nilai IKM	84
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	78
3	Terwujudnya Birokrasi Yang	Nilai SAKIP	77

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Akuntabel dan Transparan	Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	3
4	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	36,05

Untuk mencapai beberapa target indikator kinerja sebagaimana disebutkan diatas maka didukung dengan anggaran yang melekat pada Program-prgoram Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2.8
 Anggaran Tahun 2023

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	904.023.439.495	960.851.971.400
2	Program Pengelolaan Pendidikan	114.246.120.400	120.419.333.399
3	Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000	10.000.000
4	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	8.424.800.000	8.486.799.015
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.000.000	10.000.000
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	94.284.225.746	107.626.450.850
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	6.186.970.604	7.097.600.126
8	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.267.546.000	1.031.221.000
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	5.760.384.300	3.116.553.221
10	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	7.115.630.000	12.634.498.800
11	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	18.821.801.000	19.830.275.430
12	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	5.368.000.000	5.939.400.000
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.599.900.000	10.293.394.430

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
14	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	3.367.700.000	4.794.331.140
15	Program Penataan Bangunan Gedung	4.471.000.000	5.611.000.000
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	1.895.000.000	3.175.000.000
17	Program Penyelenggaraan Jalan	59.466.873.105	95.602.854.080
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000
19	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000	950.000.000
20	Program Pengembangan Perumahan	356.980.000	364.180.000
21	Program Kawasan Permukiman	1.563.700.000	3.449.300.000
22	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	418.020.000	475.820.000
23	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	7.791.300.000	24.640.612.470
24	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	3.397.853.200	4.808.366.417
25	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	70.000.000	170.000.000
26	Program Penanggulangan Bencana	921.900.000	1.307.146.330
27	Program Pemberdayaan Sosial	354.200.000	354.200.000
28	Program Rehabilitasi Sosial	380.642.000	431.642.000
29	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	8.574.127.200	8.983.451.325
30	Program Penanganan Bencana	207.636.000	238.311.875
31	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	24.522.000	84.522.000
32	Program Perencanaan Tenaga Kerja	6.000.000	6.077.000
33	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.442.661.400	2.834.683.862
34	Program Penempatan Tenaga Kerja	20.000.000	24.889.800
35	Program Hubungan Industrial	10.000.000	25.000.000
36	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	111.033.000	260.584.450
37	Program Perlindungan Perempuan	82.718.000	82.718.000
38	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	16.685.000	16.685.000
39	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	2.195.000	2.195.000
40	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	61.416.000	102.941.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
41	Program Perlindungan Khusus Anak	28.495.000	57.418.550
42	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	15.000.000	15.000.000
43	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	200.000.000	170.000.000
44	Program Penanganan Kerawanan Pangan	30.000.000	45.000.000
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	30.000.000	30.000.000
46	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	65.000.000	65.000.000
47	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	1.250.000.000	9.177.544.000
48	Program Penatagunaan Tanah	500.000.000	761.000.000
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	171.079.000	491.079.000
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	247.411.000	247.411.000
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.218.233.000	1.866.233.000
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	15.250.000	15.250.000
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	50.830.000	50.830.000
54	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	25.000.000	40.000.000
55	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	45.000.000	81.000.000
56	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	25.000.000	25.000.000
57	Program Pengelolaan Persampahan	2.636.001.400	3.559.401.400
58	Program Pendaftaran Penduduk	56.000.000	71.000.000
59	Program Pencatatan Sipil	56.000.000	71.000.000
60	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	94.600.000	117.760.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
61	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	20.000.000	26.840.000
62	Program Penataan Desa	180.000.000	220.000.000
63	Program Peningkatan Kerjasama Desa	180.000.000	212.000.000
64	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.867.623.432	4.790.323.432
65	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	755.000.000	1.558.000.000
66	Program Pengendalian Penduduk	146.200.000	259.500.000
67	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	7.812.196.000	7.878.896.000
68	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	3.244.600.000	3.294.600.000
69	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	1.589.694.000	2.415.564.400
70	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	682.868.000	872.868.000
71	Program Aplikasi Informatika	1.178.455.000	1.533.455.000
72	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	10.000.000	10.000.000
73	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	64.000.000	89.250.000
74	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	30.000.000	54.750.000
75	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	410.170.000	410.170.000
76	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	114.000.000	129.000.000
77	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	266.441.000	391.441.002
78	Program Pengembangan UMKM	257.800.000	457.800.000
79	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5.000.000	15.000.000
80	Program Promosi Penanaman Modal	15.000.000	15.000.000
81	Program Pelayanan Penanaman Modal	30.000.000	35.000.000
82	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	432.800.000	432.800.000
83	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10.000.000	15.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
84	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	425.000.000	605.000.000
85	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.895.000.000	3.780.000.000
86	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	300.000.000	300.000.000
87	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	227.725.000	302.725.000
88	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	5.000.000	5.000.000
89	Program Pengembangan Kebudayaan	1.175.000.000	1.730.000.000
90	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	275.000.000	750.000.000
91	Program Pembinaan Sejarah	130.000.000	2.010.000.000
92	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	150.000.000	235.000.000
93	Program Pengelolaan Permuseuman	100.000.000	215.000.000
94	Program Pembinaan Perpustakaan	271.050.000	414.270.000
95	Program Pengelolaan Arsip	153.489.000	203.489.000
96	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	17.361.000	17.361.000
97	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	180.000.000	319.000.000
98	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	160.000.000	225.000.000
99	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	100.000.000	155.000.000
100	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.014.467.000	9.214.517.000
101	Program Pemasaran Pariwisata	1.410.716.810	3.160.716.810
102	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.395.683.190	2.474.633.190
103	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.013.515.000	4.528.979.688
104	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.189.100.000	4.284.880.000
105	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	341.150.000	341.150.000
106	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	2.493.432.400	0

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
107	Program Perizinan Usaha Pertanian	15.000.000	15.000.000
108	Program Penyuluhan Pertanian	728.000.000	1.628.000.000
109	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000	10.000.000
110	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	120.000.000	1.620.000.000
111	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	17.000.000	27.000.000
112	Program Pengembangan Ekspor	19.000.000	19.000.000
113	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	28.000.000	38.000.000
114	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	75.000.000	75.000.000
115	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	600.000.000	625.000.000
116	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	5.600.000	30.600.000
117	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	5.000.000	5.033.200
118	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	4.932.860.000	5.895.685.000
119	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.212.640.000	1.799.725.351
120	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	9.348.398.424	13.097.243.520
121	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.041.645.000	1.513.718.825
122	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	977.500.000	1.452.400.000
123	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	290.157.911.327	310.960.037.826
124	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	693.600.000	872.581.250
125	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.089.825.000	3.014.825.000
126	Program Kepegawaian Daerah	937.945.000	1.803.145.000
127	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	715.550.000	1.170.636.250
128	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	400.000.000	730.000.000

NO	URAIAN	ANGGARAN	
		SEBELUM	SESUDAH
129	Program Penyelenggaraan Pengawasan	856.600.000	863.766.000
130	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	380.957.500	438.057.500
131	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	787.479.640	781.585.765
132	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	5.465.159.768	6.633.913.293
133	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	663.611.679	1.274.911.679
134	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	483.067.075	505.132.575
135	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	759.089.304	1.161.765.936
136	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	580.729.000	610.729.000
137	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	1.176.000.000	20.673.000.000
138	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	174.836.000	234.836.000
139	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	60.414.000	60.414.000
140	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	3.076.736.000	2.890.736.000
	JUMLAH	1.652.761.570.399	1.876.071.394.862

B. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel. 2.9
Target Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup						
Tujuan 1 Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil						
Indikator Tujuan		: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	76	87,4	115	Sangat berhasil
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	69	73,06	105,88	Sangat berhasil
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,01	63,97	101,52	Sangat berhasil
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
Tujuan 2 Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan Bahagia						
Indikator Tujuan		Indeks Pembangunan Manusia	70,61	70,94	100,47	Sangat Berhasil
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,619	0,62	100,16	Sangat Berhasil
4.	Meningkatnya Derajat	Indeks Kesehatan	0,808	0,84	103,96	Sangat Berhasil

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	Kesehatan Masyarakat					
5.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.986.675	9.681.000	96,94	Berhasil
6.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,22	85,09	98,69	Berhasil
7.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,75	79,6	109,55	Sangat Berhasil
Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan						
Indikator Tujuan		Angka Kemiskinan	13,2	13,65	103,41	Berhasil (menurun 0,45)
8.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,32	0,352	110	Berhasil (menurun 0,052)
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan						
Indikator		% pertumbuhan ekonomi	5,24	4,46	85,11	Cukup
9.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	4,4	29,08	660,91	Sangat Berhasil
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	36.454.879	33.149.000	90,93	Berhasil
10.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.787.881.815	2.827.383.900	101,42	Sangat Berhasil
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.271.593.814	2.297.289.100	101,13	Sangat Berhasil
		PDRB Industri Pengolahan	828.378.792	889.971.700	107,44	Sangat Berhasil
11.	Meningkatnya Daya Saing	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,2	1,775	55,47	kurang

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINGKAT KEBERHASILAN
	Pariwisata					
12.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,9	9,06	114,68	Sangat Berhasil
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani						
Tujuan 5		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive				
Indikator		: Indeks Reformasi Birokrasi	69	76,34	110,64	Sangat Berhasil
13.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,9	3,34	175,79	Sangat Berhasil
		Nilai IKM	84,28	83,63	99,23	Berhasil
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	78	64,86	83,15	Cukup
15.	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	77	68,71	89,23	Cukup
		Opini BPK	WTP	N/A		Data Belum Tersedia
		Maturitas SPIP	3	3	100,00	Berhasil
16.	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	39,05	75,8	194,11	Sangat Berhasil

Sebagaimana pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa dari 5 (lima) indikator tujuan ada 3 (tiga) indikator telah tercapai dengan katagori Sangat Berhasil dengan nilai capaian lebih dari 100% dan 2 (dua) indikator telah tercapai dengan kategori Berhasil dengan nilai capaian 90-100%. Adapun dari 16 sasaran terdapat 22 (dua puluh dua) indikator sasaran, ada 12 (dua belas) indikator Sangat Berhasil, 6 (enam) Berhasil, 2 (dua) indikator cukup, 1 (satu) indikator kurang dan 1 (satu) indicator belum dapat diukur karena data belum

tersedia. Dilihat dari capaian tersebut masih terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang pencapaiannya cukup yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Nilai SAKIP dan Indeks Profesionalitas Aparatur, sedangkan 1 (satu) indikator kurang yaitu Indeks Daya Saing Pariwisata.

Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Pacitan belum mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023, meskipun demikian nilai SAKIP sudah mengalami kenaikan 0,24 dibandingkan Tahun 2022 dengan beberapa rekomendasi diantaranya:

- perlu menyusun dan memperbaiki kualitas pohon kinerja;
- memastikan penetapan target kinerja disesuaikan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya;
- mendorong komitmen pimpinan Perangkat Daerah untuk memanfaatkan aplikasi sebagai sarana pengumpulan data kinerja dan monitoring evaluasi secara efektif;
- mempercepat penggabungan aplikasi SIMOLEK dan EKIN, meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam.

Beberapa rekomendasi sudah ditindaklanjuti yaitu dengan penyempurnaan pohon kinerja, penyesuaian perjanjian kinerja dengan capaian kinerja, penggabungan dan peningkatan pemanfaatan aplikasi SIMOLEK dan EKIN.

Indeks Profesionalitas Aparatur Kabupaten Pacitan tercapai 83,15% dari target yang ditetapkan Tahun 2023. Indeks Profesionalitas ASN dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam menjalankan tugas fungsi dengan jabatannya. Nilai Indeks profesionalitas ASN Kabupaten Pacitan sebesar 52,47 merupakan kategori tingkat profesionalitas sangat rendah terdiri dari: kualifikasi pendidikan 12,58, kompetensi 11,67, kinerja 23,33 dan disiplin 4,98. Apabila dilihat dari standar maksimal kualifikasi Pendidikan 30, kompetensi 40, kinerja 30 dan disiplin 5, maka nilai yang masih rendah ada pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Diharapkan nilai tersebut dapat ditingkatkan dengan peningkatan tingkat Pendidikan, pengembangan kompetensi melalui diklat kepemimpinan, fungsional, diklat teknis, workshop/seminar dan peningkatan kinerja.

Indeks daya saing pariwisata belum mencapai target pada Tahun 2023. Dari hasil rata-rata indeks pariwisata Pacitan Tahun 2023 sebesar 1,775 yang berarti kemampuan daya saing pariwisata dalam tahap penyempurnaan. Indeks yang didapatkan Tahun 2023 menurun 12% dibandingkan dengan Tahun 2022. Penurunan indeks ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya turunnya jumlah wisatawan domestik sebesar 17% dari tahun lalu yang mana pada

Tahun 2022 sebanyak 1.566.186 jiwa menjadi 1.306.790 jiwa. Selanjutnya kualitas jalan baik di Kabupaten Pacitan tidak mengalami peningkatan dari tahun lalu yaitu sebanyak 524,87 km². Beberapa faktor lain yang mempengaruhi indeks daya saing pariwisata yaitu kenaikan yang tidak begitu signifikan seperti jumlah penduduk melek huruf, jumlah penduduk yang berpendidikan, kualitas jalan beraspal dan jumlah penduduk.

Terdapat indikator dengan capaian cukup tinggi yaitu Prosentase pertumbuhan PAD. Prosentase pertumbuhan PAD meningkat dikarenakan Peningkatan PAD itu sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi daerah maupun lain-lain PAD yang sah. Selain itu Pendapatan Kapitasi Puskesmas yang semula masuk pada komponen lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sekarang menjadi komponen Pendapatan Asli Daerah pada rekening Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah karena Puskesmas melaksanakan pengelolaan keuangan secara BLUD sehingga pendapatan kapitasnya dicatatkan sebagai Pendapatan BLUD. Peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh peningkatan ekonomi masyarakat pasca covid, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi serta pendataan ulang pajak dan objek pajak.

Angka kemiskinan dan indeks gini belum mencapai target yang ditetapkan pada Tahun 2023.meskipun mengalami penurunan namu tidak terlalu tinggi yaitu 0,45 untuk angka kemiskinan dan 0,052 untuk indeks gini. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pacitan 0,352 menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat kabupaten Pacitan relatif merata.

C.Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 2.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
		2022	2023	
Misi 1: Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup				
Tujuan 1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil				
Indikator Tujuan :	Indeks Kepuasan Layanan	87,3	87,4	0,11

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2022	2023	
		Infrastruktur (IKLI)			
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	73,99	73,06	-1,26
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	64,96	63,97	-1,52
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa					
Tujuan 2 Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia					
Indikator Tujuan		Indeks Pembangunan Manusia	69,37	70,94	1,17
3.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,612	0,62	1,31
4.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,807	0,84	4,09
5.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.184.000	9.681.000	5,41
6.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	85,09	85,09	0,00
7.	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	79,6	79,7	0,13

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2022	2023	
Tujuan 3 Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan					
Indikator Tujuan :		Angka Kemiskinan	13,8	13,65	-1,09
8.	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,338	0,352	4,14
Misi 3 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya					
Tujuan 4 Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan					
Indikator		% pertumbuhan ekonomi	5,54	4,46	-19,49
9.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	-0,21	29,08	2,29
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	30.340.000	33.149.000	9,26
10 .	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.820.635.400	2.827.383.900	0,24
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.169.782.800	2.297.289.100	5,88
		PDRB Industri Pengolahan	825.851.900	889.971.700	7,76
11 .	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	2,025	1,775	-12,35
12 .	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,41	9	22,27

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	REALISASI		%
			2022	2023	
Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani					
Tujuan 5		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive			
Indikator		Indeks Reformasi Birokrasi	69	76,34	10,64
13	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	2,34	3,34	42,74
		Nilai IKM	82,63	83,63	1,21
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	52,47	64,86	23,61
15	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	68,47	68,71	0,35
		Opini BPK	WTP	N/A	
		Maturitas SPIP	3	3	0,00
16	Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	37,1	75,8	104,31

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa capaian kinerja Tahun 2023 dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 secara keseluruhan rata-rata meningkat. Terdapat 2 (dua) indikator tujuan dan 5 (lima) indikator sasaran yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Infrastruktur dan Indeks Gini.

Pertumbuhan ekonomi merupakan besarnya tingkat kenaikan nilai PDRB ADHK. Angka Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 mencapai 5,54 %. dan Sedangkan Angka Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sebesar 4,46 atau mengalami penurunan sebesar 1,08 %. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan PDRB Tahun 2022 ke 2023 melambat

dibandingkan dengan kenaikan PDRB Tahun 2021 ke 2022, karena pada tahun 2021 ke tahun 2022 terdapat upaya pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19.

Angka Kemiskinan dengan kondisi tahun 2022 sejumlah 13,80 % dari total jumlah penduduk dan menurun pada tahun 2023 mencapai 13,65 % atau mengalami penurunan sebesar 0,15 %. Penurunan tersebut akibat adanya upaya pemulihan ekonomi masyarakat secara masif dampak pandemi covid-19 yang membuat perekonomian nasional merangkak meningkat stabil

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup. Perhitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). IKLH mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar 1,52%. Penurunan ini dipengaruhi oleh menurunnya Prosentase Status Mutu Air Permukaan sebesar 10%.

Indeks infrastruktur mengalami penurunan sebesar 1,26% dibandingkan dengan capaian Tahun 2022. Meskipun demikian capaian ini sudah memenuhi target Tahun 2023 yaitu 108,88%.

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Berdasarkan ketentuan tersebut indeks gini Kabupaten Pacitan Tahun 2023 masih dalam kategori moderat yaitu 0,352 meskipun mengalami penurunan terhadap capaian Tahun 2022.

D. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel 2.11

Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan Target RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Misi 1. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup					

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
Tujuan 1		Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Wilayah Perbatasan dan Kualitas Lingkungan Hidup Secara Akseleratif dan Adil				
Indikator Tujuan		: Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	82	87,4	6,59	Lebih tinggi
1.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian & Aksesibilitas	Indeks Infrastruktur	72	73,06	1,47	Lebih tinggi
2.	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	65,26	63,97	-1,98	
Misi 2. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-nilai Agama dan Budaya Bangsa						
	Tujuan 2	Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia yang berbudaya dan bahagia				
	Indikator Tujuan	: Indeks Pembangunan Manusia	72,66	70,94	-2,37	
1.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,639	0,62	-2,97	
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,818	0,84	2,69	Lebih tinggi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
3.	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	10.691.329	9.681.000	-9,45	
4.	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	87,11	85,09	-2,32	
5	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	73,5	79,6	8,30	Lebih tinggi
	Tujuan 3	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan				
	Indikator Tujuan	Angka Kemiskinan	12,22	13,65	7,48	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik
6	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,25	0,352	40,80	Nilai harus diturunkan untuk mendapatkan capaian yang baik
Misi 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, Serta Sektor Unggulan Lainnya						
	Tujuan 4	Meningkatnya daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi berbasis sektor unggulan				
	Indikator	% pertumbuhan ekonomi	5,25	4,46	-15,05	
1.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	2,82	29,08	931,21	Lebih tinggi
		Pendapatan per kapita (juta/orang/tahun)	42.171.572	33.149.000	-21,39	
2.	Meningkatnya	PDRB Pertanian,	2.909.003.882	2.827.383.900	-2,81 -8,95	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
	a Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Kehutanan, dan Perikanan	2.522.976.616	2.297.289.100		
		PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	900.239.686	889.971.700	-1,14	
		PDRB Industri Pengolahan	2.909.003.882	2.827.383.900	-2,81	
3.	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,5	1,775	-49,29	
4.	Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,6	9,06	19,21	Lebih tinggi

Misi 4 : Menciptakan Birokrasi Pemerintah Yang Inovatif, Profesional Dan Melayani

Tujuan 5		Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inovatif, professional dan responsive				
Indikator		Indeks Reformasi Birokrasi	70,5	76,34	8,28	Lebih tinggi
1.	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	2,5	3,34	33,60	Lebih tinggi
		Nilai IKM	85,5	83,63	-2,19	
2	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	81	64,86	-19,93	
3	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	84	68,71	-18,20	

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RPJMD	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN	KET
		Opini BPK	WTP	N/A		
		Maturitas SPIP	3	3	0,00	
4	Meningkatnya a Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	46,15	75,8	64,25	Lebih tinggi

Tahun 2023 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa capaian kinerja yang lebih tinggi dibandingkan target kinerja akhir RPJMD. Sebagaimana tabel diatas pada indikator tujuan terhadap 7 (tujuh) indicator yang melebihi target RPJMD yaitu Indeks Infrastruktur, Indeks Kesehatan, Indeks Kebahagiaan, Persentase Pertumbuhan PAD, ICOR (Incremental Capital Output Ratio), Indeks SPBE dan Persentase Desa Mandiri.

E. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Tabel 2.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Tahun 2023

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI (%)
1	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas	105,88	93,12	12,76
2	Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	101,52	97,84	3,68
3	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	100,16	95,65	4,51
4	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	103,96	85,67	18,29
5	Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	96,94	98,4	-1,46
6	Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	98,69	99,66	-0,97
7	Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	109,55	95,73	13,82
8	Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	17,33	98,14	-80,81
9	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	375,92	96,59	279,33

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%)	CAPAIAN KEUANGAN (%)	EFISIENSI (%)
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	103,33	94,51	8,82
11	Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	55,44	86,73	-31,29
12	Meningkatnya Nilai Investasi	114,68	98,76	15,92
13	Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	137,51	96,21	41,3
14	Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	83,15	85,91	-2,76
15	Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	96,41	95,22	1,19
16	Meningkatnya Kemandirian Desa	194,11	97,55	96,56
Rata-rata efisiensi				23,68

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 terjadi efisiensi anggaran. Terhadap 16 (enam belas) sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang sudah dapat diukur tingkat efisiensi anggarannya sebanyak 15 (lima belas) sasaran pembangunan, sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) sasaran belum dapat dihitung tingkat efisiensi anggarannya, disebabkan indikator kinerja sasaran dimaksud belum ada rilis resmi dari lembaga terkait. Jadi tingkat efisiensi anggaran dari 15 (lima belas) sasaran pembangunan tahun 2023 adalah rata-rata sebesar 15,03%.

F. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021–2026, tema pembangunan pada tahun 2023 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Birokrasi Dalam Rangka Penanganan Kemiskinan Melalui Pengembangan Pariwisata yang Didukung oleh Sektor Unggulan”, dengan didukung program-program prioritas dalam pencapaian pada setiap misi.

Tabel 2.13
Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian Dan Aksesibilitas

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Indeks Infrastruktur	69	73,06	105,88	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	95.602.854.080	88.692.223.611	92,77
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	95.602.854.080	88.692.223.611	92,77
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	12.634.498.800	12.486.901.395	98,83
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.463.628.800	7.383.677.100	98,93
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.170.870.000	5.103.224.295	98,69
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.449.300.000	3.231.062.060	93,67
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	3.157.300.000	2.940.225.560	93,12
				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	292.000.000	290.836.500	99,60

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	475.820.000	444.490.500	93,42
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	475.820.000	444.490.500	93,42
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	24.640.612.470	24.385.117.971	98,96
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	24.640.612.470	24.385.117.971	98,96
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.415.564.400	2.392.225.370	99,03
				Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	45.000	-	-
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	610.835.000	610.326.702	99,92
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	129.365.000	129.365.000	100,00
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	873.614.400	865.289.200	99,05
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	393.000.000	388.487.200	98,85
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	280.430.000	271.517.268	96,82
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	45.000	-	-
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	119.700.000	118.840.000	99,28

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
				Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000	-	-
				Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.500.000	8.400.000	98,82
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	19.830.275.430	17.202.580.994	86,75
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	19.830.275.430	17.202.580.994	86,75
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	5.939.400.000	5.620.011.522	94,62
				Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	5.939.400.000	5.620.011.522	94,62
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	10.293.394.430	10.279.234.026	99,86
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.293.394.430	10.279.234.026	99,86
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.794.331.140	4.511.883.778	94,11

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.794.331.140	4.511.883.778	94,11
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	5.611.000.000	5.226.451.808	93,15
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	5.611.000.000	5.226.451.808	93,15
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.175.000.000	2.979.456.872	93,84
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/ Kota	3.175.000.000	2.979.456.872	93,84
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	39.960.700	79,92
				Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50.000.000	39.960.700	79,92
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	950.000.000	933.347.062	98,25
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	411.604.000	404.195.498	98,20
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	140.000.000	133.783.700	95,56
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	100.490.000	96.651.850	96,18
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	116.126.000	113.922.295	98,10

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	364.180.000	338.385.500	92,92
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.980.000	30.839.500	96,43
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	247.200.000	231.179.000	93,52
				Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	85.000.000	76.367.000	89,84
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	65.000.000	64.349.000	99,00
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	64.349.000	99,00
				PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9.177.544.000	6.900.551.220	75,19
				Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.177.544.000	6.900.551.220	75,19
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	761.000.000	721.226.716	94,77
				Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	761.000.000	721.226.716	94,77
					200.229.774.750	186.449.460.105	93,12

Sasaran meningkatnya pemerataan Pembangunan Infrastruktur Penunjang Perekonomian dan Aksesibilitas dengan indikator indeks infrastuktur tercapai 105,88% didukung 18 (delapan belas) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan dengan total anggaran Rp. 200.229.774.750,- dan realisasi anggaran Rp. 186.449.460.105,- atau tercapai 93,12%. Program tersebut dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan Dinas Perhubungan.

Indeks Infrastruktur adalah indeks yang menunjukkan kualitas pembangunan infrastruktur ditinjau dari lima (5) aspek yaitu jalan dengan kondisi mantap, rumah tangga dengan akses terhadap air minum layak, rumah tangga dengan akses terhadap sanitasi layak, drainase dalam kondisi baik dan luas sawah beririgasi dalam kondisi baik. Capaian Indeks Infrastuktur Tahun 2023 sebesar 76,03 dengan rincian capaian pendukung sebagai berikut:

1. Jalan dengan kondisi mantap Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 sebesar 59,65% naik 1,4% dibandingkan Tahun 2022.
2. Rumah tangga dengan akses air minum layak merupakan Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan capaian 79,48.
3. Persentase jumlah rumah tangga bersanitasi layak Tahun 2023 sebesar 97,29% naik dari Tahun 2022 yaitu sebesar 96,5.
4. Prosentase drainase dalam kondisi baik sebesar 80.
5. Prosentase luas sawah beririgasi dalam kondisi baik sebesar 63,71.

Indikator dengan capaian baik adalah prosentase rumah tangga bersanitasi baik yaitu 97,29 dan indikator dengan capaian yang masih perlu mendapat perhatian yaitu Prosentase jalan dalam kondisi baik.

Tabel 2.14
Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	63,01	63,97	101,52	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	491.079.000	480.982.575	97,94
					Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	491.079.000	480.982.575	97,94
					PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	247.411.000	239.367.112	96,75
					Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	234.151.000,00	226.217.112,00	96,61
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	13.260.000,00	13.150.000,00	99,17
					PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.559.401.400	3.461.762.806	97,26
					Pengelolaan Sampah	3.559.401.400,00	3.461.762.805,55	97,26
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	1.866.233.000	1.850.458.135	99,15
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	1.866.233.000	1.850.458.135	99,15

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	15.250.000	15.076.000	98,86
					Penyimpanan sementara Limbah B3	15.250.000,00	15.076.000,00	98,86
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	50.830.000	48.297.800	95,02
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50.830.000	48.297.800	95,02
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	40.000.000	39.721.500	99,30
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	39.721.500	99,30
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	81.000.000	80.755.800	99,70
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	81.000.000	80.755.800	99,70

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	25.000.000	22.086.100	88,34
					Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	25.000.000	22.086.100	88,34
						6.376.204.400	6.238.507.828	97,84

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan gambaran secara umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan Pemerintah. Analisis dan penilaian di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meliputi 3 (tiga) komponen yaitu Indeks kualitas air (IKA), Indeks kualitas udara (IKU), dan Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL). Rekapitulasi dari ketiga komponen tersebut merupakan nilai akhir dan menjadi ranting terhadap kondisi lingkungan di sebuah kawasan yaitu kondisi Buruk, Sedang, ataupun Baik.

Tahun 2023 menggunakan indeks kualitas lahan (IKL) sesuai Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2021, perhitungannya berdasarkan data spasial. Target IKL juga disesuaikan dengan SE Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang penetapan rancangan Pembangunan jangka menengah Daerah berwawasan lingkungan.

Pada tahun 2023, indeks kualitas udara 91,89%, Indeks kualitas air 50% dan Indeks tutupan lahan 36,34%. Secara keseluruhan capaian IKLH Kabupaten pada tahun 2023 sebesar 63,97 / kategori sedang dan mencapai target RPJMD Tahun 2023.

Pencapaian Sasaran Meningkatkan Pengarusutamaan Pembangunan Berwawasan Lingkungan dengan indikator IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) didukung oleh 9 (Sembilan) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran Rp. 6.376.204.400,- terealisasi Rp. 6.238.507.828,- atau tercapai 97,84%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Tabel 2.15
Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,619	0,62	100,16	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	120.419.333.399,00	115.428.076.858,56	95,86
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.993.956.619	61.244.316.027,56	95,70
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.995.683.480,00	28.376.615.960,00	94,60
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.501.242.394,00	22.884.081.656,00	97,37
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.928.450.906,00	2.923.063.210,00	99,82
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	8.636.799.015,00	7.993.161.325,00	92,55
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.636.799.015,00	7.993.161.325,00	92,55
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	10.000.000,00	9.883.050,00	98,83
					Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000,00	9.883.050,00	98,83
					PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	414.270.000,00	412.588.050,00	99,59
					Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	393.054.000	391.712.350	99,66
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.216.000	20.875.700	98,40
						129.490.402.414,00	123.853.459.283,56	95,65

Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan lama sekolah (HLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang diharapkan dapat dialami penduduk usia 7 tahun ke atas di masa yang akan datang. Harapan lama sekolah Kabupaten Pacitan Tahun 2022 sebesar 12,68. Angka ini merupakan urutan ke 32 dari 40 Kabupaten / Kota se Jawa Timur dan masih berada dibawah angka Jawa Timur maupun nasional. Sedangkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah angka yang menggambarkan lamanya (tahun) masa sekolah yang dialami penduduk usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Pacitan sebesar 7,88. Kabupaten Pacitan berada pada posisi 17 terendah di Propinsi Jawa Timur. Angka ini lebih rendah dari angka Propinsi Jawa Timur sebesar 8,11 dan lebih rendah dari angka nasional sebesar 8,77. Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) ini disebabkan karena mayoritas Masyarakat Kabupaten Pacitan cenderung memilih untuk bekerja membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga dibandingkan dengan meningkatkan pendidikannya.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Dasar Pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan tercapai 100,16% didukung oleh 5 (lima) program dan 10 (sepuluh) kegiatan dengan anggaran Rp. 129.340.402.414 terealisasi Rp. 123.853.459.283,56 atau sebesar 95,761%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 2.16
Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,808	0,84	103,96	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	107.626.450.850	90.936.535.600	84,49
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	47.012.471.200	42.857.083.013	91,16
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.868.394.385	45.643.836.879	78,88
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	130.380.000	128.545.999	98,59
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.615.205.265	2.307.069.709	88,22
					PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.097.600.126	5.703.189.547	80,35
					Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	4.999.884	4.651.000	93,02
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	4.734.038.242	4.062.042.882	85,81

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.358.562.000	1.636.495.665	69,39
					PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.031.221.000	830.739.685	80,56
					Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	63.730.000	62.069.000	97,39
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	447.925.000	345.578.050	77,15
					Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	519.566.000	423.092.635	81,43
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.116.553.221	2.904.318.700	93,19
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.451.774.821	1.420.640.572	97,86
					Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	483.902.400	472.175.888	97,58

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.180.876.000	1.011.502.240	85,66
					PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	259.500.000	223.144.712	85,99
					Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dengan Kabupaten Kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	10.000.000	9.083.500	90,84
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	249.500.000	214.061.212	85,80
					PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	7.878.896.000	7.762.919.827	98,53
					Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.083.800.000	1.031.602.560	95,18
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	4.286.200.000	4.276.129.000	99,77
					n Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	2.236.396.000	2.199.972.867	98,37
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan berKB	272.500.000	255.215.400	93,66

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	3.294.600.000	3.276.283.900	99,44
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	3.294.600.000	3.276.283.900	99,44
						130.304.821.197	111.637.131.971	85,67

Derajat Kesehatan merupakan gambaran profil Kesehatan pada suatu daerah yang diukur dengan menggunakan indikator Indeks Kesehatan. Indeks Kesehatan diukur dari angka harapan hidup. Semakin tinggi angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan status Kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan Kesehatan yang akan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Pacitan tahun 2023 berdasarkan Berita Resmi Statistik yang diterbitkan BPS Kabupaten Pacitan adalah 74,58. Selama periode 2020 hingga 2023 AHH Kabupaten Pacitan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Pacitan adalah sebesar 74,01 dan pada tahun 2023 mencapai 74,58, meningkat sebesar 0,57. Pada tahun 2023 AHH ini mengalami peningkatan 0,23 dibandingkan tahun sebelumnya.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dengan indikator Indeks Kesehatan tercapai 103,96% didukung oleh 7 (tujuh) program dengan anggaran Rp. 130.304.821.197,00 terealisasi 85,67%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan beserta unit kerja dibawahnya yaitu Rumah Sakit Dr. Darsono dan 24 (Dua Puluh Empat) Puskesmas dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Tabel 2.17
Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	9.986.675	9.681.000	96,94	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	27.000.000	26.568.500	98,40
					Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	27.000.000	26.568.500	98,40

Daya beli masyarakat adalah seberapa tinggi tingkat kemampuan konsumen atau masyarakat luas dalam membeli serta mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Faktor penentu daya beli masyarakat adalah harga barang serta jasa. Kemampuan daya beli masyarakat akan cenderung menurun ketika harga-harga produk dan jasa mengalami kenaikan. Namun sebaliknya, kemampuan beli masyarakat nantinya akan meningkat apabila harga-harga tersebut menurun. Untuk mengukur daya beli masyarakat digunakan indikator pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Kabupaten Pacitan Tahun 2023 Rp. 9.681.000,00 mengalami kenaikan 5,41% dari Tahun 2022 yang menandakan bahwa daya beli masyarakat Pacitan meningkat.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemampuan Daya Beli Masyarakat dengan indikator Pengeluaran per kapita tercapai 96,94% didukung oleh 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 27.000.000,00 terealisasi 98,40%. Program

tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja. Meskipun anggaran yang dikelola dalam peningkatan kemampuan daya beli Masyarakat hanya terbatas satu program, namun dalam pencapaiannya dipengaruhi faktor-faktor lain seperti ketersediaan stok bahan pokok dan penting, fluktuasi harga, pertumbuhan UMKM dan pendapatan masyarakat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain maupun Masyarakat.

Tabel 2.18
 Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	86,22	85,09	98,69	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	260.584.450	260.023.974	99,78
					Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	9.982.000	99,82
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	250.584.450	250.041.974	99,78
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	82.718.000	82.498.700	99,73
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.518.000	35.298.700	99,38

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah	47.200.000	47.200.000	100,00
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	16.685.000	16.651.000	99,80
					Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.685.000	16.651.000	99,80
					PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.195.000	2.190.000	99,77
					Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.195.000	2.190.000	99,77
					PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	102.941.000	102.914.400	99,97
					Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	102.941.000	102.914.400	99,97
					PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	57.418.550	56.512.583	98,42
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.318.550	21.484.583	96,26

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	35.100.000	35.028.000	99,79
						522.542.000	520.790.657	99,66

Kesetaraan dan keadilan gender pada prakteknya merujuk pada tidak adanya perbedaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dijamin oleh perundangundangan yang dihasilkan oleh negara maupun lingkungan bermasyarakat. Jaminan tidak adanya perbedaan dalam status dan kedudukan perempuan dan laki-laki dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi partisipasi dalam program pembangunan terutama dalam peningkatan kualitas hidup melalui program peningkatan kapabilitas atau kemampuan dasar. Program tersebut mencakup berbagai pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan kemudahan akses ekonomi yang diberikan oleh pemerintah. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pacitan Tahun 2023 85,09 mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 0,26%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Peran Gender dalam Pembangunan dengan indikator IPG (Indeks Pembangunan Gender) tercapai 98,69% didukung oleh 6 (enam) program dan 9 (sembilan) dengan anggaran Rp. 522.542.000,00 terealisasi 99,66%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak.

Tabel 2.19
Sasaran Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kebahagiaan Masyarakat	Indeks Kebahagiaan	72,75	79,6	109,42	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.730.000.000	1.721.512.129	99,51
					Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	1.730.000.000	1.721.512.129	99,51
					PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.808.366.417	4.732.565.629	98,42
					Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	864.400.000	863.627.900	99,91
					Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan	3.938.966.417	3.864.256.229	98,10
					Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.000.000	4.681.500	93,63
					PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	354.200.000	350.542.000	98,97
					Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	93.420.000	91.372.000	97,81

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	22.825.000	22.370.500	98,01
					Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	215.000.000	214.723.000	99,87
					Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	22.955.000	22.076.500	96,17
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	8.983.451.325	8.051.655.234	89,63
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	8.983.451.325	8.051.655.234	89,63
					PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	170.000.000	169.919.470	99,95
					Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.417.000	145.396.470	99,99
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.583.000	24.523.000	99,76

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.307.146.330	1.278.360.048	97,80
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	125.072.500	124.791.000	99,77
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	651.835.080	643.839.525	98,77
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	352.738.750	340.266.303	96,46
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	177.500.000	169.463.220	95,47
					PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	431.642.000	422.542.000	97,89
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	325.321.000	320.264.500	98,45
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	106.321.000	101.986.400	95,92
					PROGRAM PENANGANAN BENCANA	238.311.875	204.003.475	85,60
					Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	121.508.375	91.002.725	74,89
					Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	116.803.500	113.000.750	96,74

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	84.522.000	82.872.055	98,05
					Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	84.522.000	82.872.055	98,05
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	605.000.000	602.420.150	99,57
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	605.000.000	602.420.150	99,57
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.780.000.000	3.761.825.032	99,52
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000,00	299.317.050,00	99,77
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi	3.330.000.000,00	3.314.814.742,00	99,54
					Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi	150.000.000,00	147.693.240,00	98,46
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	300.000.000	100,00
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	300.000.000	300.000.000	100,00
					PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	750.000.000	741.892.805	98,92

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota	750.000.000	741.892.805	98,92
					PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.010.000.000	995.946.449	49,55
					Pembinaan sejarah lokal dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	2.010.000.000	995.946.449	49,55
					PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	235.000.000	208.550.102	88,74
					Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten/kota	235.000.000	208.550.102	88,74
					PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	215.000.000	213.545.190	99,32
					Pengelolaan museum kabupaten/kota	215.000.000	213.545.190	99,32
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.274.911.679	1.245.474.975	97,69
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.274.911.679	1.245.474.975	97,69
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	610.729.000	607.977.166	99,55
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	610.729.000	607.977.166	99,55

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	20.673.000.000	20.670.746.391	99,99
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	20.673.000.000	20.670.746.391	99,99
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	234.836.000	232.894.000	99,17
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	234.836.000	232.894.000	99,17
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	60.414.000	59.787.550	98,96

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	60.414.000	59.787.550	98,96
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.890.736.000	2.884.847.632	99,80
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosia	2.890.736.000	2.884.847.632	99,80
						51.747.266.626	49.539.879.482	95,73

Indeks Kebahagiaan adalah ukuran tingkat kebahagiaan penduduk, Sebagai ukuran kesejahteraan subjektif. Semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan menunjukkan kondisi yang semakin bahagia. Pola yang searah bila indeks disandingkan dengan data indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan telah berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan subjektif. Indeks kebahagiaan Tahun 2023 tercapai 109,55% didukung 22 (dua puluh dua) program dan 35 (tiga puluh lima) dengan anggaran sebesar Rp. 51.747.266.626,00 terealisasi 95,73%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Satpol-PP, Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tabel 2.20
Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat	Indeks Gini	0,3	0,352	117,33	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	170.000.000	167.102.620	98,30
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	20.000.000,00	19.790.500,00	98,95
					Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	94.820.000,00	93.315.300,00	98,41
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	55.180.000,00	53.996.820,00	97,86
					PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	15.000.000	14.247.770	94,99
					Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000,00	14.247.770,00	94,99

					PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	45.000.000	44.665.190	99,26
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	45.000.000,00	44.665.190,00	99,26
					PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	30.000.000	29.160.250	97,20
					Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.160.250	97,20
						260.000.000	255.175.830	98,14

Indeks Gini menggambarkan tingkat Pemerataan Pendapatan Masyarakat/ tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna. Indeks Gini Kabupaten Pacitan 0,352 menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat kabupaten Pacitan relatif merata. Dibandingkan dengan tahun lalu menurun 4,14% yang menandakan adanya sedikit ketimpangan pendapatan.

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat dengan Indeks Gini tercapai 117,33% didukung oleh 4 (empat) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 260.000.000,00 terealisasi 98,14%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian sebagai penyumbang kontribusi terbesar PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel 2.21
Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan PAD	4,4	29,08	660,91	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.014.825.000	3.007.886.836	99,77
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.014.825.000	3.007.886.836	99,77
	Pendapatan per kapita (juta/orang/ tahun)	36.454.879	33.149.000	90,93	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	457.800.000	456.739.812	99,77
					Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	457.800.000	456.739.812	99,77
					PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	391.441.002	388.282.550	99,19
					Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	391.441.002,00	388.282.550	99,19
					PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	6.077.000	6.077.000	100,00

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	6.077.000	6.077.000	100,00
					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.834.683.862	2.737.255.195	96,56
					Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.834.683.862	2.467.955.485	
					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	24.889.800	23.931.100	96,15
					Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	24.889.800	23.931.100	96,15
					PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	25.000.000	24.759.500	99,04
					Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.759.500	
					PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	10.000.000	9.955.675	99,56
					Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000,00	9.955.675	99,56
					PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	89.250.000	89.035.125	99,76

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	89.250.000,00	89.035.125	99,76
					PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	54.750.000	54.498.330	99,54
					Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	54.750.000	54.498.330	99,54
					PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	410.170.000	409.427.016	99,82
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	205.085.000,00	204.720.278	99,82
					Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	205.085.000,00	204.706.738	99,82
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	129.000.000	128.708.112	99,77
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	129.000.000	128.708.112	99,77

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					dalam Daerah Kabupaten/Kota			
					PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	5.033.200	2.983.200	59,27
					Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5.033.200	2.983.200	59,27
						7.452.919.864	7.339.539.451	96,59

Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dan Pendapatan Masyarakat dengan indikator Prosentase Pertumbuhan PAD tercapai 660,91% didukung oleh 1 (satu) program dengan anggaran Rp. 3.014.825.000 terealisasi 99,77%. Program tersebut dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah. Pertumbuhan PAD bersumber dari pajak daerah 25,30%, retribusi daerah 16,12%, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1,73 dan lain-lain PAD yang sah 56,84%.

Sedangkan Indikator pendapatan perkapita tercapai 90,93 % dari target tahun 2023. Indikator ini didukung oleh 10 (sepuluh) program dan 14 (empat belas) kegiatan dengan anggaran 7.452.919.864 terealisasi 98,51%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian.

Tabel 2.22
Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.787.881.915	2.827.383,94	0,10	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4.528.979.688	4.284.606.292	94,60
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.113.909.688	3.029.855.832	97,30
					Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	530.000.000	488.498.751	92,17
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	885.070.000	766.251.709	86,58
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	4.284.880.000	4.171.434.387	97,35
					Pengembangan Prasarana Pertanian	147.416.000	123.959.560	84,09
					Pembangunan Prasarana Pertanian	4.137.464.000	4.047.474.827	97,83
					PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	1.628.000.000	1.361.034.177	83,60

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.628.000.000	1.361.034.177	83,60
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	225.000.000	222.347.500	98,82
					Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	135.000.000	133.493.500	98,88
					Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	90.000.000	88.854.000	98,73
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	319.000.000	317.006.232	99,37
					Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	60.000.000	58.306.000	97,18
					Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	196.500.000	196.428.000	99,96
					Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	62.500.000	62.272.232	99,64
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	155.000.000	154.079.900	99,41
					Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	25.000.000	24.826.000	99,30

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	60.000.000	59.717.100	99,53
					Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000	69.536.800	99,34
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	341.150.000	308.610.444	90,46
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.353.900	97,42
					Pengelolaan Pelayanan Jasa laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	316.150.000	284.256.544	89,91
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	15.000.000	13.590.210	90,60
					Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.590.210	90,60
						22.979.019.376	21.651.828.073	94,22

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.271.593.814	2.297.289,06	0,10	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	75.000.000	70.795.000	94,39
					Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	75.000.000	70.795.000	94,39
					PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.000.000	9.585.100	95,85
					Penerbitan Tanda Daftar Gudang	10.000.000	9.585.100	95,85
					PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.620.000.000	1.592.618.460	98,31
					Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	359.554.485	336.552.660	93,60
					PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	19.000.000	18.980.000	99,89
					Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.000.000	18.980.000	99,89
					PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	38.000.000	37.608.200	98,97
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	38.000.000	37.608.200	98,97
						2.263.554.485	2.203.107.720	97,33

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
	PDRB Industri Pengolahan	828.378.792	889.971,69	0,11	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	625.000.000	558.890.024	89,42
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	625.000.000	558.890.024	89,42
					ROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	30.600.000	30.008.300	98,07
					Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	30.600.000	30.008.300	98,07
						1.311.200.000	1.177.796.648	89,83
					JUMLAH TOTAL	13.914.609.688	13.151.194.226	94,51

Sasaran meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan dilihat melalui angka PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dan PDRB Industri Pengolahan

Struktur perekonomian Pacitan pada tahun 2023 masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Lapangan usaha tersebut menyumbang 27 persen PDRB Kabupaten Pacitan. Lapangan Usaha dengan kontribusi besar selanjutnya adalah Lapangan Usaha Lainnya sebesar 21,45% Perdagangan Besar dan Eceran dan Reperasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,99 persen; Konstruksi sebesar 14,92 persen; Industri Pengolahan sebesar 7,35 persen; Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,59 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 5,51 persen.

Program yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 15 (lima belas) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dengan anggaran Rp. 655.600.000 terealisasi 89,83%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian dan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja.

Tabel 2.23
Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pariwisata

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Indeks Daya Saing Pariwisata	3,2	1,775	55,47	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	9.214.517.000	7.545.875.721	81,89
					Pengelolaan daya tarik wisata Kabupaten/Kota	7.611.062.280,00	6.021.116.123,00	79,11
					Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	373.967.720,00	364.605.230,00	97,50
					Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	1.229.487.000,00	1.160.154.368,00	94,36
					PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.160.716.810	3.081.890.887	97,51
					Pemasaran Pariwisata dalam dan Luar Negeri, Dayatarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Pacitan	3.160.716.810	3.081.890.997	97,51
					PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.474.633.190	2.356.586.674	95,23
					Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	2.474.633.190,00	2.356.586.674,00	95,23
						27.225.100.810	23.612.120.000	86,73

Indeks daya saing pariwisata belum mencapai target pada Tahun 2023. Dari hasil rata-rata indeks pariwisata Pacitan Tahun 2023 sebesar 1,775 yang berarti kemampuan daya saing pariwisata dalam tahap penyempurnaan. Indeks yang didapatkan Tahun 2023 menurun 12% dibandingkan dengan Tahun 2022. Sedangkan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran ini sebanyak 3 (tiga) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 14.849.867.000,00 terealisasi 87,44%. Program tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga.

Tabel 2.24
Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Nilai Investasi	ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	7,9	9,06	114,7	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	15.000.000	14.753.000	98,35
					Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	15.000.000	14.753.000	98,35
					PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	15.000.000	14.781.000	98,54
					Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.781.000	98,54
					PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	432.800.000	427.191.000	98,70
					Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	432.800.000	427.191.000	98,70
					PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	35.000.000,00	34.835.100,00	99,53
					Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	35.000.000,00	34.835.100,00	99,53
					PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	15.000.000	14.955.000	99,70

					Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.955.000	99,70
						1.010.600.000	998.075.200	98,76

Parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output), dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran). Semakin tinggi angka ICOR menunjukkan bahwa efisiensi investasi semakin rendah. Nilai ICOR Tahun 2023 tercapai 114,7% didukung oleh 5 (lima) program dengan anggaran Rp. 512.800.000,00 terealisasi 98,77%.

Tabel 2.25
Sasaran Meningkatkan Layanan Publik Yang Inovatif

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif	Indeks SPBE	1,9	3,34	175,79	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	1.533.455.000	1.518.270.231	99,01
					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.238.435.000	1.226.029.276	99,00
					Pengelolaan egovernment Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	295.020.000	292.240.955	99,06
					PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	872.868.000	858.466.995	98,35

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	872.868.000	858.466.995	98,35
					PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	302.725.000	299.028.350	98,78
					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	302.725.000	299.028.350	98,78
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	5.000.000	4.958.000	99,16
					Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.000.000	4.958.000	99,16
						1.841.180.000	1.822.256.581	98,97
	Nilai IKM	84	84,64	100,76	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	117.760.000	115.869.393	98,39
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	15.000.000,00	14.493.920,00	96,63
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	84.000.000,00	82.726.683,00	98,48
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	18.760.000,00	18.648.790,00	99,41

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	781.585.765	761.327.590	97,41
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	493.059.017,00	476.515.840,00	96,64
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	288.526.748,00	284.811.750,00	98,71
					-			
					PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	71.000.000	69.396.325	97,74
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk	35.000.000,00	34.039.200,00	97,25
					Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	36.000.000,00	35.357.125,00	98,21
					PROGRAM PENCATATAN SIPIL	71.000.000	68.459.403	96,42
					Pelayanan Pencatatan Sipil	41.365.000,00	41.231.838,00	99,68
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	29.635.000,00	27.227.565,00	91,88
					PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	26.840.000	25.515.505	95,07
					Penyusunan Profil Kependudukan	26.840.000,00	25.515.505,00	95,07
					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	5.895.685.000	5.596.245.257	94,92
					Administrasi Tata Pemerintahan	580.000.000,00	573.612.796,00	98,90
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.617.860.000,00	4.338.827.966,00	93,96
					Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	575.000.000,00	561.282.666,00	97,61
					Fasilitasi Kerja Sama Daerah	122.825.000,00	122.521.829,00	99,75

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	13.097.243.520	12.850.364.202	98,12
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	744.931.600,00	739.460.830,00	99,27
					Pembahasan Kebijakan Anggaran	39.361.510,00	38.643.995,00	98,18
					Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan	1.235.609.810,00	1.206.069.855,00	97,61
					Peningkatan Kapasitas DPRD	2.300.379.900,00	2.215.141.400,00	96,29
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.318.919.570,00	3.225.903.253,00	97,20
					Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	8.191.190,00	7.659.050,00	93,50
					Fasilitasi Tugas DPRD	5.449.849.940,00	5.417.485.819,00	99,41
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	739.460.830	455.530.150	61,60
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	739.460.830	455.530.150	61,60
						20.800.575.115	19.942.707.825	95,88
					JUMLAH TOTAL	23.514.623.115	22.623.431.401	96,21

Sasaran meningkatnya layanan public yang innovative terdapat 2 (dua) indikator yaitu indeks SPBE dan Nilai IKM. Hasil evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2023 adalah 3,34 dengan predikat cukup. Hasil ini lebih tinggi dari angka yang ditargetkan yaitu 1,9.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2023 didapatkan dari survey elektronik “SuKMa-e”Pemerintah Kabupaten Pacitan telah mereplikasi inovasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara elektronik (SuKMa-e) dengan nilai 84,64 atau masuk kategori baik. Dengan diterapkannya SuKMa-e tersebut diharapkan kegiatan survei ini menjadi lebih efektif dan efisien karena penerima layanan tidak perlu mengisi kuesioner yang berupa lembaran kertas. Dalam melaksanakan survei, penerima layanan cukup men-scan QR Code SuKMa-e yang telah terpasang.

Sasaran meningkatnya Layanan Publik Yang Inovatif didukung oleh 12 (dua belas) program dan 27 (dua puluh tujuh) kegiatan dengan anggaran Rp. 23.514.623.115,00 terealisasi 96,21% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Tabel 2.26
Sasaran Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Pengembangan Kapasitas (ASN) Pemerintah Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur	78	64,86	83,15	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.170.636.250	983.045.278	83,98
					Pengembangan Kompetensi Teknis	854.581.250,00	739.978.778,00	

					Sertifikasi, kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	316.055.000,00	243.066.500,00	
					PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.803.145.000	1.571.804.715	87,17
					Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	930.200.000,00	786.988.808,00	
					Mutasi dan Promosi ASN	682.945.000,00	610.634.926,00	
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	190.000.000,00	174.180.981,00	
						2.973.781.250	2.554.849.993	85,91

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara tercapai 83,15% dari target yang ditetapkan pada tahun 2023. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah angka statistik yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara untuk menggambarkan kualitas Aparatur berdasarkan 4 dimensi antara lain: kualifikasi Pendidikan, Kinerja ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Kedisiplinan ASN yang masing – masing dimensi mempunyai bobot yang berbeda. Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara sebesar 64,86 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 52,47. Adapun Nilai indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Pacitan masuk kategori Rendah, dengan rincian nilai masing – masing dimensi antara lain, Dimensi Kualifikasi 21.36 dari nilai maksimal, Dimensi Kinerja 24.9, Dimensi Kompetensi 13.57 dan Disiplin 5. Secara detail bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

NO	DIMENSI	NILAI	CAPAIAN
----	---------	-------	---------

		NILAI	BOBOT	
1	KUALIFIKASI	21.36	25	85,44%
2	KOMPETENSI	13.57	40	33,93%
3	KINERJA	24.9	30	83,00%
4	DISIPLIN	5	5	100,00%
		64,83	100	64,83%

Secara Capaian kelemahan terdapat pada dimensi Kompetensi yang masih sangat rendah nilainya, hal ini dikarenakan banyak faktor antara lain:

1. Minimnya kesadaran pengembangan kompetensi khususnya pada jabatan pelaksana
2. Belum meratanya pengembangan kompetensi untuk ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan
3. Riwayat Pengembangan Kompetensi yang sangat sulit didapatkan sehingga berpengaruh pada data yang di unggah ke SIASN sehingga mempengaruhi nilai.

Sasaran ini didukung oleh 2 (dua) program dan 5 (lima) kegiatan dengan anggaran Rp. 2.973.781.250,00 terealisasi 85,91% dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Tabel 2.27
Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan	Nilai SAKIP	77	68,71	89,23	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.513.718.825	1.487.614.508	98,28
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	945.764.675,00	935.508.888,00	98,92
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	262.954.150,00	256.914.000,00	97,70
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	305.000.000,00	295.191.620,00	96,78
					PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.452.400.000	1.433.851.045	98,72
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	727.400.000,00	719.708.020,00	98,94
					Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	412.011.000,00	402.193.025,00	97,62

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	312.989.000,00	311.950.000,00	99,67
					PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	310.960.037.826	305.464.882.130	98,23
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.548.531.000,00	1.527.855.322,00	98,66
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	503.400.000,00	499.707.943,00	99,27
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	402.650.000,00	397.773.340,00	98,79
					Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	308.055.456.826,00	302.589.545.525	98,23
					Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	100,00
					PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	730.000.000	729.168.980	99,89
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	189.600.000,00	189.179.200,00	99,78
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	323.200.000,00	322.985.780,00	99,93
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	217.200.000,00	217.004.000,00	99,91
					PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	203.489.000	196.808.060	96,72

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	184.386.500,00	177.883.760,00	96,47
					Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	19.102.500,00	18.924.300,00	99,07
					PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	17.361.000	16.625.000	95,76
					Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	17.361.000,00	16.625.000,00	95,76
						314.877.006.651	309.328.949.723	98,24
	Opini BPK	WTP	WTP	100	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	863.766.000	862.228.414	99,82
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	624.266.000,00	623.054.664,00	99,81
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	239.500.000,00	239.173.750,00	99,86
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	438.057.500	425.853.500	97,21
					Pendampingan dan Asistensi	438.057.500,00	425.853.500,00	97,21
					PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	872.581.250	851.607.404	97,60
					Pengelolaan Barang Milik Daerah	872.581.250	851.607.404	97,60

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.799.725.351	1.646.214.914	91,47
					Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	325.000.000,00	310.394.449,00	95,51
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	500.000.000,00	446.108.746,00	89,22
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	512.640.000,00	509.784.370,00	99,44
					Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	462.085.351,00	381.191.978,00	82,49
						3.974.130.101	3.785.904.232	95,26
	Maturitas SPIP	3	3	100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	960.851.971.400	905.404.000.831	94,23
					JUMLAH TOTAL	1.279.703.108.152	1.218.518.854.786	95,22

Sasaran Terwujudnya Birokrasi Yang Akuntabel dan Transparan terdapat 3 (tiga) indikator yaitu nilai sakip, Opini BPK dan Maturitas SPIP. Nilai SAKIP Tahun 2023 sebesar 68,71 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2022. Terdapat beberapa rekomendasi terkait perencanaan dan mekanisme evaluasi internal. Hasil Opini BPK Tahun 2023 belum dirilis. Maturitas SPIP berada pada tingkat 3 Pemerintah Daerah telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik, namun

evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Sasaran ini didukung oleh 11 (sebelas) program dan 25 (dua puluh lima) dengan anggaran Rp. 1.279.703.108.152,- terealisasi 95,22% dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah.

Tabel 2.28
 Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN	REALISASI	% CAPAIAN
Meningkatnya Kemandirian Desa	Persentase Desa Mandiri	39,05	75,8	194,11	PROGRAM PENATAAN DESA	220.000.000	218.940.822	99,52
					Penyelenggaraan Penataan Desa	220.000.000	218.940.822	99,52
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	212.000.000	211.715.050	99,87
					Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	212.000.000	211.715.050	99,87
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4.790.323.432	4.584.171.770	95,70

					Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.790.323.432	4.584.171.770	95,70
					PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.558.000.000	1.553.309.782	99,70
					Pemberdayaan Lembaga Lemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.558.000.000	1.553.309.782	99,70
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	6.633.913.293	6.538.476.036	98,56
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.633.913.293	6.538.476.036	98,56
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1.161.765.936	1.111.903.331	95,71
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.161.765.936	1.111.903.331	95,71

						14.576.002.661	14.218.516.791	97,55
--	--	--	--	--	--	----------------	----------------	-------

Desa Mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Sasaran Meningkatnya Kemandirian Desa dengan indikator prosentase desa mandiri tercapai 101,12% didukung oleh 6 (enam) program dan 6 (enam) kegiatan dengan anggaran Rp. 14.576.002.661,- terealisasi 97,55%. Program ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur	DIPA REVISI 3 Nomor : DIPA-018.04.4.059 179 / 2021 Tanggal 3 Mei 2021	Program Penilaian Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri								
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura : 1) Sarana Pemasaran 1 keg	Kab. Pacitan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	83.450.000	83.420.000	99,96	1 Keg	100	
5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	SP DIPA-018.03.4.059 178/2022 Revisi 5 Tanggal 3 Juni 2022	Program Ketersediaan ,Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas								
			Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	a.Kab.Pacitan b.Power Thresher 10	Dinas Ketahanan Pangan dan	17.600.000	17.400.000	98,86	a. 1 Keg b. 13 Unit	100	

	Provin si Jawa Timur		a. Pengawalan, Pembinaan, Monev Sarana Pascapanen TP 1 keg b. Sarana pasca panen tanaman pangan 13 unit	unit sebagai berikut : Kebonagung 2 unit , Bandar 2 unit, Tulakan 1 unit, Nawangan 2 unit, Donorojo 2 unit, Tegalombo 1 unit) Corn sheller 3 unit (kec Tegalombo 2 unit, Pringkuku 1 unit)	Pertanian Kabupaten Pacitan						
6	Dinas Pertani	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana								

	an dan Ketaha nan Panga n Provin si Jawa Timur		Pertanian								
			Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia a. Bantuan Benih Padi Inbrida 3.000 (75 kg) b. Bantuan Benih Jagung 100 ha (1.500 kg)	a. 12 Kecamatan b. Kec.Punung dan Bandar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	100	a.3.000 (75 kg) b.100 ha (1.500 kg)	100	
7	Dinas Pertani an dan Ketaha nan Panga n Provin si	-	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian								

	Jawa Timur										
			Pengelolaan Produksi Aneka Kacang dan Umbi TP Bantuan Benih Pupuk Organik non Subsidi (Ubi Kayu) 50 ha (50.000 kg)	Kec Arjosari, Pringkuku, Tegalombo, Sudimoro	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	(Diberikan dalam bentuk Barang)	(Diberikan dalam bentuk Barang)	100	50 ha (50.000 kg)	100	

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2023 **tidak mendapatkan** penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diberikan melalui Tugas Pembantuan.

3.1. Urusan Pemerintahan Yang Mendapatkan Bantuan

Bantuan penyelenggaraan urusan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ke Pemerintah Kabupaten Pacitan pada tahun anggaran 2023 meliputi beberapa Program antara lain :

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas
2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
4. Program Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim
5. Program Pupuk Menuju Pertanian Organik
6. Program Kinerja Pembangunan
7. Program Sapi Kerbau Komoditi Andalan Negeri
8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)
9. Program Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak Tahun Anggaran 2023
10. Program Pengembangan Wirausahawan Muda Perdesaan Di Sektor Pertanian

3.1.1. Identifikasi Bantuan Yang Diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

1. Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a. Dasar Hukum : SP DIPA – 018.03.5.059178/2023 tanggal 27 Desember 2022 (Revisi ke-1)
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur;
- c. Perangkat Daerah Pelaksana Bantuan : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.1
Realisasi Kegiatan Pelayanan Informasi Pasar
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1.	Pelayanan Informasi Pasar (Survey harga tanaman pangan di tingkat petani dan pedagang)	1 paket	Kabupaten Pacitan	14.480.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. 14.480.000
 - Realisasi : Rp. 14.480.000

2. Program: Ketersediaan Akses Dan Konsumsi Pangan Berkualitas

- a. Dasar Hukum : Surat Keputusan PPK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Nomor : I.PPK.4/SK/483/VI/2023 Tanggal 1 Juli 2023 perihal Penerimaan Bantuan dalam rangka Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan

- Tanaman Obat melalui Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahap II (Dua) Tahun Anggaran 2023.
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Direktorat Jenderal Hortikultura
 - c. Penerima Bantuan : Kelompok Wanita Tani;
 - d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.2
Realisasi Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Pekarangan Pangan Lestari	5 KWT	KWT Gayuh Sehat 1	Rp 50.000.000
			Kec. Arjosari,	Rp 50.000.000
			KWT Jamu Segar	Rp 50.000.000
			Manis Kec. Tulakan,	Rp 50.000.000
			KWT Lumbu Indah	Rp 50.000.000
			Kec. Tulakan,	Rp 50.000.000
			KWT Melati Kec.	Rp 50.000.000
			Nawangan,	Rp 50.000.000
			KWT Rejo Mulyo Kec.	Rp 50.000.000
			Pacitan	
Jumlah				Rp 250.000.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber dana	:	APBN Tahun Anggaran 2023
Jumlah Anggaran	:	Rp. 250.000.000
Realisasi	:	Rp. 250.000.000

3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum :
 - 1. Surat Keputusan PPK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Nomor: I.PPK.4/SK/220/IV/2023 Tanggal 11 April 2023 Tentang Penerimaan Bantuan Sarana Produksi dan Fasilitas Kawasan Aneka Cabai Tahap II (Dua) dalam rangka Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Tahun anggaran 2023
 - 2. Surat Keputusan PPK Direktorat Sayuran dan Tanaman Obat Nomor: I.PPK.4/SK/353/V/2023 Tentang Penerima

Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Kawasan Jahe Tahap II
(dua) Tahun Anggaran 2023

- b. Instansi Pemberi Bantuan : Direktorat Jenderal Hortikultura
- c. Penerima Bantuan : Gapoktan dan Poktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.3
Realisasi Kegiatan Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Pengembangan Kawasan Cabai	5 Ha - Benih Cabai besar 100 sc, - Mulsa 80 roll, - Asam Humat 70 lt, - NPK 2200 kg	Gapoktan Karya Tani Desa Tambakrejo, Kec. Pacitan	Transfer Barang
		10 Ha - Benih Cabai besar 70 sc - Benih cabai rawit 30 sc, - Mulsa 80 roll, - Asam humat 70 lt, - NPK 2200 kg	Poktan Margo Makmur IV Desa Gunungsari, Kec. Arjosari	Transfer Barang
2	Pengembangan Kawasan Obat	10 Ha - NPK 1500 kg, - PHC 50 lt, - Asam humat 80 kg, - benih jahe 2500 kg	Poktan Eras Sobo III Desa Wonosobo, Kec. Ngadirojo	Transfer Barang
Jumlah				-

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. -
 - Realisasi : Rp. -

4. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum : SP DIPA 018.03.4.059178/2023 Tanggal 24 November 2023 (Revisi ke 08)
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.4
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Benih Padi Inbrida	1.500 Ha - Benih Padi Ciherang 37.500 kg	146 poktan di 9 Kecamatan (Pringkuku, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Tulakan, Ngadirojo)	Transfer Barang
Jumlah				-

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBN Prov Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. -
 - Realisasi : Rp. -

5. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum :
 - SP DIPA 018.03.1.238251/2023 Tanggal 24 Nopember 2023 (Revisi ke 13)
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dirjen Tanaman Pangan;
- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.5
Realisasi Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Budidaya Jagung	500 Ha	48 poktan di 3 Kecamatan (Donorojo, Punung, Bandar)	Transfer Barang
	- Benih NK 212	7.500 kg		
	- NPK	50.000 kg		
	- Pupuk Hayati	1.500 lt		
	- Herbisida	1.000 lt		
Jumlah				-

Tabel 3.6
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman
Serealia Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Benih Padi Inbrida	500 Ha Benih Padi Pak Tiwi-1 12.500 kg	47 poktan di 7 Kecamatan Punung, Pacitan, Kebonagung, Arjosari, Bandar, Tegalombo, Tulakan	Transfer Barang
Jumlah				-

Tabel 3.7
Realisasi Kegiatan Budidaya Jagung Wilayah Khusus
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung	725 Ha - Benih Pertiwi 2 10.875 kg, NPK 72.500 kg, pupuk hayati 2.175 lt, pestisida 4.350 sc	55 poktan di Kecamatan (Arjosari, Tegalombo, Tulakan, Sudimoro)	Transfer Barang
Jumlah				-

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana

Jumlah Anggaran

Realisasi

:

:

:

APBN

-

-

6. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum :
- SP DIPA 018.03.1.238251/2023

Tanggal 24 Nopember 2023

(Revisi ke 13)
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dirjen Tanaman Pangan;
- c. Penerima Bantuan : Poktan;

- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.8				
Realisasi Kegiatan Optimalisasi Anggaran Percepatan				
Peningkatan Produksi Jagung Tahun Anggaran 2023				
No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Optimalisasi Anggaran Percepatan Peningkatan Produksi Jagung	1 paket	Kabupaten Pacitan	Rp 14.480.000
Jumlah				Rp 14.480.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- | | | |
|-----------------|---|------------------|
| Sumber dana | : | APBN |
| Jumlah Anggaran | : | Rp. 15.000.000,- |
| Realisasi | : | Rp. 14.480.000,- |

7. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum : SP DIPA-018.03.4.059178/2022 tanggal 30 Mei 2023 REV III
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Direktorat PPH Dirjen Tapang
- c. Penerima Bantuan : Poktan dan Gapoktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.9
Realisasi Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Alsin Corn Sheller	1 unit	Poktan Rukun III, Kec. Arjosari	Transfer Barang
		1 unit	Poktan Marsudi Tani 1, Kec. Sudimoro	
		1 unit	Poktan Swadaya Mandiri 2, Kec. Sudimoro	
		1 unit	Karya Luhur I, Kec. Punung	
		1 unit	Karya Luhur II, Kec. Punung	
		1 unit	Margo Makmur Tiga, Kec. Bandar	
		1 unit	Muda Tani Satu, Kec. Bandar	
		1 unit	Margo Makmur Dua, Kec. Bandar	
Jumlah				-

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana

: APBN Prov Tahun Anggaran 2023
- Jumlah Anggaran

: Rp. -
- Realisasi

: Rp. -

8. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

- a. Dasar Hukum : SP DIPA – 018.03.1.238251/2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Direktorat PPH Dirjen Tapang Kementan
- c. Penerima Bantuan : Gapoktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.10
Realisasi Kegiatan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Bantuan Alsin Combine Harvester Besar	1 unit	Gapoktan Sido Rukun, Kec. Pacitan	Transfer barang
Jumlah				-

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. -
 - Realisasi : Rp. -

9. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Dasar Hukum : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Perkebunan Provinsi Jatim
- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang Diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.11

**Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan
Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2023**

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Intensifikasi Kakao (Pupuk	1.200	Ngudi Luhur V Desa	14.940.000
2	Intensifikasi Kakao (Pupuk NPK)	1.000	Gapoktan Eras Desa Wonokarto	12.450.000
3	Intensifikasi Kakao (Pupuk	1.200	Sari Bumi Desa Sempu	14.940.000
4	Intensifikasi Kakao (Pupuk NPK)	1.200	Sedya Mulya 5 Desa Ketanggung	14.940.000
5	Intensifikasi Kakao (Pupuk	1.200	Sumber Lancar Desa	14.940.000
6	Intensifikasi Kakao (Pupuk	1.200	Punadirpa Desa Punung Kec.	14.940.000
	Total	7.000		87.150.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. 87.500.000
 - Realisasi : Rp. 87.500.000

10. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Dasar Hukum : DPA/A.1/3.27.0.00.0.00.06.0000/001/2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Perkebunan Prov. Jatim

- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.12

**Realisasi Kegiatan Pengawasan dan Peredaran Sarana Pertanian
Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan
Sarana Pendukung Pertanian Tahun Anggaran 2023**

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Gemah Ripah Satu Desa Wonoanti Kec.Tulakan	43.120.000
2	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Gemah Ripah Dua Desa Wonoanti Kec.Tulakan	43.120.000
3	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Gemah Ripah Tiga Desa Wonoanti Kec.Tulakan	43.120.000
4	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Gemah Ripah Empat Desa Wonoanti Kec.Tulakan	43.120.000
5	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Subur Makmur VI Desa Ketroharjo Kec.Tulakan	43.120.000
6	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Setya Karya Satu Desa Kluwih Kec.Tulakan	43.120.000
7	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Jati Mulyo IV Desa Jatigunung Kec.Tulakan	43.120.000
8	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Tri Karsa Desa Gembuk Kec. Kebonagung	43.120.000
9	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Setyo Maju 6 Desa Gawang Kec. Kebonagung	43.120.000
10	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Setyo Maju 7 Desa Gawang Kec. Kebonagung	43.120.000
11	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Karya Luhur I Desa Mendolo Kidul Kec. Punung	43.120.000
12	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Rukun III Desa Kedungbendo Kec. Arjosari	43.120.000
13	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Sido Maju I Desa Ketro Kec. Kebonagung	43.120.000
14	Pengembangan (Bibit Kakao)	4.000	Swadaya Mandiri 1 Desa Sumberejo Kec.Sudimoro	43.120.000
Total		56.000		603.680.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Anggaran : Rp. 616.000.000
 - Realisasi : Rp. 603.680.000

11. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

- a. Dasar Hukum : SP DIPA: 018.08.4.059185/2023 Tanggal 30 November 2022
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Pertanian dan Ketapang Prov Jatim
- c. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya :

Tabel 3.13
Realisasi Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	ANGGARAN (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
A	APBN Provinsi				
1	Pengelolaan system	1 Paket	Kab.Pacitan	15.000.000,-	14.700.000,-
2	Penyediaan dan Pengawasan Alsir	1 Paket	Kab.Pacitan	17.700.000.-	13.350.000.-
3	Fasilitas Pupuk Dan Pestisida	1 Paket	Kab.Pacitan	2.400.000,-	2.400.000.-
4	KP3	1 Paket	Kab.Pacitan	26.202.000,-	26.202.000,-
5	Ppendataan penerima pupuk bersubsidi	1 Paket		20.335.000.-	20.335.000,-
6	Ralokasi Verivfikasi dan Validasi Penerima Pupuk bersubsidi Pembiayaan Pertanian AU Dukungan Manageman dan Dukungan	1 Paket		57.500.000,-	57.500.000.-

			JUMLAH	139.137.000	134.487.000
--	--	--	--------	-------------	-------------

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana

:

APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023
- Jumlah Anggaran

:

Rp. 139.137.000
- Realisasi

:

Rp. 134.487.000

12. Program Pembangunan Bangunan Konservasi Air dan Antisipasi Anomali Iklim

- a. Dasar Hukum : SP DIPA -018.08.1.633656/2023 Tanggal 19 Mei 2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Kementerian Pertanian
- c. Penerima Bantuan : Poktan dan Gapoktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.14

Realisasi Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian Geomembran Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	ANGGARAN	Realisasi (Rp)
1.	Pembangunan Embung Pertanian	1 Unit	Poktan Ngudi Subur 01 Jeruk Bandar	115.000.000,-	115.000.000,-
		1 Unit	Poktan Tani Subur 01 Jeruk Bandar	115.000.000,-	115.000.000,-
		1 unit	Poktan Sido Mukti petungsinarang	115.000.000,-	115.000.00,-
		1 Unit	Poktan Mekar Pacitan	115.000.000,-	115.000.000,-
		1 Unit	Poktan Fahar Punung	115.000.000,-	115.000.000.-
			JUMLAH	575.000.000,	575.000.000,

Tabel 3.15
Realisasi Kegiatan Irigasi Perpompaan Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi>Nama Kelompok	ANGGARAN	Realisasi Biaya (Rp)
1.	Irigasi Perpompaan	1 Unit	Gapoktan Makmur Rukun Sejahtera Arjosari	100.000.000,-	100.000.000,-
		1 Unit	Poktan Sido Maju 1 Ketron Kebonagung	100,000.000,-	100.000.000,-
		1 Unit	Poktan Tani Rukun 1 Watupathok Bandar	100.000.000,-	100.000.000,-
			JUMLAH	300.000.000,	300.000.000,

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana

:

APBN Tahun Anggaran 2023
- Jumlah Anggaran

:

Rp. 875.000.000
- Realisasi

:

Rp. 875.000.000

13. Program Pupuk Menuju Pertanian Organik

- a. Dasar Hukum : DIPA Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian No SP.DIPA-018.08-0/2023 Tanggal 30 November 2022
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Kementerian Pertanian RI
- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang Diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.16
Realisasi Kegiatan Pengembangan UPPO Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/Nama Kelompok	ANGGARAN	Realisasi Biaya (Rp)
	Pengembangan UPPO	1 Unit	Poktan Bangunrejo II Pagerorejo Ngadirojo	200.000.000,-	200.000.000,-
			JUMLAH	200.000.000,	200.000.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- | | | | |
|-----------------|---|-----------------|---------------|
| Sumber dana | : | APBN Tahun | Anggaran 2023 |
| Jumlah Anggaran | : | Rp. 200.000.000 | |
| Realisasi | : | Rp. 200.000.000 | |

14. Program Kinerja Pembangunan

- a. Dasar Hukum : Surat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Nomor : 500.7.1/13719/122.1/2023 Tanggal 3 November 2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jatim
- c. Penerima Bantuan : Poktan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.17
Realisasi Kegiatan Bantuan Ternak Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Kegiatan Bantuan Ternak	Sapi Cross Betina : 10 ekor	Desa Tanjungpuro, Kec. Ngadirojo / Poktan Makmur III	
		Sapi PO betina : 10 ekor	Desa Belah, Kec. Donorojo / Sido Makmur	
		Domba :	Desa Hadiwarno,	

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
		- Jantan : 2 ekor - Betina : 31 ekor	Kec. Ngadirojo / Poktan Tunas Harapan IX	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Sekar, Kec. Donorojo / Poktan Tani Rukun	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Belah, Kec. Donorojo / Poktan Karya Tani	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Sumberejo, Kec. Sudimoro / Poktan Ngudi Lestari 3	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Sumberejo, Kec. Sudimoro / Poktan Selo Makmur 1	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Sumberejo, Kec. Sudimoro / Poktan Ngudi Lestari 1	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Ketro, Kec. Kebonagung / Poktan Sido Maju 3	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor Betina : 30 ekor	Desa Pucangombo, Kec. Tegalombo / Poktan Maju I	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor Betina : 30 ekor	Desa Ploso, kec. Punung / Poktan Maju	
		Kambing : - Jantan : 3 ekor Betina : 30 ekor	Desa Ploso, kec. Punung / Poktan Amanah	
		Kambing Senduro: - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Ketanggung, Kec. Sudimoro / Poktan Garda Etawa	
		Kambing Senduro: - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Sukorejo, Kec. Sudimoro / Poktan Margo Mulyo	

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
		Kambing Senduro: - Jantan : 3 ekor - Betina : 30 ekor	Desa Karangnongko, Kec. Kebonagung / Sedyo Makmur	
JUMLAH				1.735.696.000

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana : PAPBD Dinas Peternakan Provinsi Jatim
- Jumlah Anggaran : Rp. 1.735.696.000
- Realisasi : Rp. 1.735.696.000

**15. Program Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan
Produksi Ternak**

- a. Dasar Hukum: Nomer DIPA : SP DIPA-018.
06.4.059181/2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Provinsi
Jatim
- c. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan
Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.18

Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Inseminasi Buatan	48.466 ekor	Kab. Pacitan	1.453.980.000
2	Pelaporan Kelahiran	26.935 ekor	Kab. Pacitan	404.025.000
3	Sarana prasarana	2 paket	Kab. Pacitan	147.351.800
Jumlah				2.005.356.800

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
- Jumlah Angg : Rp. 2.005.356.800

Realisasi : Rp. 2.005.356.800

16. Program Sapi Kerbau Komoditi Andalan Negeri

- f. Dasar Hukum : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2020 Tanggal 12 Mei 2020
- g. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jatim
- h. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- i. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.19

Realisasi Kegiatan Optimalisasi Reproduksi Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Inseminasi Buatan	48.466 ekor	Kab. Pacitan	1.453.980.000
2	Pelaporan Kelahiran	26.935 ekor	Kab. Pacitan	404.025.000
Jumlah				1.858.005.000

- j. Sumber dan Jumlah Anggaran :
 - Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
 - Jumlah Angg : Rp. 1.858.005.000
 - Realisasi : Rp. 1.858.005.000

17. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

- a. Dasar Hukum : Berita Acara Serah terima Nomor:
 - 1. 27/OBAT-OBATAN.APBD/P4H/2023 Tanggal 12 Mei 2023
 - 2. 27.A/SARPRAS BTT PMK/V/KESWAN/2023 Tanggal 17 Mei 2023
 - 3. 27.A/BUKU SAKU BTT PMK/X/KESWAN/2023 Tanggal 3 Oktober 2023

4. 27/Obat-Obatan-LSD/KSWN/2023 Tanggal 15
Desember 2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Prov Jatim
- c. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.20

Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Obat-obatan PMK dan sarpras	5 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	240.540.560
Jumlah				240.540.560

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana : APBD Provinsi Jawa Timur
- Jumlah Anggaran : Rp. 240.540.560
- Realisasi : Rp. 240.540.560

18. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK)

- f. Dasar Hukum : Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur nomor 188.4/0040/122.3/2023 Tanggal 02 Januari 2023
- g. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Prov Jatim
- h. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- i. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.21

Realisasi Kegiatan Vaksinasi dan Pengobatan Penyakit PMK Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Vaksinasi PMK	410.700 ekor	Semua wilayah Se Kabupaten Pacitan	10.267.500.000
2	Pengobatan PMK	1.798 ekor	desa Kebonsari, desa Gondosari, desa Mantren, desa Sooka, desa Punung kecamatan Punung; desa Tumpuk Kecamatan Bandar; desa Nawangan, desa Sempu kecamatan Nawangan; desa Pringkuku, desa Pelem, desa Sugihwaras, desa Poko, desa dadapan Kecamatan Pringkuku	35.960.000
3	Obat-obatan PMK dan sarpras	12 paket	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan	6.328.944.650
Jumlah				16.632.404.650

- j. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana : APBN
 - Jumlah Anggaran : Rp. 16.632.404.650
 - Realisasi : Rp. 16.632.404.650

19. Program Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak Tahun Anggaran 2023

- a. Dasar Hukum : Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 610/Kpts/Tl.040/F/01/2023 tentang Petunjuk Teknis kegiatan penandaan dan Pendataan Ternak Tahun Anggaran 2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Dinas Peternakan Provinsi Jatim
- c. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
- d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.22
Realisasi Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak
Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Realisasi Biaya (Rp)
1	Kegiatan Penandaan dan Pendataan Ternak Tahun Anggaran 2023	33.114 unit ear tag	Ternak sapi di 12 (dua belas) kecamatan	662.280.000,00
Jumlah				662.280.000,00

e. Sumber dan Jumlah Anggaran :

Sumber dana : APBN Tahun Anggaran 2023
 Jumlah Anggaran : Rp. 662.280.000
 Realisasi : Rp. 662.280.000

20. Program Pengembangan Wirausahawan Muda
Perdesaan Di Sektor Pertanian

a. Dasar Hukum :

- Swakelola Tipe II Kegiatan Workshop Jalur Motivasi Bisnis No. B-5236/PL.130/I.9.1/7/2023 Tanggal 26 Juli 2023
- Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Proposal Bisnis No. B-5264/PL.130/I.9.1/7/2023 Tanggal 26 Juli 2023
- Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Pupuk Organik) Nomor B-8036/PL.130/I.9.1/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023
- Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Pengolahan Kakao) Nomor B-8058/PL.130/I.9.1/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023
- Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Budidaya Cabai) Nomor B-8035/PL.130/I.9.1/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023

6. Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Pengolahan Aneka Keripik) Nomor B-8037/PL.130/I.9.1/10/2023 Tanggal 23 Oktober 2023
 7. Kontrak Swakelola Tipe II Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Manajemen Ternak Kambing) Nomor B-8034/PL.130/I.9.1/10/2023 Tanggal 31 Oktober 2023
- b. Instansi Pemberi Bantuan : Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Malang
 - c. Perangkat Daerah yang Melaksanakan: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan;
 - d. Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya:

Tabel 3.23

Realisasi Kegiatan Workshop / Pelatihan Tahun Anggaran 2023

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
1	Workshop Jalur Motivasi Bisnis	1070 Peserta	12 Kecamatan	473.562.000	468.724.500
2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Proposal Bisnis	1070 Peserta	12 Kecamatan	722.595.000	719.395.000
3	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Pupuk Organik)	100 Peserta	Donorojo, Arjosari, Pringkuku, Ngadirojo	47.451.500	47.451.500
4	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Budidaya dan Pengolahan	50 Peserta	Kebonagun g,Arjosari	28.176.200	28.176.200

No	Rincian Kegiatan	Volume	Lokasi/ Nama Kelompok	Anggaran (Rp)	Realisasi Biaya (Rp)
5	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Budidaya Cabai)	125 Peserta	Tegalombo, Bandar, Tulakan, Pacitan, Sudimoro	89.929.800	89.729.800
6	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Pengolahan Aneka Keripik)	100 Peserta	Punung, Pringkuku	43.469.500	43.459.500
7	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lanjutan Pertanian (Pelatihan Manajemen Ternak Kambing)	250 Peserta	Donorojo, Punung, Pacitan, Bandar, Kebonagung, Ngadirojo, Tulakan, Sudimoro, Tegalombo, Nawangan	165.973.000	165.973.000
Jumlah				1.571.157.000	1.562.909.500

- e. Sumber dan Jumlah Anggaran :
- Sumber dana

: Financing agreement between Republic of Indonesia and IFAD (Loan No. 2000002604; Grant No. 2000002603)
- Jumlah Anggaran

: Rp. 1.571.157.000
- Realisasi

: Rp. 1.562.606.500

3.1.2. Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas

Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

- a. Permasalahan
- Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas
- Pembantuan yang diterima oleh daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Kesesuaian jenjang usaha (pemula, lanjut dan maju) peserta masih ada yang belum sesuai dengan KAK per masing-masing Kegiatan
- (2) Ada Penyerapan anggaran yang belum 100%

b. Solusi

Solusi yang diusulkan adalah sebagai berikut :

- (1) Penyesuaian jenjang usaha dan jenis pelatihan pada pelatihan selanjutnya
- (2) Melakukan promosi dan sosialisasi Program YESS melalui fasilitator muda dan penyuluh secara masif
- (3) Rutin melakukan evaluasi pada akhir tahun agar perencanaan dan penyerapan anggaran optimal

3.1.3. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang Diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan Di Bawahnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan tidak memberikan penugasan terhadap Pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan pada Tahun Anggaran 2023.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan dan Perhitungan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dihitung dengan menggunakan indeks pencapaian SPM. Indeks pencapaian SPM tersebut meliputi capaian mutu pelayanan dasar dan capaian penerima pelayanan dasar. Diharapkan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di pemerintah daerah dapat mencapai nilai maksimal sesuai dengan kemampuan dari masing-masing daerah, sehingga pelayanan dasar ke masyarakat dapat maksimal. Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan pelaksanaan penerapan SPM di daerah, dengan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran. Penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

4.1. Bidang Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pendidikan untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Pendidikan anak usia dini;
- b. Pendidikan dasar;
- c. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga Kabupaten usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %	26.385.175.399	Setiap Tahun
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga Kabupaten usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	100 %	95.878.579.104	Setiap Tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Kabupaten usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	100 %	5.812.383.911	Setiap Tahun

4.1.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Hasil Capaian SPM Urusan Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total yang Harus Dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Total Capaian

1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga kabupaten usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	17.019	17.019	96,74 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga kabupaten usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar	50.253	50.253	99,98 %
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga kabupaten usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.180	2.180	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Pendidikan masuk dalam kategori Tuntas Utama, dengan total capaian 98,74 %.

4.1.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Pendidikan sebagai pengampu bidang urusan Pendidikan ialah sebesar Rp.607.727.111.975 (32,29% dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada dinas Pendidikan ialah sebesar Rp120.419.333.399 (6,42% dari APBD dan 19,81% dari anggaran Dinas Pendidikan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pendidikan ialah :

Tabel 4.3
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Pendidikan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Pengelolaan Pendidikan	120.419.333.399	115.428.076.858,56	95,86%
1.	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	23.501.242.394	22.884.081.656	97,37%
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	63.993.956.619	61.244.316.028	95,70%
3.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	29.995.683.480	28.376.615.965	94,60%
4.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.928.450.906	2.923.063.210	99,82%
2.	Program Pengembangan Kurikulum	10.000.000	9.750.000	97,50%
1.	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	10.000.000	9.750.000	97,50%
3.	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	8.636.799.015	7.993.161.325	92,55%
1.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.636.799.015	7.993.161.325	92,55%
4.	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	10.000.000	9.883.050	98,83%
	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang	10.000.000	9.883.050	98,83%

	Diselenggarakan oleh Masyarakat			
	Jumlah	129.076.132.414	123.440.871.233,56	95,56 %

4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pendidikan. Untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan : 140
- b. UPT TKSD + Guru DPK : 377
- c. Guru SMP + Staf TU : 1.073
- d. Guru SD + Penjaga : 3.461

4.1.6. Kendala yang Dihadapi

- a. Permasalahan
 - 1. Masih belum terbangunnya sistem pendidikan yang baik untuk mendapatkan mendapatkan data base pendidikan (peserta didik tidak mampu (miskin), pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah satuan pendidikan, ruang kelas, jumlah rombongan belajar, jumlah sekolah berakreditasi) data sekolah pada jenjang Raudhatul Athfal (RA), Pendidikan Dasar (MI, MTs) yang menjadi kewenangan Kemenag;
- b. Solusi
 - 1. Solusi permasalahan ke satu adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi membuat Aplikasi Pendataan LI SM (Lembar Individu Sekolah Madrasah) yang diisi secara online oleh satuan pendidikan baik di Satuan Pendidikan Kemenag dan Bidang PAUD;
 - 2. Solusi untuk permasalahan kedua yaitu melaksanakan inovasi SMART BETTER dan Sahabat Dikmas yang sasarannya adalah mendata masyarakat usia 7-59 tahun putus sekolah/tidak sekolah serta menghimpun data

siswa anak tidak mampu berdasarkan Lembar Individu Sekolah Madrasah sehingga tersedianya data valid sebagai sasaran SPM Bidang Pendidikan dan juga untuk menyusun Tahun Anggaran 2021.

3. Mengoptimalkan kinerja Tim Pencapaian SPM Bidang Pendidikan secara optimal guna mendapatkan data dan capaian kinerja di masing- masing SPM Bidang Pendidikan (PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Kesetaraan).

4.2. Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Bab II Menjelaskan ada 12 Jenis Layanan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota :

- a. Pelayanan Kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan pada penderita hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkolosis;
- l. Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus/HIV*)

4.2.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Target Pencapaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.915,96	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Kesehatan ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
6.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah warga Kabupaten usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
7.	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
8.	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
9.	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah warga Negara penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
10.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah warga Negara Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
11.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan <i>Tuberculosis</i> (TB)	Jumlah warga Negara terduga <i>Tuberculosis</i> (TB) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun
12.	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah warga Negara dengan Resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	7.965.783.909	Setiap Tahun

4.2.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan tahun 2023 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.5
 Hasil Capaian SPM Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	5.830	5.406	93,11%
2.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5.586	5.280	95,01%
3.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	5.334	5.217	97,95%
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	31.301	28.968	93,07%
5.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	64.223	64.223	100%
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	331.274	259.221	81,32%
7.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	130.360	107.131	84,95%
8.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan	187.896	92.769	58,23%

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
		Kesehatan			
9.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Jumlah warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	7.236	7.067	97,94%
10	Pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga Negara dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan	1.061	1.061	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	5.467	5.467	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah warga Negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan Kesehatan	6.710	6.667	99,46%

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan masuk dalam kategori Tuntas Utama, dengan total capaian 91,76 %.

4.2.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagai pengampu bidang urusan Kesehatan ialah

sebesar Rp.205.394.284.634 (10,95 % dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp95.589.406.915 (5,09% dari APBD dan 46,54% dari anggaran Dinas Kesehatan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan ialah :

Tabel 4.6
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Kesehatan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	95.589.406.915	80.038.744.446	83.73 %
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	34.975.427.265	31.959.291.859	91.38 %
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	57.868.394.385	45.643.836.879	78.88 %
Jumlah		95.589.406.915	80.038.744.446	83.73 %

4.2.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Kesehatan. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

- a ASN = 77
- b Non ASN = 21
- c Bidan = 828
- d Perawat = 1.548

- e Dokter Umum = 258
- f Dokter Spesialis = 61
- g Dokter Gigi dan Dokter gigi spesialis = 55

4.2.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan pada tahun 2022 terdapat permasalahan yaitu pada pengumpulan data Kesehatan yang terkendala pada banyaknya puskesmas yang tidak bisa tepat waktu dalam melaksanakan pelaporan ke Dinas Kesehatan, sehingga penginputan data capaian pelaksanaan SPM bidang urusan Kesehatan agak sulit untuk dilakukan di awal bulan.

4.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4.3.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Target Pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	19.830.275.430	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	10.293.394.430	Setiap Tahun

4.3.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum tahun 2023 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.8
Hasil Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	589.109	468.208	91,79 %
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	573.156	573.156	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan masuk dalam kategori Tuntas Utama, dengan total capaian 91,79 %.

4.3.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Pekerjaan Umum bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengampu bidang urusan Pekerjaan Umum ialah sebesar Rp 168.479.197.590 (8,98% dari APBD). Sedangkan alokasi anggaran penerapan SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah sebesar Rp30.123.669.860 (1,61% dari APBD dan 17,88% dari anggaran Dinas Kesehatan). Adapun rincian penggunaan dana untuk pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum ialah :

Tabel 4.9
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.830.275.430	17.202.580.994	86,75%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	19.830.275.430	17.202.580.994	86,75%

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
	Kabupaten/Kota			
1.	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	10.293.394.430	10.279.234.026	99,86%
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	10.293.394.430	10.279.234.026	99,86%
Jumlah		30.123.669.860	27.481.815.020	91,22 %

4.3.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan pekerjaan umum. Untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan jumlah pegawai yang terdapat pada OPD tersebut sebanyak 137 orang.

4.3.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan pekerjaan umum pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan pekerjaan umum berjalan maksimal sesuai dengan alokasi anggaran, tanpa adanya kendala yang berarti.

4.4. Bidang Urusan Perumahan rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan (*Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023*), jenis pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota;
- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Target Pencapaian SPM Perumahan Rakyat

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	247.200.000	Setiap Tahun
2.	Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %	31.980.000	Setiap Tahun

4.4.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat tahun 2023 mencapai kategori indeks tuntas paripurna (100%), dengan kondisi terjadinya bencana di Kabupaten Pacitan pada tahun 2023 ini.

Tabel 4.11
Hasil Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	40	40	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	1	1	100 %

4.4.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan Perumahan Rakyat bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pengampu bidang urusan Perumahan Rakyat ialah sebesar Rp. 43.545.678.861,00 (1,79 % dari APBD). Sedangkan untuk

alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp. 364.180.000 (0,02 % dari APBD dan 1,09 % dari anggaran Perangkat Daerah). Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan Perumahan Rakyat ialah : Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan pendataan yang meliputi pendataan korban bencana yang belum ditangani dan pendataan rumah dikawasan bahaya untuk mendapatkan fasilitasi relokasi, penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana, atau dan pembangunan kembali rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Pacitan ada tidak terjadi bencana dan tidak terdapat program yang mengharuskan pelaksanaan penyediaan maupun rehabilitasi dan relokasi rumah masyarakat.

Tabel 4.12
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Perumahan Rakyat

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TARGET	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Pengembangan Perumahan	279.180.000	261.178.500	93,55%
1.	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	31.980.000	30.839.500	96,43%
2.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	247.200.000	231.179.000	93,52%
Jumlah		279.180.000	261.178.500	93,55%

4.4.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan perumahan rakyat. Untuk bidang urusan perumahan rakyat, dukungan personil sejumlah 15 orang yang terdiri dari ASN, tenaga harian lepas dan fasilitator lapangan. sama dengan dukungan personil bidang urusan pekerjaan umum, dikarenakan diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pacitan, yaitu sebanyak 137 orang ASN.

4.4.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan perumahan rakyat pada tahun 2022-(3) tidak terdapat permasalahan. Pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan perumahan rakyat tidak terdapat kendala. dikarenakan pada tahun 2022 ini Kabupaten Pacitan tidak terjadi bencana. Antara lain :

- Penerima bantuan menolak bantuan, karena dana bantuan tidak sesuai keinginan dan belum adanya dana swadaya.
- Adanya program bantuan lain yang dananya lebih besar, sehingga calon penerima bantuan lebih memilih bantuan yang lebih besar.
- Tidak adanya lahan relokasi, sehingga calon penerima bantuan tidak bisa menerima bantuan.

4.5. Bidang Urusan Trantibumlinmas

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Trantibumlinmas untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Pelayanan Ketenteraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;

- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;

4.5.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas Kabupaten Pacitan ialah :

Tabel 4.13
Target Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum (trantibum)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten	100 %	4.808.366.417	Setiap Tahun
2.	Pelayanan informasi rawan bencana (kebencanaan)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	125.072.500	Setiap Tahun
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	829,335,080	Setiap tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	352.738.750	Setiap tahun
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	170.000.000	Setiap tahun

4.5.3. Hasil Capaian

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Urusan Trantibumlinmas tahun 2023 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.14
Hasil Capaian SPM Urusan Trantibumlinmas

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten	10	10	100 %
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	484.924	484.924	100 %

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	(Kebencanaan)				
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	484.924	484.924	100 %
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	594	594	100 %
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	200	200	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan trantibumlinmas masuk dalam kategori Tuntas Paripurna dengan total capaian 100 %.

4.5.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk bidang urusan trantibumlinmas, diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp13.861.529.738 (0,74 % dari APBD). Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp6.285.512.747 (0,34 % dari APBD dan 45,35% dari anggaran Perangkat Daerah). Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan trantibumlinmas ialah :

Tabel 4.15
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Trantibumlinmas

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Trantibum)	4.808.366.417	4.732.565.629	98,42%
1.	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	864.400.000	863.627.900	99,91%
2.	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	3.938.966.417	3.864.256.229	98,10%
3.	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	5.000.000	4.681.500	93,63%
2.	Program Penanggulangan Bencana	1.307.146.330	1.278.360.048	97,80%
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	125.072.500	124.791.000	99,77%
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	651.835.080	643.839.525	98,77%
	Pelayanan	352.738.750	340.266.303	96,46%

	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	177.500.000	169.463.220	95,47%
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran (Damkar)	170.000.000	169.919.470	99,95%
1.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	145.417.000	145.396.470	99,99%
3.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	24.583.000	24.523.000	99,76%
Jumlah		6.285.512.747	6.180.846.147	98,33 %

4.5.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan trantibumlinmas. Bidang urusan trantibumlinmas diampu oleh 2 (dua) perangkat daerah, sehingga dukungan personil tercantum ialah personil dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Satuan Polisi Pamong Praja ,
 - ASN : 41 orang
 - Non ASN : 72 orang
- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ,
 - ASN : 33 orang

Non ASN : 25 orang

4.5.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan trantibumlinmas pada tahun 2023 tidak terdapat permasalahan yang berarti. Hanya saja pelaksanaan penerapan SPM bidang urusan trantibumlinmas yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan terkendala keterbatasan dukungan anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah, alokasi anggaran sudah optimal, sehingga pelaksanaan penerapan SPM dapat optimal.

4.6. Bidang Urusan Sosial

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, jenis pelayanan dasar bidang urusan Sosial untuk Kabupaten Pacitan, terdiri atas :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

4.6.2. Target Pencapaian

Pemerintah Kabupaten Pacitan menetapkan target pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan data jumlah penerima pelayanan dasar yang diperoleh setiap tahunnya. Target pencapaian Standar

Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial Kabupaten Pacitan ialah :

Tabel 4.16
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	81,330,250	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	81,330,250	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	81,330,250	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	81,330,250	Setiap tahun

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Alokasi Anggaran	Batas Waktu Capaian
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100 %	238.311.875	Setiap tahun

4.6.3. Realisasi

Hasil pencapaian pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial tahun 2022 ialah sebagai berikut :

Tabel 4.17
Hasil Capaian SPM Urusan Sosial

No .	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	1164	1164	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	775	775	96,67 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh	598	598	98,46 %

No .	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Total Pencapaian
	terlantar di luar panti	rehabilitasi sosial di luar panti			
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	6	6	96,67 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	163	163	100 %

Dari hasil capaian seperti tabel di atas, diketahui bahwa kategori indeks pencapaian SPM bidang urusan sosial masuk dalam kategori Tuntas Utama, dengan total capaian 98,36 %.

4.6.4. Anggaran

Anggaran pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial bersumber dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat. Untuk bidang urusan sosial, diampu oleh Dinas Sosial Kabupaten Pacitan. Alokasi anggaran APBD Kabupaten Pacitan untuk Dinas Sosial Kabupaten Pacitan ialah sebesar Rp13.778.551.013 (0,73 % dari APBD). Sedangkan untuk alokasi anggaran penerapan SPM ialah sebesar Rp669.953.875 (0,04 % dari APBD dan 4,86% dari anggaran Perangkat Daerah). Dinas Sosial

Kabupaten Pacitan juga mendapatkan anggaran dari sumber lainnya sebesar Rp10.495.263.553. Adapun rincian penggunaan anggaran untuk SPM bidang urusan sosial ialah :

Tabel 4.18
Anggaran Program dan Kegiatan pendukung
SPM Urusan Sosial

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SERAPAN
1.	Program Rehabilitasi Sosial	431.642.000	422.250.900	97,82%
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	325.321.000	320.264.500	98,45%
2.	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	106.321.000	101.986.400	95,92%
2.	Program Penanganan Bencana	238.311.875	204.003.475	85,60%
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	121.508.375	91.002.725	74,89%
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	116.803.500	113.000.750	96,74%
Jumlah		669.953.875	626254375	93,47 %

4.6.5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang urusan sosial. Bidang urusan sosial diampu oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

ASN : 31 orang

Non ASN : 24 orang

4.6.6. Kendala yang Dihadapi

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal bidang urusan sosial pada tahun 2023 terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengampu, yaitu :

1. Pengumpulan data
 - Pengumpulan data masih kurang tertib dan kurang valid
 - Pengumpulan data terkendala SDM dan sarana yang kurang (kendaraan operasional dan computer)
 - Belum menemukan metode atau system pengumpulan data yang cepat dan akurat
2. Perhitungan kebutuhan
 - Penghitungan kebutuhan belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum memahami teknis penghitungan kebutuhan
 - Penghitungan kebutuhan terkendala kurangnya SDM
3. Perencanaan dan penganggaran
 - Masih terdapat kegiatan yang kurang mendapatkan prioritas dikarenakan kurang pemahaman terhadap SPM bidang sosial
 - Sering terjadi penganggaran tidak sesuai dengan perencanaan, misalnya anggaran penerapan SPM terkena refocusing
4. Pelaksanaan

- Kurang pemahaman terhadap SPM menyebabkan pelaksanaan program kegiatan kurang maksimal
- Kurangnya SDM menyebabkan penerapan SPM kurang maksimal

5. Lain-lain

- Aplikasi e-SPM rumit dan sulit dipahami
- Pada e-SPM Bidang Sosial terdapat nama program yang tidak muncul, yaitu Program Penanganan Bencana
- Pada aplikasi tidak terdapat menu simpan dalam bentuk excel menyulitkan dokumentasi laporan SPM

BAB V

PENUTUP

Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pacitan Tahun 2023 telah menorehkan prestasi yang membanggakan. Sinergi dan kolaborasi bersama akademisi, pelaku usaha, masyarakat, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya serta media telah mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Pacitan dianugerahi berbagai penghargaan. Berbagai prestasi dan penghargaan berhasil ditorehkan dalam berbagai bidang pembangunan dan memperoleh pengakuan baik pada level nasional. Upaya untuk mencapai keberhasilan pembangunan selama tahun 2023 senantiasa dilakukan dengan kerja keras dan itikad baik oleh Bupati Pacitan beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan terhadap indikator kinerja guna pelayanan masyarakat.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pacitan tahun 2022 merupakan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang disusun berkat kerjasama dan partisipasi semua pemangku kepentingan pembangunan mulai dari Pemerintah Daerah, DPRD, para pelaku perekonomian dan masyarakat luas sesuai dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing, yang dibiayai oleh APBD dan sumber pendanaan lainnya yang sah. Hasil-hasil pencapaian kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2022 merupakan realisasi dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan bersama DPRD berdasarkan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Oleh karena itu kita harus meningkatkan komitmen pembangunan melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, karena permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan

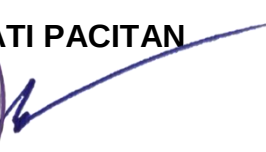
sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan menuju peningkatan kesejahteraan rakyat.

Terima kasih yang sebesar – besarnya kami ucapkan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan, segenap pimpinan dan anggota DPRD serta jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan termasuk jajaran pemerintahan desa dan masyarakat Kabupaten Pacitan secara keseluruhan yang telah memberikan dukungan dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun 2023.

Apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup substansi maupun redaksional laporan, kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar - besarnya. Kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita pada tahun – tahun mendatang.

Demikian laporan ini dibuat sebagai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. Semoga Allah SWT meridhoi segala upaya kita untuk memajukan dan menyejahterakan masyarakat Kabupaten Pacitan. Aamiin.

Pacitan, Maret 2023

 **BUPATI PACITAN**

INDRATA NUR BAYUAJI